

ISBN : 978-979-3968-80-3

STAIN PRESS
PEKALONGAN

STAIN Pekalongan PRESS
Jl. Kusumabangsa No. 9 Pekalongan
Telp (0285) 412575, Fax (0285) 423418

KORUPSI | Perspektif Filsafat Etika Aristoteles

Tri Astutik Haryati

KORUPSI

Perspektif Filsafat Etika
Aristoteles

Tri Astutik Haryati

Editor :
Amat Zuhri
Miftahul Ula

STAIN PRESS
PEKALONGAN



KORUPSI

Perspektif Filsafat Etika Aristoteles

Penulis :
Tri Astutik Haryati

STAIN PEKALONGAN **PRESS**

Korupsi

Perspektif Filsafat Etika Aristoteles

Penulis : Tri Astutik Haryati

Editor : Amat Zuhri
IAIN Pekalongan
Miftahul Ula
IAIN Pekalongan

Pracetak & cetak:

Cetakan Pertama : Desember 2015

vi + 154 hlm.

ISBN : 978-979-3968-80-3

Hak cipta dilindungi undang-undang pada penerbit
STAIN Pekalongan Press
Jl. Kusumabangsa No 9 Pekalongan
Telp. (0285) 412575. Faks. (0285) 423418

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah peneliti bersyukur, akhirnya laporan penelitian ini bisa terselesaikan walaupun banyak hambatan sebelumnya. *Shalawat* serta *salam* mudah-mudahan tetap terhadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya dan sahabat-sahabatnya.

Korupsi merupakan fenomena universal yang dapat ditemukan di berbagai kebudayaan dan masa termasuk di Indonesia. Kata “korupsi” sendiri menjadi kata yang sangat populer di Indonesia pascareformasi. Popularitas kata tersebut tidak muncul dari ruang hampa, melainkan suatu kenyataan yang hidup, tumbuh subur dan semakin berkembang di segala aspek kehidupan. Bahkan secara faktual, korupsi di Indonesia tidak hanya mengakar dalam kultur dan struktur birokrasi pemerintahan saja, melainkan sudah menjadi fenomena multi dimensional yang telah menggerogoti sendi-sendi kehidupan nasional.

Apapun makna dan bentuk korupsi, implisit di dalamnya adalah persoalan moral yang terdapat dalam diri manusia yang mengalami deviasi. Sehingga tidak semata-mata terkait dengan hukum atau ekonomi saja. Muatan moral ini menjadi semakin jelas ketika unsur kesengajaan dalam penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang tersebut ditonjolkan. Sehingga unsur manusia sebagai pelaku yang berkesadaran menduduki posisi sentral. Moralitas merupakan suatu dimensi nyata dalam kehidupan setiap manusia secara individual maupun secara sosial. Di sinilah filsafat moral (etika) menemukan momen yang tepat untuk memotret fenomena korupsi

yang dilakukan oleh manusia, di mana dalam penelitian ini menggunakan filsafat moral (etika) Aristoteles. Etika Aristoteles bertujuan menjadikan manusia sebagai “manusia utama” melalui rasionya agar bisa mencapai tujuan tertinggi dalam kehidupan “*eudaimonia*”. Prosesnya melalui “intelektualisme etis” yakni menjadikan pengetahuan bukan semata-mata teoritis, melainkan pengetahuan “yang baik” yang bersifat “eksistensial”. Pengetahuan eksistensial adalah bangunan karakter yang bisa dilakukan melalui pendidikan.

Dalam melakukan penelitian ini peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag selaku Ketua STAIN Pekalongan dan Bapak Maghfur Ahmad, M.Ag, M.Pd selaku Kepala P3M STAIN Pekalongan yang telah membantu secara administratif sehingga peneliti mendapatkan bantuan biaya dari DIPA STAIN Pekalongan Tahun Anggaran 2014.

Tak terlupakan pula peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penelitian ini. Semoga amal baik mereka mendapat balasan dari Allah SWT. Akhirnya peneliti berharap semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi orang-orang yang beriman dan yang berniat mencari kebenaran.

Pekalongan, Desember 2015

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Kata Pengantar.....	iii
Daftar Isi	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan Penelitian	9
C. Pembatasan Masalah	10
D. Signifikansi Penelitian.....	13
E. Kajian Riset Sebelumnya	16
F. Kerangka Teori.....	17
G. Metode Penelitian	21
H. Sistematika Pembahasan	28
BAB II MENJERNIHKAN MAKNA ETIKA.....	29
A. Pengertian Konseptual	29
1. Etika.....	29
2. Moral	66
3. Akhlak.....	40
4. Susila	45
B. Titik temu antara Etika, Moral, Akhlak, dan Susila	47
C. Hakekat Etika Filosofis	50
D. Epistemologi Etika	57
E. Aksiologi Etika: Agama dan Modernitas	60

BAB III BERKENALAN DENGAN ARISTOTELES.....	67
A. Riwayat Hidup Aristoteles.....	67
B. Karya-karya.....	70
C. Pemikirannya Aristoteles tentang Etika.....	75
1. Kebahagiaan sebagai Tujuan	77
2. Kebahagiaan berdasarkan Isinya	81
3. Ajaran tentang Keutamaan	87
4. Kehidupan Ideal	90
BAB IV KORUPSI DALAM TINJAUAN.....	93
A. Pengertian Korupsi	93
B. Latar Belakang Timbulnya Korupsi.....	101
C. Bentuk-bentuk dan Jenis-jenis Korupsi.....	111
D. Dialektika Korupsi dengan Etika Aristoteles	117
1. Tujuan Hidup Manusia	117
2. Korupsi: sebuah Kesuksesan Imajiner	123
3. Menjadi Manusia Utama	127
BAB V PENUTUP	135
A. Kesimpulan.....	135
B. Rekomendasi	136
Daftar Pustaka.....	138
Biodata Penulis	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perilaku korupsi merupakan fenomena universal yang dapat dijumpai di berbagai budaya dan bangsa, salah satunya di Indonesia. Istilah korupsi di Indonesia mulai populer pasca reformasi. Popularitas kata tersebut tidak muncul dari ruang hampa, melainkan menjadi fakta empiris yang hidup dan tumbuh subur di masyarakat bahkan berkembang di segala aspek kehidupan. Bahkan secara faktual, telah mengakar dalam kultur masyarakat Indonesia terutama dalam struktur pemerintahan. Akibatnya perilaku korupsi menjadi fenomena multi dimensional yang mengancam kehidupan nasional Indonesia.

Dalam perspektif hukum, perilaku korupsi merupakan salah satu bentuk pelanggaran hukum. Karenanya dinegasikan oleh setiap orang. Akan tetapi, tidak terdapat pemahaman tunggal mengenai ruang lingkup dan makna korupsi hingga berakibat munculnya perbedaan persepsi bagi tiap-tiap orang. Lebih dari itu, tidak semua orang memiliki kesadaran sama bahwa korupsi—bisa jadi—telah menjadi bagian dari kehidupan dirinya. Karena secara empiris kultural, terdapat unsur-unsur korupsi dalam pemberian hadiah kepada seseorang dengan harapan tertentu, meskipun ada juga sistem yang menjadikan seseorang bertindak korupsi. Heterogenitas pemahaman masyarakat tentang perilaku korupsi membawa konsekuensi timbulnya kesalahpahaman

mengenai bentuk-bentuk korupsi, bahkan dapat menyebabkan seseorang terperangkap dalam sistem yang mengakomodir perilaku korupsi.¹

Korupsi—dalam segala bentuknya—adalah kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) karena berpotensi menuju hiperkriminalitas. Sebagaimana dijelaskan oleh Baudrillard² bahwa kejahatan menjadi hiper ketika melampaui realitas (akal sehat, hukum, budaya, moralitas, dan lain-lain), hingga berkembang sedemikian rupa menuju tingkatan yang sempurna. Meskipun demikian, korupsi sebagai musuh bersama (*common enemy*) belum menjadi bagian dari gerakan moral bangsa. Realitas tersebut menjadi tantangan besar bagi terwujudnya *good governance* di Indonesia.

Pemberantasan korupsi menjadi semakin sulit karena terkait berbagai persoalan yang kompleks seperti kondisi ekonomi, politik, sosial, dan budaya, dengan *law enforcement*, *good governance*, bahkan dengan kondisi politik global.³ Kondisi tersebut menyebabkan akar kejahatan korupsi sulit ditemukan. Dengan hadirnya Undang-undang antikorupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi, Pengadilan Tipikor, dan *Indonesian Corruption*

¹ Karlina Helmanita. 2006. "Pendidikan Antikorupsi Sebuah Langkah Strategis" dalam Karlina Helmanita dan Sukron Kamil (Ed). *Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi*. Jakarta: CSRC. h. 10.

² Sutinah. 2010. "Teori Simulations Jean Baudrillard" dalam Bagong Suyanto dan M. Khusna Amal (Ed). *Anatomi dan Perkembangan Teori Sosial*. Yogyakarta: Aditya Media. h. 387.

³ Azyumardi Azra. 2006. "Pendidikan Antikorupsi: Mengapa Penting" dalam Kata Pengantar. Karlina Helmanita dan Sukron Kamil (Ed). *Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi*. Jakarta: CSRC. h. 10.

Watch diharapkan dapat mengurangi perilaku korupsi, ternyata faktanya tidak demikian. Karena itulah persoalan korupsi di Indonesia tidak mungkin hanya dapat dijawab melalui penegakan hukum. Hal ini mengindikasikan bahwa korupsi tidak semata-mata berkaitan dengan hukum atau ekonomi saja melainkan persoalan moralitas.

Persoalan moralitas ini semakin tampak ketika ada unsur kesengajaan dalam penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan. Hal ini menunjukkan bahwa korupsi dilakukan oleh pelaku yang memiliki kesadaran diri yakni manusia—menempati posisi sentral—dimana dimensi moral atau moralitas merupakan ciri khas manusia yang tidak terdapat pada makhluk lain.⁴ Moralitas juga merupakan suatu dimensi nyata dalam kehidupan setiap manusia secara individual maupun secara sosial. Dalam konteks ini, hanya manusialah—yang mempunyai kesadaran diri—yang bisa melakukan korupsi. Dengan demikian, korupsi berkaitan erat dengan moral yang ada di dalam diri manusia itu sendiri. Di sinilah filsafat moral (etika) menemukan momen yang tepat untuk memotret fenomena korupsi yang dilakukan oleh manusia.

Etika berasal dari bahasa Yunani kuno *ethos* (tunggal) yang berarti: tempat tinggal yang biasa; padang rumput; kandang/habitat; kebiasaan, adat; akhlak, watak; perasaan, sikap, cara berpikir. Dalam bentuk jamak (*ta etha*) berarti adat kebiasaan, dan pengertian tersebut menjadi latar belakang terbentuknya istilah etika yang digunakan oleh Aristoteles untuk menunjukkan filsafat

⁴K. Bertens. 2011. *Etika*. Yogyakarta: Kanisius. h. 14-15.

moral.⁵ Dalam pengertian ini etika dapat didefinisikan sebagai sebuah ilmu, sebuah refleksi kritis, metodis, dan sistematis tentang tingkah laku manusia, sejauh berkaitan dengan norma atau dari sudut pandang baik dan buruk.⁶ Sedangkan tujuan etika Aristoteles adalah memberikan tawaran untuk mengembalikan manusia pada sifatnya yang hakiki.

Pemikiran Aristoteles—seorang pemikir yang hidup lebih dari 2300 tahun lalu—menjadi sangat relevan karena dia adalah filosof Yunani pertama yang menulis sebuah buku etika,⁷ dengan tujuan agar manusia dapat menjalani hidup dengan bijaksanadan mencapai kebahagiaan (*eudaimonia*). Untuk menjadi bijaksana, menurut Aristoteles manusia harus mengembangkan diri secara utuh. Adapun cara menjadi manusia yang utuh, dijelaskan oleh Aristoteles bukan secara teoritis melainkan berangkat dari pengalaman praktis.⁸Sebuah pengalaman yang diperoleh ketika Aristoteles menjadi guru putra raja Philipus dari Macedonia yang bernama Alexander Agung (Iskandar Agung) selama tujuh tahun (342-335 SM). Sebagai seorang pendidik, Aristoteles mempunyai pengalaman dalam mengarahkan manusia (Alexander Agung) menuju keutuhannya sebagai manusia. Selain itu, Aristoteles juga pernah menjadi murid Plato (selama 20

⁵K. Bertens. 2011. *Etika*. h.4.

⁶K. Bertens. 2011. *Etika*. h. 26.

⁷Aristoteles. 1998. *The Nicomachean Ethics*. Translate by Ross, David. Revised by Ackrill J.L and J.O Urmson. Inggris: Oxford University Press.

⁸K. Bertens. *Sejarah Filsafat Yunani*. Yogyakarta: Kanisius. h. 155-160. Lihat juga Frans Magnis Suseno. 2009. *Menjadi Manusia Belajar dari Aristoteles*. Yogyakarta: Kanisius. h. x.

tahun) di Athena. Pada tahun 335 SM, ia kembali ke Athena untuk mendirikan sekolah yang bernama *Lykaion*, dan di Athena pula ia menulis buku *The Nicomachean Ethics* yang menjelaskan tentang etika atau filsafat moral.

Dalam perspektif filsafat, etika adalah salah satu cabang filsafat yang paling tua dan muncul sejak masa Yunani kuno.⁹ Hal ini karena terdapat perbedaan mendasar antara etika dengan cabang filsafat lainnya. Diantara cabang filsafat selain etika adalah filsafat alam, filsafat sejarah, filsafat kesenian, filsafat hukum, filsafat agama, filsafat ilmu dan lain-lain. Jika disejajarkan dengan cabang-cabang filsafat tersebut nampaknya etika juga mengkaji satu bidang tertentu (yakni moral). Akan tetapi etika tidak berhenti pada pertanyaan 'apa itu moral', melainkan juga mengarahkan penyelidikan tentang apa yang harus dilakukan oleh manusia. Semua cabang filsafat berbicara tentang 'yang ada', sedangkan etika berbicara tentang 'yang harus dilakukan'. Karena itulah etika disebut sebagai filsafat praktis yakni bersifat praktis karena berhubungan dengan perilaku manusia, tentang yang harus dan tidak boleh dilakukan.¹⁰

Dalam konteks ini etika tidak berarti filsafat praktis dalam arti menyediakan resep instan yang siap saji. Buku etika tidak berupa buku petunjuk yang bisa dikonsultasikan untuk mengatasi persoalan moral yang dihadapi, seperti mengatasi kesulitan teknis, karena ruang lingkup kajian etika bukanlah bersifat teknis, melainkan reflektif. Dapat juga dikatakan bahwa sebagai sebuah ilmu,

⁹K. Bertens. 2011. *Etika*. h. 27.

¹⁰K. Bertens. 2011. *Etika*. Yogyakarta: Kanisius. h. 29.

etika bukan termasuk ilmu empiris. Karena etika adalah cabang filsafat, maka refleksi kritis di dalamnya tidak membatasi diri pada gejala-gejala kongkrit. Namun bukan berarti bahwa filsafat tidak membicarakan hal-hal yang kongkrit, karena dalam hal-hal tertentu sangat kongkrit sekali. Akan tetapi penyelidikan filsafat tidak berhenti pada hal-hal yang kongkrit saja melainkan melampaui gejala kongkrit dan menanyakan sesuatu yang berada di balik yang kongkrit atau faktual tersebut.

Etika pada hakekatnya mengamati realitas moral secara kritis. Etika tidak memberikan ajaran moral, melainkan memeriksa kebiasaan-kebiasaan, nilai-nilai, norma-norma, dan pandangan moral secara kritis serta menuntut sebuah pertanggungjawaban.¹¹ Dengan kata lain, etika berusaha untuk menjernihkan permasalahan moral, sehingga yang menjadi sudut pandang khas bagi etika adalah segi normatifnya, dan sekaligus membedakan etika dengan ilmu-ilmu lain yang membahas tingkah laku manusia.

Berkaitan dengan persoalan korupsi, maka etika tidak berhenti pada persoalan kongkrit (persoalan yang secara faktual dilakukan) tetapi mengapa korupsi dilakukan, dipertanyakan juga mengapa tidak boleh dilakukan. Jadi lebih mengarahkan pengkajian pada aspek di belakang terjadinya perilaku korupsi. Dengan kata lain, etika menyoroti persoalan korupsi dari segi normatif dan evaluatif—setelah sebelumnya dibicarakan terlebih dahulu tentang definisi korupsi dengan segala bentuk dan ruang

¹¹Franz Magnis Suseso. 1987. *Etika Dasar Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral*. Yogyakarta: Kanisius. h.18.

lingkupnya. Dengan demikian relevansi etika dalam penyelesaian problem korupsi di Indonesia dapat diaktualisasikan.

Adapun etika yang dikembangkan oleh Aristoteles adalah sebuah peluang bagi manusia dalam mengembangkan dan menyempurnakan dirinya—dalam bahasa Socrates menjadikan dirinya sebagai manusia yang berkeutamaan. Sedangkan keutamaan adalah pengetahuan—yang oleh Aristoteles disebut intelektualisme etis.¹² Pengetahuan tersebut bukan semata-mata bersifat teoritis, melainkan pengetahuan yang baik dan telah mendarah daging dalam diri manusia serta bersifat eksistensial, sehingga melibatkan seluruh kepribadian manusia. Jika seseorang berpengetahuan baik, maka tidak bisa tidak, dia pasti akan mengaplikasikan pengetahuan itu dalam tindakan nyata serta memberikan pengajaran kepada sesama untuk mencapai kesempurnaan manusia sebagai manusia.

Selain itu dalam perspektif keilmuan, filsafat merupakan salah satu metode berpikir yang dapat digunakan untuk menemukan solusi terhadap berbagai persoalan yang salah satunya adalah persoalan korupsi di Indonesia. Meskipun bagi banyak orang, filsafat dianggap kabur, tidak berguna, dan membingungkan. Akan tetapi jika dicermati, makakrisis moral yang melanda masyarakat Indonesia—jika tidak dikatakan bermula dari—setidaknya berkorelasi erat dengan *krisis persepsi* yakni ketidakmampuan manusia menangkap substansi suatu persoalan. Wacana tentang isu-isu dalam perdebatan

¹²K. Bertens. 1999. *Sejarah Filsafat Yunani*. h. 100.

ilmiah hanya mengupas permukaan persoalan, bersifat superficial dan simplistik bahkan tidak jarang—malah *counter productive* karena tidak tergalinya muatan-muatan filosofis yang menjadi asumsi dasar isu-isu tersebut.¹³

Pada dasarnya korupsi adalah realitas yang bersifat plural, utuh, dan kaya serta saling terkait satu sama lain yang sangat sulit dipersepsi dan dideskripsikan. Kompleksitas persoalan di dalamnya berpotensi mengaburkan pemahaman terhadap realitas secara tepat hingga menimbulkan persoalan-persoalan yang lebih besar. Karena kekeliruan pemahaman atau bersifat reduksionis terhadap realitas juga akan berimplikasi kepada penanganan dan pemecahan masalah yang cenderung simplistik, dan pada gilirannya membawa kepada persoalan yang semakin kompleks (*complicated*), rumit, dan sulit dipahami.¹⁴ Dengan demikian metodologi filsafat dapat memberi kontribusi penting dengan menawarkan pandangan dunia yang holistik dan penuh makna kepada manusia dalam mempersepsi realitas. Karenanya, bukan hal yang kontroversial lagi jika dikatakan bahwa berbagai sistem kehidupan seperti ekonomi, politik, sosial dan keagamaan, tidak pernah bisa dilepaskan dari persoalan-persoalan filosofis yang menjadi fondasinya. Termasuk di dalamnya makna kesejatan

¹³ Haidar Bagir. 1999. "Kembali Berfilsafat: Kembali Menjadi Manusia". Dalam pengantar buku Oliver Leaman. *Pengantar Filsafat Islam Sebuah Pendekatan Tematis*. Diterjemahkan oleh Musa Kazhim dan Arif Mulyadi dari A Brief Introduction to Islamic Philosophy. Mizan: Bandung. h. xv.

¹⁴ Husein Heriyanto. 2003. *Paradigma Holistik Dialog Filsafat, Sains, dan Kehidupan menurut Shadra dan Whitehead*. Jakarta: Teraju. h.6.

manusia. Di sinilah penelitian ini menemukan momentum yang tepat—bagaimana cara membentuk sosok manusia yang memiliki sifat integral sehingga mampu menjadi pemimpin sebuah negara bahkan pemimpin di muka bumi—*khalifah Allah*.

B. Permasalahan Penelitian

Pada dasarnya filsafat tidak lahir dari ruang hampa—sebuah kontemplasi keterasingan seseorang yang terisolasi dari realitas—melainkan tumbuh dan berkembang dari pergulatan hidup dan persentuhan dengan realitas. Agar pemikiran filosofis dapat berkembang ke arah maknanya yang sejati, yaitu pencarian terus-menerus yang tiada henti akan kebenaran dan kebijaksanaan sebagai bagian dari upaya mentransformasikan potensi-potensi kemanusiaan manusia dalam kehidupan nyata. Maka filsafat menemukan kontekstualisasinya dalam proses dialogis dan refleksi kritis dengan problem-problem sosial di kehidupan masyarakat. Dengan begitu filsafat diharapkan dapat membantu manusia dalam menjalani kehidupan yang lebih berkualitas dan lebih bermakna, sesuai kemuliaan manusia sebagai manusia.

Untuk menggambarkan proses tersebut, maka persoalan yang perlu didialogkan dengan filsafat adalah korupsi dimana konstruksi sosial menjadi *built in* di dalamnya. Sebagaimana diketahui dari uraian di atas bahwa etika adalah usaha manusia dengan menggunakan akalnyanya untuk memecahkan masalah bagaimana ia harus

hidup manakala ia ingin menjadi baik.¹⁵ Meskipun pada sisi lain manusia diberikan petunjuk berupa wahyu, akan tetapi hal tersebut bukan berarti bahwa akal boleh tidak difungsikan. Akal adalah ciptaan Allah yang diberikan kepada manusia agar dipergunakan dalam semua dimensi kehidupan.

Akal berfungsi untuk menemukan pesan wahyu yang sebenarnya melalui interpretasi yang tepat, sebuah interpretasi terhadap perintah atau hukum yang termuat dalam wahyu. Dalam penelitian ini, yang dimaksud adalah hukum-hukum yang berkaitan dengan moral. Sehingga persoalan pokoknya bukan terletak pada wahyu melainkan pada manusia dalam menggunakan akalnya untuk menangkap maksudnya. Pendekatan yang digunakan dalam melihat persoalan moral inilah yang disebut etika, yakni sebuah cara pandang kritis untuk melihat realitas moral—yang dalam penelitian ini persoalan moral adalah korupsi. Dengan demikian permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah bagaimanakah korupsi dalam perspektif filsafat etika Aristoteles?

C. Pembatasan Masalah

Penelitian ini hanya mengkaji pemikiran Aristoteles mengenai etika. Secara historis, etika sebagai pemikiran filsafat lahir sebagai respon persoalan moral dalam kebudayaan Yunani kurang lebih 2500 tahun yang lalu, sekitar pertengahan abad ke-5 SM.¹⁶ Karena pandangan-

¹⁵Franz Magnis Suseno. 1987. *Etika Dasar*. h.17

¹⁶Pada saat itu kesadaran etis di Yunani mengalami krisis besar. Pola-pola moral yang tradisional tidak lagi memiliki dasar

pandangan lama tentang baik dan buruk tidak lagi dipercayai, maka para filosof mempertanyakan kembali norma-norma dasar bagi tingkah laku manusia. Nampaknya kondisi tersebut tidak jauh berbeda dengan yang terjadi pada jaman sekarang. Dalam pengambilan keputusan, baik dan buruk tidak lagi menjadi pertimbangan akibat manusia telah kehilangan orientasi nilai hidup yang merupakan kebutuhan manusia paling fundamental.

Etika (filsafat moral) adalah sebuah ilmu yang berkaitan dengan persoalan orientasi nilai hidup manusia. Melalui etika manusia akan diajarkan untuk mengetahui dan memahami di mana dia berada, dan ke arah mana harus bergerak untuk mencapai tujuan hidupnya. Etika juga merupakan sebuah sarana bagi manusia untuk dapat menemukan jawaban tentang pertanyaan mendasar yakni bagaimana seharusnya manusia hidup dan bagaimana seharusnya dia bertindak?¹⁷ Tujuannya agar manusia memiliki kemandirian sikap dan pemikiran sehingga tidak

untuk berpijak, akibatnya banyaknya perubahan sosial dan religius. Kaum Sofis tidak berhasil memberikan jawaban yang tepat untuk mengatasi krisis, tetapi sebaliknya justru memperuncing keadaan dengan subyektivisme dan relativisme mereka. Adalah Socrates dan Plato yang menunjukkan jalan keluar dari kemelut moral tersebut. Mereka tetap berpegang pada norma-norma yang berlaku dalam *polis* (kota negara) yang tradisional di Yunani. Satu hal yang baru dan berbeda adalah mereka mengusahakan suatu pendasaran rasional bagi norma-norma itu. Untuk pertama kali dalam sejarah mereka mempergunakan rasio untuk meletakkan fundamen bagi norma-norma etis dan dengan demikian mereka memulai etika filosofis. Franz Magnis Suseso. 1987. *Etika Dasar*. h. 15. Lihat juga K. Bertens. 2011. *Etika*. 37

¹⁷Franz Magnis Suseso. 1987. *Etika Dasar*. h.13.

hidup dengan hanya menjadi pengikut, melainkan memiliki kemampuan dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Antara etika dan ajaran moral terdapat perbedaan yang sangat mendasar. Agar tidak menimbulkan kerancuan makna antarakeduanya, maka pada pembahasan ini perlu dijelaskan pengertian etika dan ajaran moral. Ajaran moral adalah nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya.¹⁸ Ajaran moral adalah ajaran-ajaran, wejangan-wejangan, khotbah-khotbah, kumpulan peraturan dan ketetapan baik lisan maupun tertulis, tentang bagaimana manusia harus hidup dan bertindak agar ia menjadi manusia yang baik. Sumber ajaran moral adalah agama, ideologi, tradisi, adat-istiadat, dan lain-lain.¹⁹ Sedangkan etika bukan merupakan sumber tambahan bagi ajaran moral, melainkan filsafat atau pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran-ajaran dan pandangan-pandangan moral yang bersifat rasional.

Etika adalah sebuah ilmu bukan sebuah ajaran. Antara etika dan ajaran moral tidak berada pada level yang sama. Etika memberi penjelasan tentang alasan yang melatarbelakangi keharusan manusia mengikuti ajaran moral tertentu, dan bagaimana manusia dapat mengambil sikap yang bertanggung jawab berhadapan dengan berbagai ajaran moral.²⁰ Jadi yang memberikan pedoman bagaimana cara manusiamenjalani hidup bukan etika melainkan ajaran moral. Dapat juga dikatakan bahwa etika

¹⁸K. Bertens. 2011. *Etika*. Yogyakarta: Kanisius. h. 7.

¹⁹Franz Magnis Suseso. 1987. *Etika Dasar*. h.14.

²⁰Franz Magnis Suseso. 1987. *Etika Dasar*. h.14.

sekaligus kurang dan lebih dari ajaran moral. Kurang karena etika tidak berwenang untuk menetapkan apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Lebih, karena etika berusaha untuk mengerti mengapa, atau atas dasar apa manusia harus hidup menurut norma-norma tertentu.

D. Signifikansi Penelitian

Etika adalah refleksi kritis, metedis, dan sistematis tentang moralitas, sehingga yang dihasilkan secara langsung bukan kebaikan, melainkan suatu pengertian yang lebih mendasar dan kritis tentang persoalan terkait. Urgensi dari pengertian tersebut dicari karena manusia saat ini berada pada “*global Village*” atau “*global stadium*”,²¹ sehingga batas-batas antar wilayah menjadi sempit dan manusia tidak lagi bisa mengisolasi diri. Globalisasi merupakan konsekuensi logis bagi keberadaan manusia kontemporer yang dialami oleh setiap bangsa. Pesatnya kemajuan teknologi dan komunikasi membuat

²¹Dalam zaman *cyberspaces* seperti saat ini manusia tidak lagi bisa mengisolasi persoalan sosial-kemanusiaan menjadi persoalan sektoral belaka, seperti semata-mata persoalan ekonomi, politik, sains, maupun teknologi. Setiap aspek kehidupan saling berinteraksi, berkorelasi, dan saling berpengaruh dalam sebuah jaringan kehidupan. Perkembangan teknologi komunikasi dan komunikasi telah membuat dunia seperti *global village*, sehingga interkoneksi antar penduduk dunia menjadi sedemikian intensif. Teknologi media menurut McLuhan, teknologi media telah mentransformasikan masyarakat-masyarakat manusia di dunia menjadi sebuah satuan komunitas global tanpa dinding pembatas lama seperti ideologi politik, nasionalitas, dan agama, serta batas-batas geografis. Lihat Husein Heriyanto. 2003. *Paradigma Holistik*. h. 9.

individu tidak dapat menolak kenyataan bahwa sekarang ini ia hidup dalam sebuah dunia di mana relasi antar individu dan lembaga bisa memiliki jangkauan yang mengatasi batas-batas negara. Apa yang dilakukan seorang individu dapat mempengaruhi kehidupan bersama dalam masyarakat global baik positif maupun negatif.

Seperti kondisi sosio-kultural masyarakat Indonesia saat ini yang sudah mengalami banyak perubahan dalam segi-segi moralitas. Meskipun pada dasarnya situasi kemerosotan nilai-nilai moral telah menjadi semacam ciri khas kultur abad ke-20. Brooks dan Gobel mengindikasikan bahwa kejahatan dan prilaku yang tidak bertanggung jawab telah mengalami peningkatan pesat dan memasuki berbagai aspek kehidupan manusia bahkan telah menjadi reproduksi sosial. Masyarakat saat ini berada dalam ancaman tindak kekerasan, kejahatan di jalan, geng-geng jalanan, *truancy* (anak-anak yang kabur dari sekolah), kehamilan di kalangan anak muda, bisnis hitam (*business fraud*), korupsi para politisi, hilangnya rasa hormat pada orang lain, dan memusnahnya etika profesi.²²

Jika dilihat secara mendalam situasi etis sebagaimana diuraikan di atas, maka persoalan pokok terletak pada persoalan moral dimana pada jaman modern ini pluralisme menjadi suatu keniscayaan. Menurut K. Bertens,²³ terdapat tiga ciri utama antara lain: terdapat pluralisme moral di kalangan masyarakat yang berbeda maupun masyarakat yang sama; timbulnya persoalan etis

²²B.D. Brooks & Goble F.G. 1997. *The Case for Character Education: The Role of The School in Teaching Values and Virtue*. Northridge: Studio 4Productions. h.103.

²³K. Bertens. 2011. *Etika*. h. 34-37.

baru yang tidak terduga sebelumnya; kepedulian etis yang tampak di seluruh dunia dengan melewati batas-batas antar negara. Situasi moral dalam dunia modern itulah yang menyebabkan studi etika perlu dilakukan secara mendalam. Studi etika tersebut merupakan salah satu cara untuk mengatasi berbagai persoalan moral yang dihadapi oleh manusia jaman sekarang, dan menempuh cara hidup yang etis berarti bertanggung jawab terhadap perilaku seorang individu berdasarkan jalan rasional. Dengan demikian, signifikansi penelitian ini adalah:

1. Memiliki signifikansi akademis yakni kajian filsafat etika berdasarkan persoalan empiris. Hasil kajian ini memiliki signifikansi ilmiah terutama merespon persoalan korupsi di Indonesia dengan pendekatan filsafat etika.
2. Memiliki signifikansi praktis yakni memperkaya khazanah pemikiran Islam di tanah air serta dapat dijadikan pedoman bagi penentu kebijakan pembangunan yang berkelanjutan sekaligus melakukan perubahan sosial di Indonesia terutama yang berkaitan dengan persoalan korupsi.
3. Memiliki signifikansisosial terutama tawaran alternatif berupa solusi aplikatif untuk menghindarkan diri dari perilaku korupsi dengan memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada manusia Indonesia agar dapat menempuh jalan etis dan bertanggung jawab dalam kehidupannya.

E. Kajian Riset Sebelumnya

Secara umum penelitian tentang korupsi di Indonesia sudah banyak dilakukan dengan pendekatan hukum. Adapun penelitian tentang korupsi dalam perspektif filsafat antara lain:

1. *Filsafat Anti Korupsi* oleh Reza A.A Wattimena. Penelitian ini menggunakan perspektif Nietzsche tentang kehendak untuk berkuasa, De Sade tentang perburuan kenikmatan, dan Elis Canetti tentang sisi hewani manusia. Yang menjadi *core problem* di dalamnya adalah sisi terdalam diri manusia yang memiliki potensi untuk berbuat korupsi yakni sisi gelap manusia dan terwujud dalam tindakan tanpa bisa dikontrol. Adapun temuan dalam penelitian tersebut adalah cara mengatasi korupsi dengan jalan transendensi diri.²⁴
2. *Manusia-manusia Korup* tulisan Reza A.A Wattimena. Korupsi adalah ekspresi situasi manusiawi sebagai manusia, yang memiliki hasrat berkuasa, gemar berburu kenikmatan, memiliki sisi-sisi hewani yang brutal, sehingga korupsi seolah menjadi tindakan wajar yang tidak lagi dilihat sebagai kejahatan dan mengakar amat dalam di dalam kultur masyarakat terkait. Jadi bukan semata-mata persoalan ekonomi dan politik. Dengan memahami akar dari korupsi yang tertanam di dalam

²⁴Reza A.A Wattimena. 2012. *Filsafat Anti-Korupsi*. Yogyakarta: Kanisius.

diri masing-masing orang, maka dengan perspektif filsafat manusia belajar untuk menjinakkannya.²⁵

3. *Menjadi Manusia Belajar dari Aristoteles* ditulis oleh Frans Magnis Suseno. Dalam buku tersebut dijelaskan cara menjadi manusia utama menurut Aristoteles agar bisa mencapai kebahagiaan. Kebahagiaan yang dimaksud adalah dengan mengaktualisasikan diri untuk mencapai puncak eksistensi yakni melibatkan diri dalam komunitas masyarakat dan hidup dengan intelektualisme etis.²⁶

F. Kerangka Teori

Korupsi sebagai sebuah konsep mengalami pemaknaan yang beragam, baik yang bersifat etimologis maupun terminologis.²⁷ Korupsi sebagai sebuah penyimpangan, tidak hanya berlangsung pada ranah kekuasaan untuk mencari keuntungan materi, namun juga dalam bentuk penyimpangan kepercayaan (*betrayal of*

²⁵Reza A.A Wattimena. 2012. *Manusia-manusia Korup*. <http://www.thailandlaw.org>. Diakses 1 Pebruari 2014.

²⁶Frans Magnis Suseno. 2009. *Menjadi Manusia Belajar dari Aristoteles*. Yogyakarta: Kanisius.

²⁷Korupsi berasal dari kata "korup" yang berarti buruk, rusak, dan busuk. Arti lain dari "korup" adalah dapat disogok (melalui kekuasaan untuk kepentingan pribadi). Lihat Depdikbud. 1998. *KBBI*. Jakarta: Balai Pustaka h. 527. Korupsi berasal dari bahasa latin *corrumpere* dan *corruptio* yang berarti penyuaipan dan *corruptore* yang berarti merusak. Bakir Ihsan. 2006. "Pengertian Korupsi dan Prinsip-prinsip Antikorupsi". Dalam Karlina Helmanita dan Sukron Kamil (Ed). *Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi*. Jakarta: CSRC h. 27.

trust) yang ada pada setiap orang.²⁸ Adapun bentuk-bentuk korupsi merupakan manifestasi korupsi dapat dilihat dari cara pelaksanaannya yang meliputi penyuaipan (*blibery*), penggelapan (*embezzlement*), pemalsuan atau penggelembungan (*fraud*), pemerasan (*extortion*), nepotisme (*nepotism*).²⁹

Apapun makna dan bentuk korupsi, implisit di dalamnya adalah persoalan moral yang terdapat dalam diri manusia yang mengalami deviasi. Sehingga tidak semata-mata terkait dengan hukum atau ekonomi saja. Muatan moral ini menjadi semakin jelas ketika unsur kesengajaan dalam penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang tersebut ditonjolkan, sehingga unsur manusia sebagai pelaku yang berkesadaran menduduki posisi sentral.

Dalam perspektif filsafat, persoalan moral merupakan pembahasan dalam filsafat etika. Etika membicarakan persoalan nilai dengan obyek kajian kualitas kesusilaan seseorang sehingga atribut yang disandarkan kepadanya berupa kebajikan atau kejahatan yang berarti sifat-sifat yang menunjukkan bahwa orang yang memilikinya disebut sebagai orang yang baik atau jahat.³⁰ Selain itu juga, sebuah peluang bagi manusia dalam mengembangkan dan menyempurnakan dirinya, atau

²⁸Bakir Ihsan. 2006. "Pengertian Korupsi dan Prinsip-prinsip Antikorupsi". Dalam Karlina Helmanita dan Sukron Kamil (Ed). *Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi*. Jakarta: CSRC h. 42.

²⁹Irfan Abubakar. 2006. "Bentuk-bentuk Korupsi". Dalam Karlina Helmanita dan Sukron Kamil (Ed). *Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi*. Jakarta: CSRC h. 49.

³⁰Louis O. Kattsoff. 1992. *Pengantar Filsafat*. Terj oleh Soejono Soemargono dari "Elements of Philosophy" . Yogyakarta: Tiara Wacana. h. 349.

dalam bahasa Socrates menjadikan dirinya sebagai manusia yang berkeutamaan. Keutamaan adalah pengetahuan—yang oleh Aristoteles disebut intelektualisme etis.³¹ Pengetahuan yang dimaksudkan Socrates bukan merupakan pengetahuan yang semata-mata teoritis, melainkan pengetahuan yang telah mendarah daging dalam hati manusia, sehingga bersifat eksistensial. Jika seseorang yang berpengetahuan baik, maka tidak bisa tidak, dia pasti akan mengaplikasikan pengetahuan itu dalam tindakan nyata.

Dalam sejarah filsafat Yunani, tragedi kematian Socrates sebenarnya mengindikasikan simbol integritas moral.³² Dengan penuh kesadaran dan kebebasan dia meminum racun demi prinsip dan kebenaran yang diyakininya. Heroisme Sokrates menyiratkan kesetiaan pada kebenaran dan suara hati, karena perilaku melarikan diri dari penjara seperti yang diusulkan oleh Krito sebenarnya tidak bisa dibenarkan secara moral. Manusia sebagai subyek yang dianugerahi kebebasan dan kemampuan berpikir tidak dapat ditundukkan oleh kepentingan politis penguasa. Manusia mampu merelakan hidupnya demi sebuah nilai yang dianggapnya sebagai nilai tertinggi yaitu kebenaran.

Pertanyaan mendasar yang diajukan oleh Socrates adalah 'kenalilah dirimu sendiri': siapa manusia itu, makhluk kecil yang nampak tiada bermakna di tengah-tengah alam raya yang maha luas? Pengenalan yang dimaksudkan tentunya bukan sekedar nama melainkan

³¹K. Bertens. 1999. *Sejarah Filsafat Yunani*. h. 100.

³²K. Bertens. 1999. *Sejarah Filsafat Yunani*. h. 94-100.

dimensi terdalam dari diri manusia yaitu jiwanya yang di dalamnya tersimpan dimensi moralitas manusia. Pertanyaan tersebut menjadi padang perburuan baru bagi pemikiran filsafat yang datang kemudian termasuk Aristoteles. Meskipun demikian, ruang misteri akan tersisa manakala obyek kajian dalam filsafat diarahkan untuk mengkaji manusia. Hal ini karena manusia memiliki dimensi yang kompleks, sehingga manusia merupakan subyek yang bertanya sekaligus obyek yang ditanyakan.³³

Menurut Ibnu Miskawaih, manusia diciptakan atas dasar menerima watak, akan tetapi bisa berubah melalui pendidikan dan pengajaran yakni pendidikan akhlak. Pendidikan akhlak adalah usaha untuk mencapai pribadi susila yang lahir dari padanya perilaku-prilaku luhur atau budi pekerti mulia.³⁴ Sedangkan hakikat pendidikan adalah proses internalisasi budaya ke dalam diri seseorang dan masyarakat sehingga membuat orang dan masyarakat menjadi beradab. Pendidikan bukan merupakan sarana transfer ilmu pengetahuan saja, melainkan lebih dari itu merupakan sarana pembudayaan dan penyaluran nilai (enkulturasi dan sosialisasi).³⁵

Bagi suatu bangsa, nilai-nilai moral adalah keutamaan yang melekat pada setiap individu warga negara dan mengejawantah sebagai personalitas dan

³³ Adelbert Snijders. 2004. *Antropologi Filsafat Manusia Paradoks dan Seruan*. Yogyakarta: Kanisius. h. 18.

³⁴Ibnu Miskawaih. 1329 H. *Tahzib al-Akhlak*. Mesir: al-Mthba'ah al-Husainiyah. h.25.

³⁵Muhammad Rohmadi. 2010. *Makalah Seminar Nasional*. "Pembentukan Karakter Guru dan Dosen sebagai Upaya Mewujudkan Pendidikan Karakter di Indonesia". Bandung, 15 Nopember 2010.

identitas kolektif bangsa. Nilai-nilai moral berfungsi sebagai kekuatan mental dan etik yang mendorong suatu bangsa merealisasikan cita-cita kebangsaannya dan menampilkan keunggulan-keunggulan komparatif, kompetitif, dan dinamis di antara bangsa-bangsa lain. Membangun karakter adalah proses mengukir atau memahat jiwa sedemikian rupa, sehingga berbentuk unik, menarik, dan berbeda dibandingkan orang lain. Proses membangun karakter itu memerlukan disiplin tinggi karena tidak bisa dilakukan dengan mudah dan seketika atau instant. Diperlukan *refleksi* mendalam untuk membuat rentetan *moral choice* (keputusan moral) dan ditindaklanjuti dengan aksi nyata sehingga menjadi praksis, refleksi, dan praktik. Diperlukan sejumlah *waktu* untuk membuat semua itu menjadi *custom* (kebiasaan) dan membentuk watak atau tabiat seseorang. Kontekstualisasi, penelitian ini akan mengeksplorasi fenomena korupsi yang pada dasarnya adalah persoalan moral menggunakan alat analisis pemikiran etika Aristoteles.

G. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan filsafat (*philosophical approach*)³⁶ yakni pengkajian terhadap struktur ide-ide dasar serta pemikiran-pemikiran yang fundamental (*fundamental ideas*) yang dirumuskan oleh seorang pemikir. Salah satu

³⁶Metodologi penelitian filosofis dilakukan dengan cara menggunakan segala unsure metode umum yang berlaku bagi pemikiran filsafat. Anton Bekker dan Ahmad charis Zubair. *Metodologi Penelitian Filsafat*. Yogyakarta: Kanisius. 1990. h. 63-65.

ciri yang ditonjolkan oleh pendekatan filsafat adalah penelitian dan pengkajian terhadap struktur ide-ide dasar serta pemikiran-pemikiran yang fundamental (*fundamental ideas*) yang dirumuskan oleh seorang pemikir. Sedangkan salah satu karakteristik berpikir filsafat adalah menyeluruh atau holistik.³⁷ Holistik (berasal dari kata *whole* yang berarti keseluruhan) adalah cara pandang yang menyeluruh dalam mempersepsi realitas.³⁸

Selain itu filsafat juga bersifat mendasar dengan mulai mempertanyakan kebenaran segala sesuatu,³⁹ berpikir tentang hakekat atau metafisika adalah sebuah kemampuan berpikir secara abstrak untuk menemukan noumena dibalik fenomena—dan perlu dibedakan antara apa yang nampak (*appearance*) dengan hakekat yang sebenarnya/kenyataan (*reality*)—menemukan inti

³⁷Jujun S Suriasumantri. 1990. *Filsafat Ilmu, Sebuah Pengantar Populer*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. h. 11.

³⁸Berpandangan holistik artinya lebih memandang aspek keseluruhan dari pada bagian-bagian, bercorak sistemik, terintegrasi, kompleks, dinamis, non-mekanistik, non-linier. Karakter yang menyertai pandangan holistik adalah pandangan ekologis yakni suatu cara pandang yang menyeluruh dengan penekanan pada interrelasi, interkoneksi, dan interdependensi entitas-entitas dalam sebuah jaringan. Segala sesuatu di alam raya dipandang mengandung nilai-nilai intrinsik, bahwa alam kosmos merupakan jaringan yang saling terhubung serta merupakan sistem hidup yang berkemampuan *self-organization*. Kesadaran ekologis adalah kesadaran kesalinghubungan antara satu fenomena dengan fenomena yang lain. Morris Berman menyebut kesadaran holistik-ekologis ini sebagai *participating consciousness* (kesadaran ikut berpartisipasi dalam kesatuan kosmos). Husein Heriyanto. 2003. *Paradigma Holistik*. h.12.

³⁹Jujun S Suriasumantri. 1990. *Filsafat Ilmu*. h.11.

persolan yang menjadi hal pokok dan penting sehingga memberi makna terhadap kehidupan manusia.

Proses abstraksi ini sangat penting dan diperlukan untuk bisa mengetahui akar atau sesuatu yang tersembunyi dari segala persoalan kongkrit yang dihadapi. Dengan ditemukannya akar persoalan, maka akan membawa manusia kepada pemahaman terhadap segala sesuatu. Dan pemahaman tersebut dapat dijadikan dasar dipilihnya suatu tindakan yang berorientasi pada tindakan bijaksana (sebagaimana arti kata filsafat yakni mencintai kebijaksanaan—terus-menerus berusaha untuk menyatukan dirinya dengan pengetahuan yang luas dan mendalam).⁴⁰

Untuk memahami pemikiran Aristoteles tentang manusia sebagai pelaku korupsi, peneliti menggunakan metode hermeneutika yakni menerjemahkan dan menafsirkan pemikiran tersebut. Kata hermeneutika berasal dari bahasa Yunani *hermeneuo* (kata kerja) yang memiliki tiga arti yakni: mengungkapkan pikiran seseorang dengan kata-kata; menerjemahkan; dan juga bertindak sebagai penafsir.⁴¹

⁴⁰Endang Saefuddin Anshari. 1992. *Ilmu Filsafat dan Agama*. Surabaya: Bina Ilmu. h. 79. Lihat juga. Poedjawijatna. 1990. *Pembimbing ke Arah Alam Filsafat*. Jakarta: Rineka Cipta. h. 1.

⁴¹Dalam pengertian pertama dapat dipahami sebagai peralihan dari sesuatu yang relatif abstrak (pikiran-pikiran) ke dalam bentuk ungkapan-ungkapan yang jelas (dalam bentuk bahasa). Pemadatan pikiran dalam bahasa sudah merupakan penafsiran. Dalam pengertian kedua, “menerjemahkan” terdapat pengertian usaha mengalihkan diri dari bahasa asing yang maknanya samar ke dalam bahasa kita sendiri yang maknanya jelas. Dalam pengertian yang ketiga, pada waktu seseorang sedang menafsirkan sesuatu, ia melawati suatu ungkapan pikiran yang

Karena yang menjadi obyek kajian adalah pemahaman tentang makna dan pesan yang terkandung dalam sebuah teks, yang variabelnya meliputi pengarang, proses penulisan, dan karya tulis, maka metode hermeneutika menjadi sangat penting peranannya⁴². Suatu teks perlu dipahami dalam cakrawala masa lampau, dan mas depan demi manfaatnya untuk masa kini.⁴³ Meskipun identifikasi total dengan pengarang (Aristoteles) adalah mustahil karena menafsirkan teks dari masa silam (*The Nicomachean Ethic*), terdapat jarak waktu yang membentang antara zaman teks itu ditulis dengan zaman pembaca sekarang. Latar belakang sejarah dan budaya penulis juga berbeda. Namun semua itu memiliki keterkaitan yang tidak bisa dipisahkan untuk bisa memahami makna yang terkandung dalam tulisan pemikir tersebut.

kurang jelas menuju yang lebih jelas; bentuk pemikiran yang kurang jelas diubah menjadi bentuk pemikiran yang lebih jelas; itulah menafsirkan. F. Budi Hardiman. 2003. *Melampaui Positivisme dan Modernitas Diskursus Filosofis tentang Metode Ilmiah dan Problem Modernitas*. Yogyakarta: Kanisius. h. 37.

⁴² Komaruddin Hidayat. 1996. *Memahami Bahasa Agama Sebuah Kajian Hermeneutik*. Jakarta: Paramadina. h. 13.

⁴³Jika benturan antara cakrawala pandang pembaca dengan cakrawala penulis dihadapi secara produktif, kreatif, dan terbuka, justru akan memberi pengetahuan yang mengejutkan. Dengan demikian, jarak dan waktu yang terbentang antara penulis dan pembaca tidak menghambat atau mempermiskin pemahaman, justru akan memperkaya pengetahuan kita, asalkan tugas menafsirkan teks bukan dihadapi sebagai tugas reproduktif, melainkan tugas produktif. F. Budi Hardiman. 2003. *Melampaui Positivisme*. h. 49.

Adapun instrumen dan langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:

1. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan tiga sumber data yaitu *pertama: sumber primer*, atau data pokok yakni literatur yang ditulis oleh Aristoteles tentang etika. *Kedua: sumber sekunder*, yaitu literatur lain yang terkait dengan tema penelitian. *Ketiga: sumber pendukung*, yaitu karya-karya lain yang relevan dengan penelitian ini. Baik sumber sekunder maupun pendukung digunakan untuk menggali data sebagai pelengkap data primer.

2. Pengumpulan Data

Peneliti mengumpulkan data-data yang tersebar berupa karya-karya dan tulisan-tulisan yang relevan dengan kebutuhan penelitian. Peneliti memprioritaskan data-data primer sebagai kebutuhan pokok, setelah itu data pendukung baik yang bersumber dari data sekunder ataupun data pelengkap.

3. Pengolahan Data

Data yang diperoleh melalui sumber primer, sekunder maupun pendukung sebagaimana yang disebutkan di atas diolah secara kritis dan mendalam untuk dapat mengetahui konsep Aristoteles dalam mengatasi korupsi.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu menganalisis pokok permasalahan dengan interpretasi yang tepat sehingga diperoleh deskripsi yang obyektif dan sistematis. Teknik analisis data dilakukan secara induktif dengan model interaktif yang meliputi empat tahap yaitu pengumpulan data, reduksi data,

penyajian data, dan verifikasi atau penarikan kesimpulan. Proses analisisnya dilakukan dengan memilah-milah data sesuai dengan substansi temuan sekaligus mereduksi data yang tidak relevan dengan permasalahan. Kemudian diformulasikan dengan cara mencari hubungan asosionalnya kemudian data tersebut dimaknai (*interpretasi*) menggunakan pendekatan filsafat (*philosophical approach*).⁴⁴

Adapun langkah metodis yang dipergunakan adalah:

- a. Interpretasi yang bertumpu pada *evidensi objektif*, untuk mencapai kebenaran otentik,⁴⁵ agar tercapai pemahaman yang benar mengenai ekspresi manusia yang dipelajari.
- b. Koherensi intern yakni untuk memahami hakekat manusia dengan melihat semua unsur-unsur struktural dalam satu *struktur yang konsisten*, sehingga benar-benar merupakan *internal structures* atau *internal*

⁴⁴Metodologi penelitian filosofis dilakukan dengan cara menggunakan segala unsur metode umum yang berlaku bagi pemikiran filsafat. Tujuan filsafat adalah mengumpulkan pengetahuan manusia sebanyak mungkin, mengajukan kritik dan menilai pengetahuan tersebut, menemukan hakekatnya, dan mengatur semua itu dalam bentuk yang sistematis. Dengan demikian berpikir spekulatif dan reflektif tersebut tidak berarti bahwa jawaban atas permasalahan yang diamati telah dipecahkan secara tuntas, tetapi untuk melihat permasalahan tersebut lebih jelas dan mudah ditelaah, mengungkap fakta atau realitas secara lebih komprehensif sehingga akar permasalahan lebih jelas terlihat. Anton Bekker dan Ahmad Charis Zubair. 1990. *Metodologi Penelitian Filsafat*. Yogyakarta: Kanisius. h. 63-65.

⁴⁵Anton Bakker dan A. Charis Zubair. 1990. *Metodologi*. h.42-43.

relations. Sehingga hakekat universal baru menjadi jelas dalam unsur-unsur struktural tersebut.⁴⁶

- c. Holistika yaitu untuk mencapai kebenaran yang utuh atau menyeluruh yang juga bisa disebut *totalisasi*, dimana manusia dalam hakikatnya tidak bisa diisolasi dengan konteks universal lingkungan hidup dan sejarahnya.⁴⁷
- d. Heuristika yang berarti menemukan jalan baru secara ilmiah untuk memecahkan masalah. Filsafat tidak dapat menemukan penerapan praktis yang baru, tetapi filsafat selalu mencari visi atau pemahaman baru, sebab setiap teori selalu hanya menerangkan pengalaman dan observasi untuk sementara saja. Kenyataan selalu lebih kaya dan lebih misterius daripada setiap teori.⁴⁸

Selanjutnya dalam penarikan kesimpulan, dikembalikan lagi pada pengumpulan data apabila masih memerlukan data tambahan. Proses analisis seperti ini disebut analisis interaktif dialogis.

8. Teknik Pengecekan Validitas Data

Untuk menguji validitas data maka digunakan triangulasi baik metode, sumber data, teori, dan peneliti.⁴⁹ Tujuannya untuk mengecek kebenaran data dengan membandingkan dengan data dari sumber lain.

⁴⁶Anton Bakker dan A. Charis Zubair. 1990. *Metodologi*. h.45-46.

⁴⁷Anton Bakker dan A. Charis Zubair. 1990. *Metodologi*. h.46-47.

⁴⁸Anton Bakker dan A. Charis Zubair. 1990. *Metodologi*. h.51-52.

⁴⁹ Sudarwan Danim. 2002. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: Pustaka setia. h. 196—197.

H. Sistematika Pembahasan

Hasil penelitian akan peneliti sajikan dalam bentuk uraian sebagai berikut:

Bab pertama berisi pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, masalah penelitian, pembatasan masalah, signifikansi penelitian, kajian riset sebelumnya, kerangka teori, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah filsafat etika. Uraian pertama akan mengkaji ontologi, epistemologi, dan aksiologi etika. Titik temu antara etika, moral, susila, dan akhlak. Pendekatan dalam memahami etika, dan hakekat etika filosofis. Etika diantara agama dan modernitas.

Bab tiga akan dijelaskan tentang Filsafat Etika Aristoteles. Di dalamnya dijelaskan riwayat hidup, pendidikan, dan karya-karyanya. Pemikiran filsafat Aristoteles meliputi logika, metafisika, etika, negara. Secara khusus akan dikaji ruang lingkup Filsafat etika Aristoteles dan tujuannya.

Bab empat adalah korupsi dalam tinjauan. Dalam bab ini akan diuraikan tentang pengertian korupsi secara etimologis dan terminologis, prinsip-prinsip korupsi, bentuk-bentuk korupsi, latar belakang timbulnya korupsi.

Bab lima adalah Perjumpaan antara etika dan korupsi. Konsep etika Aristoteles dalam mencari akar penyebab korupsi dan tawaran solusinya. Selain itu juga dijelaskan kelebihan dan kekurangan pemikiran Etika Aristoteles.

Bab enam adalah bab terakhir atau penutup yang berisi kesimpulan dan rekomendasi.

BAB II

MENJERNIHKAN MAKNA ETIKA

A. Pengertian Konseptual

1. Etika

Persoalan etika pada dasarnya bermula sejak munculnya kehidupan manusia itu sendiri. Pada saat peradaban manusia paling awal, persoalan baik dan buruk sudah mulai muncul, meskipun dalam bentuk sederhana dan belum begitu kompleks. Penjelasan yang diberikan dalam persoalan etika juga dalam batas-batas tertentu bersifat sederhana, masih berupa pengalaman hidup yang belum tersusun secara sistematis dan belum dapat dijadikan ukuran dan pedoman dalam kehidupan. Oleh karenanya, pemaknaan etika mengalami perkembangan seiring perkembangan peradaban manusia.

Secara etimologi etika berasal dari bahasa Yunani *ethos* (bentuk tunggal) yang berarti: tempat tinggal yang biasa; padang rumput; kandang habitat; kebiasaan, adat; akhlak, watak; perasaan, sikap, cara berpikir, cara bertindak. Dalam bentuk jamak (*ta etha*) berarti adat kebiasaan.¹ Implisit dalam pengertian tersebut mengindikasikan bahwa sesuatu yang dianggap baik apabila terdapat kesesuaian dengan adat kebiasaan yang terdapat di sebuah masyarakat.

¹ K. Bertens. 2011. *Etika*. h. 4. Lihat juga Achmad Charris Zubair. 1980. *Kuliah Etika*. Jakarta: Rajawali Pers. h. 13. Lihat juga Mudlor Ahmad. tt. *Etika dalam Islam*. Surabaya: Al-Ikhlâs. h. 15. Lihat juga *Pintu Masuk ke Dunia Filsafat*. Yogyakarta: Kanisius. h. 23.

Pada perkembangan selanjutnya, etika membahas tentang masalah perbuatan atau tingkah laku manusia, tentang persoalan penilaian baik dan buruk. Sebagaimana disampaikan oleh Abuddin Nata bahwa etika berhubungan dengan upaya untuk menentukan tingkah laku manusia.² Sedangkan K.Bertens merumuskan etika sebagai ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. Atau dalam istilah modern, etika membahas tentang konvensi-konvensi sosial yang ditemukan dalam sebuah masyarakat.³

Dalam kosa kata bahasa Indonesia, sebagaimana disebutkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika (kata benda) adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak).⁴ Akan tetapi, etika juga mengandung pengertian yang berbeda-beda sebagaimana hasil penelusuran yang dilakukan oleh K. Bertens dalam beberapa Kamus.⁵ Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia tahun 1953, hanya dikenal satu pengertian etika yaitu ilmu pengetahuan tentang asas-asas akhlak (moral). Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 1988, etika memiliki tiga arti: 1). Ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak); 2). Kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak; 3). Nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa

² Abuddin Nata. 2002. *Akhlak Tasawuf*. Jakarta: Rajawali Pers. h. 88.

³ K. Bertens. 2011. *Etika*. h. 4.

⁴<http://kbbi.web.id/etika>. Diakses 22 april 2014.

⁵ K. Bertens. 2011. *Etika*. h.5.

Indonesia tahun 1991, terdapat dua entri yang berbeda yakni etik dan etika. Pengertian etik terangkum dalam pengertian ke-2 dan ke-3 sebagaimana penjelasan di atas, sedangkan etika lebih dikhususkan pada semua ilmu yang mempelajari tentang etik.

Dari beberapa pengertian di atas, etika mengandung tiga macam arti.⁶ *Pertama*: nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah laku. Pengertian ini bisa dipahami sebagai sistem nilai yang berfungsi dalam kehidupan manusia baik secara individual maupun sosial, seperti etika Protestan, etika suku-suku Indian, etika Jawa, dan lain-lain. Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa etika belum menjadi sebuah ilmu melainkan sebuah sistem nilai yang dianut oleh masyarakat. *Kedua*: kumpulan asas atau nilai moral. Pengertian ini mengacu pada kode etik, misalnya kode etik jurnalistik, kode etik seorang dokter, dan lain-lain. Sedangkan pengertian *ketiga*: ilmu tentang yang baik atau buruk.

Etika baru dapat dipandang sebagai sebuah ilmu apabila kemungkinan-kemungkinan etis (asas-asas dan nilai-nilai tentang baik dan buruk) yang terdapat dalam suatu masyarakat—biasanya tanpa disadari namun diterima begitu saja—menjadibah an refleksi untuk kemudian dilakukan penelitian secara sistematis dan metodis. Dalam perspektif sebagai ilmu, etika dapat digunakan untuk menyusun kode etik. Dalam artian inilah, etika dapat disebut sebagai filsafat moral yang objek

⁶ K. Bertens. 2011. *Etika*. h.6-7.

kajiannya adalah pemikiran tentang moralitas, problem moral, dan pertimbangan moral.⁷ Pengertian ini sejalan dengan penjelasan Franz Magnis-Suseno yang mengartikan etika sebagai filsafat tentang bidang moral. Dalam arti luas, etika adalah keseluruhan norma dan penilaian yang digunakan oleh suatu masyarakat untuk mengetahui bagaimana seharusnya mereka menjalankan kehidupan; tentang di mana mereka menemukan jawaban atas pertanyaan terkait bagaimana mereka menempatkan diri, bagaimana mereka bersikap, dan tindakan apa yang harus diambil agar kehidupannya dapat mencapai kesuksesan.⁸

Dalam perspektif filsafat manusia, manusia adalah makhluk yang tahu dan memiliki kemauan. Kemauan tersebut mengandaikan pengetahuan, dan inilah yang disebut orientasi. Tanpa orientasi, manusia tidak akan bisa mengetahui arah. Karenanya, etika merupakan sarana orientasi bagi usaha manusia untuk dapat menjawab sebuah pertanyaan fundamental: bagaimana saya harus hidup dan bertindak.⁹ Manusia harus tahu di mana dia berada dan ke arah mana harus melangkah menuju tujuan yang diharapkan. Dengan mengetahui orientasi, maka akan dapat membantu manusia menuju tujuan hidupnya.

⁷ Achmad Charris Zubair. 1980. *Kuliah Etika*. Jakarta: Rajawali Pers. h. 16.

⁸ Franz Magnis-Suseno. 1993. *Etika Jawa Sebuah Falsafi tentang Kebijaksanaan Hidup Jawa*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. h. 6.

⁹ Franz Magnis-Suseno. 1987. *Etika Dasar Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral*. Yogyakarta: Kanisius. h.13.

Dengan bahasa berbeda menurut Harry Hamersma,¹⁰ etika adalah cabang filsafat yang berbicara tentang tindakan manusia—bukan mempersoalkan keadaan manusia, melainkan bagaimana keharusan manusia dalam bertindak. Tindakan manusia pada dasarnya ditentukan oleh bermacam-macam norma, antara lain: norma kesopanan, norma hukum, dan norma moral. Sedangkan norma paling penting yang berkaitan dengan tindakan manusia adalah norma moral yang bersumber dari suara batin. Norma-norma tersebut termasuk dalam bidang etika.

Etika menyelidiki dasar semua norma moral. Etika juga dapat membantu manusia dalam mengambil sikap terhadap semua norma dari luar dan dari dalam, supaya manusia mencapai kesadaran moral yang otonom, sehingga pola kehidupannya tidak semata-mata mengikuti trend yang berkembang di masyarakat, melainkan mengerti secara sadar alasan setiap tindakan yang dilakukannya dalam kehidupan dan membantu manusia mempertanggungjawabkan setiap langkah yang dijalankannya. Dengan demikian, persoalan etika adalah persoalan yang berhubungan dengan eksistensi manusia dalam segala aspeknya.¹¹ Manusia tidak hanya dipandang sebagai individu melainkan juga sebagai masyarakat dalam hubungannya dengan Tuhan, sesama manusia dan dirinya sendiri, maupun dengan alam sekitar. Karenanya, etika tidak berdiri sendiri melainkan berhubungan dengan

¹⁰ Harry Hamersma. 1981. *Pintu Masuk ke Dunia Filsafat*. Yogyakarta: Kanisius. h. 23.

¹¹ Musa Asy'ari.1999. *Filsafat Islam Sunnah Nabi dalam Berpikir*. Yogyakarta: Lesfi. h. 83.

seluruh ilmu tentang manusia seperti antropologi, psikologi, sosiologi, ekonomi dan hukum. Hanya saja terdapat perbedaan pada *point of view* (sudut pandang) yaitu baik-buruk, karena etika adalah teori tentang perbuatan manusia ditinjau berdasarkan baik-buruknya.¹²

Meskipun latar belakang dari sebuah perbuatan bersifat individual dan tersembunyi serta tidak diketahui oleh orang lain, namun penilaian baik buruknya (ukuran etikanya) selalu disandarkan lebih dulu pada amal perbuatan yang real, sejauh yang bisa diketahui oleh orang lain. Hal ini sejalan dengan definisi dari Hasbullah Bakri bahwa etika adalah ilmu yang menyelidiki mana yang baik dan mana yang buruk pada amal perbuatan manusia sejauh yang dapat diketahui oleh akal pikiran.¹³

Sedangkan menurut Ahmad Amin, etika adalah ilmu yang menjelaskan arti baik dan buruk, menjelaskan tentang apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia, menyatakan tujuan yang harus dituju oleh manusia di dalam perbuatannya, dan menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang seharusnya dilakukan.¹⁴ Dalam bahasa berbeda diungkapkan oleh Ki Hajar Dewantara sebagaimana dikutip oleh Abuddin Nata bahwa etika adalah ilmu yang mempelajari tentang kebaikan (dan keburukan) di dalam hidup manusia, khususnya tentang gerak-gerik pikiran dan

¹² Mudlor Ahmad. tt. *Etika dalam Islam*. Surabaya: Al-Ikhlash. h.15.

¹³ Hasbullah Bakri. 1986. *Sistematika Filsafat*. Jakarta: Wijaya. h. 71.

¹⁴ Ahmad Amin. 1983. *Etika (Ilmu Akhlak)*. Terj. oleh KH. Farid Ma'ruf dari *al-akhlak*. Jakarta: Bulan Bintang. h. 3.

rasa yang merupakan pertimbangan dan perasaan dalam mencapai tujuan dari perbuatan yang dilakukan.¹⁵

Dari penjelasan di atas, dapat diklasifikasikan makna dan ruang lingkup etika meliputi beberapa hal, antara lain: 1). Secara ontologis, etika adalah sebuah ilmu atau refleksi kritis tentang perbuatan yang dilakukan oleh manusia (meliputi perbuatan baik dan buruk) sebagai obyek materia; 2). Epistemologietika adalah pemikiran yang bersifat rasional, dengan melibatkan ilmu-ilmu lain yang juga menyelidiki perbuatan manusia seperti antropologi, sosiologi, psikologi, dan lain-lain; 3). Axiologi etika adalah untuk membantu manusia menemukan orientasi serta menjernihkan persoalan moral dalam kehidupannya. Hal ini bertujuan agar manusia memiliki kemandirian sikap dan pemikiran sehingga tidak hidup dengan hanya mengikuti trend yang berkembang di masyarakat, melainkan memiliki kemampuan dalam memilih tindakannya secara bebas dan bertanggungjawab.

Deskripsi di atas mengindikasikan bahwa etika adalah sebuah ilmu pengetahuan yang rasional atau berdasarkan pemikiran manusia sehingga bercorak humanis dan antroposentris. Dalam konteks inipemikiran para filosof tentang perbuatan manusia dapat dikategorisasikan ke dalam etika atau filsafat moral, dan sebagai sebuah pemikiran filsafat maka sifat kebenarannya adalah relatif. Etika sebagai sebuah pemikiran filsafat yang bercorak rasional, tidak memberikan pedoman terperinci atau ketentuan yang tegas serta tetap mengenai hidup

¹⁵ Abuddin Nata. 2002. *Akhlak Tasawuf*. Jakarta: Rajawali Pers. h. 88.

secara bijak. Etika juga tidak menghasilkan kebaikan secara langsung melainkan suatu pengertian mendasar dan kritis tentanghidup secara bijak.

Sebagai sebuah ilmu, etika bukan ajaran moral. Etika berpretensi untuk mengetahui dan memahami mengapa manusia harus mengikuti ajaran moral tertentu, atau bagaimana manusia dapat mengambil sikap yang bertanggung jawab berhadapan dengan berbagai ajaran moral. Dengan demikian yang mengatakan bagaimana manusia harus hidup adalah ajaran moral, bukan etika.

Menurut Franz Magnis-Suseno, ajaran moral adalah ajaran, wejangan, khotbah, kumpulan peraturan dan ketetapan baik lisan maupun tertulis, tentang manusia seharusnya hidup dan bertindak agar menjadi manusia yang baik. Sumber langsung ajaran moral adalah agama, ideologi, tradisi, adat-istiadat, dan lain-lain.¹⁶ Etika bukan sumber tambahan bagi ajaran moral, melainkan filsafat atau pemikiran rasional, kritis dan mendasar tentang ajaran-ajaran dan pandangan-pandangan moral.

2. Moral

Secara etimologi, moral berasal dari bahasa Latin *mores* yang berarti adat kebiasaan.¹⁷ Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, moral diartikan penentuan baik buruk terhadap perbuatan dan kelakuan.¹⁸ Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, moral memiliki tiga arti:¹⁹

- 1). Ajaran tentang baik buruk yang diterima secara umum

¹⁶ Franz Magnis Suseso. 1987. *Etika Dasar*. h.14.

¹⁷ Abuddin Nata. 2002. *Akhlak Tasawuf*. h. 90.

¹⁸ WJS. Poerwadarminta. 1991. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. h. 278.

¹⁹<http://kbbi.web.id/moral>. Diakses 22 april 2014.

mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, dan sebagainya; akhlak; budi pekerti; susila; 2). Kondisi mental yang membuat orang tetap berani, bersemangat, bergairah, berdisiplin, dan sebagainya; isi hati atau keadaan perasaan sebagaimana terungkap dalam perbuatan; 3). Ajaran kesusilaan yang dapat ditarik dari suatu cerita.

Berdasarkan definisi tersebut, maka moral pada dasarnya adalah sebuah ajaran yang merupakan hasil produk dari budaya dan agama. Setiap kebudayaan dalam masyarakat memiliki standar moral yang berbeda-beda sesuai dengan sistem nilai yang berlaku dan telah mengakar di masyarakat. Norma-norma moral adalah tolok ukur untuk menentukan betul-salahnya sikap dan tindakan manusia dilihat dari segi baik-buruknya sebagai manusia dan bukan sebagai pelaku peran tertentu yang terbatas (misalnya yang terkait profesi seseorang di masyarakat). Jadi tolok ukur tersebut dipakai oleh masyarakat untuk mengukur kebaikan seseorang sebagai manusia. Sebagaimana dijelaskan oleh Franz Magnis-Suseno²⁰ bahwa kata moral selalu mengacu kepada baik-buruknya manusia sebagai manusia.

Adapun moralitas (dari bahasa Latin *moralis*), menurut K. Bertens mempunyai arti yang hampir sama dengan moral, akan tetapi pengertiannya lebih abstrak. Karena moralitas adalah sifat moral atau keseluruhan asas dan nilai yang berkaitan dengan baik dan buruk.²¹ Menurut Abuddin Nata, moral dalam arti istilah, digunakan untuk menentukan batas-batas dari sifat, perangai, kehendak,

²⁰ Franz Magnis-Suseno. 1987. *Etika Dasar*. h. 19.

²¹ K. Bertens. 2011. *Etika*. h. 7.

pendapat, atau perbuatan yang secara layak dapat dikatakan benar, salah, baik dan buruk.²²

Moralitas merupakan fenomena manusiawi yang bersifat universal, sebuah dimensi nyata dalam kehidupan—baik individual maupun sosial—sebagai sesuatu yang khas manusiawi dan tidak terdapat pada makhluk lain. Moralitas merupakan ciri khas manusia, karena hanya manusia yang memiliki kesadaran tentang baik dan buruk, tentang yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan, tentang yang harus dilakukan dan tidak pantas dilakukan.²³ Kesadaran moral merupakan suara batin yang berasal dari dalam diri manusia.²⁴ Kesadaran moral adalah suatu kewajiban yang didasarkan pada kenyataan bahwa manusia mengatur tingkah lakunya menurut kaidah-kaidah atau norma-norma. Norma-norma adalah hukum, tapi manusia sendiri harus menaklukkan dirinya pada norma-norma itu. Manusia harus menerima dan menjalankannya.²⁵

²² Abuddin Nata. 2002. *Akhlaq Tasawuf*. h. 90-91.

²³ K. Bertens. 2011. *Etika*. h. 15.

²⁴ Harry Hamersma. 1981. *Pintu Masuk*. h. 23.

²⁵ Terdapat perbedaan antara keharusan alamiah dengan keharusan moral. Terdapat beberapa kata yang memiliki makna sama dalam bahasa Inggris yang berkaitan dengan kata “harus”, misalnya *must*, *should*, *ought to*. Dapat dibedakan di sini bahwa *must* berarti keharusan alamiah, sedangkan *should* dan *ought to* dipakai dalam arti keharusan moral. Dalam bahasa Jerman terdapat kata *müssen* yang menunjukkan keharusan alamiah, sedangkan kata *sollen* digunakan dalam arti keharusan moral. K. Bertens. 2011. *Etika*. h. 16.

Kesadaran moral juga behubungan erat dengan hati nurani (*fu'ad*) yang mencakup tiga hal:²⁶ 1). Suatu perasaan akan keharusan atau kewajiban dalam melakukan tindakan yang bermoral. Perasaan tersebut telah ada dalam hati nurani setiap manusia. Hal ini mengindikasikan bahwa perasaan akan keharusan atau kewajiban tersebut jika tidak dilaksanakan maka telah terjadi pelanggaran moral. Perasaan wajib tersebut menunjukkan adanya suara batin yang harus selalu ditaati. Implisit di dalamnya terdapat kesadaran akan kewajiban mutlak yang harus dilaksanakan dan tidak ada kekuatan apapun yang bisa menghalangi pelaksanaannya; 2). Kesadaran moral muncul dalam bentuk kebebasan. Artinya seseorang bebas untuk mentaatinya dan bebas dalam menentukan perilakunya. Di dalam penentuan itulah terefleksi nilai kemanusiaan manusia itu sendiri; 3). Kesadaran moral dapat berwujud rasional dan obyektif, yaitu suatu perbuatan yang secara umum dapat diterima oleh masyarakat secara obyektif dan universal.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka moral lebih mengacu pada suatu nilai atau sistem hidup berlaku di masyarakat, dan mereka berkeyakinan apabila dilaksanakan, dapat mengantarkan mereka pada kebahagiaan dan ketentraman hidup. Sedangkan etika sebagai sebuah ilmu tentang moralitas membahas tentang manusia sejauh berkaitan dengan moralitas. Dengan kata lain, etika merupakan ilmu yang menyelidiki tingkah laku moral, yakni sebuah refleksi kritis, metodis, dan sistematis

²⁶ Abuddin Nata. 2002. *Akhlaq Tasawuf*. h. 91-92.

tentang tingkah laku manusia, sejauh berkaitan dengan norma atau dari sudut pandang baik dan buruk.²⁷

Sedangkan perbedaan antara etika dan moral terletak pada ukuran penilaian yang digunakan. Ukuran penilaian etika adalah akal pikiran atau rasio, sedangkan ukuran moral adalah norma-norma agama, tradisi, adat-istiadat di masyarakat, dan lain-lain. Dengan demikian, etika dapat dikatakan kurang dan lebih dari ajaran moral.²⁸ *Kurang* karena etika tidak berwenang untuk menetapkan apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak, karena kewewenangan itu berasal dari berbagai pihak yang memberikan ajaran moral. *Lebih*, karena etika berusaha memahami argumentasi mengapa manusia harus hidup berdasarkan norma-norma moral tertentu.

3. Akhlak

Akhlak berasal dari bahasa Arab *akhlaqa-yukhliq-ikhlaqan* yang berarti *al-sajiyah* (perangai), *ath-thabi'ah* (kelakuan, tabiat, watak dasar), *al-'adat* (kebiasaan, kelaziman), *al-maru'ah* (peradaban yang baik), dan *al-din* (agama).²⁹ Namun secara linguistik ada yang mengatakan bahwa *akhlaq* tidak memiliki akar kata, melainkan kata tersebut memang sudah demikian adanya. Kata *akhlaq* adalah jamak dari kata *khilqun* atau *khuluqun* yang artinya sama dengan arti akhlak sebagaimana tersebut di atas. Baik kata *akhlaq* atau *khuluq* keduanya terdapat dalam al-Qur'an³⁰ (berarti budi pekerti dan adat kebiasaan) dan

²⁷K. Bertens. 2011. *Etika*. h. 26.

²⁸Franz Magnis-Suseno. 1987. *Etika Dasar*. h. 14.

²⁹Abuddin Nata. 2002. *Akhlak Tasawuf*. Jakarta: Rajawali Pers. h.1.

³⁰ QS. Al-Qalam, 68:4 dan QS. Al-Syu'ara, 26: 137.

hadits³¹ (berarti budi pekerti). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, akhlak (kata benda) diartikan budi pekerti; kelakuan.³² Dengan demikian kata *akhlaq* dan *khuluq* secara kebahasaan berarti budi pekerti, adat kebiasaan, perangai, muru'ah atau segala sesuatu yang sudah menjadi tabi'at.

Dari segi istilah, menurut Ibnu Miskawaih akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang mendorongnya untuk melakukan perbuatan tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan secara mendalam.³³ Sedangkan menurut al-Ghazali,³⁴ kata *al-khalq* (fisik) dan *al-khulq* (akhlak) adalah dua kata yang sering dipakai bersamaan. *Al-khalqu* artinya ciptaan, makhluk dan *al-khuluqu* berarti budi pekerti. Dalam arti, *al-khalqu* adalah bentuk lahiriah dan *al-khuluqu* adalah bentuk bathiniah.

Kata *al-khuluq* merupakan suatu sifat yang terpatrit dalam jiwa, yang darinya terlahir perbuatan-perbuatan dengan mudah tanpa memerlukan pemikiran dan penelitian.³⁵ Jika dari sifat tersebut lahir perbuatan-perbuatan baik dan terpuji menurut rasio dan syara' maka sifat tersebut dinamakan akhlak yang baik. Apabila yang terlahir adalah perbuatan-perbuatan buruk, maka

³¹ يُعْنَتْ لِأَنَّ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ (HR. Ahmad)

³² <http://kbbi.web.id/susila>. Diakses 22 april 2014.

³³ Ibnu Miskawaih. 1994. *Menuju Kesempurnaan Akhlak*. Terjemahan oleh Helmi Hidayat dari "Tahdzib Al-Akhlaq". Bandung: Mizan. h.56.

³⁴ Ali Abdul Halim Mahmud. 2004. *Akhlaq Mulia*. Terjemahan oleh Abdul Hayyie al-Kattani dari "At-Tarbiyah al-Khuluqiyah". Jakarta: Gema Insani Press. h.28.

³⁵ Imam Al-Ghazali. *Ihya' Ulumuddin jilid V*. Terjemahan oleh Moh. Zuhri dari "Thya' Ulumuddin". Semarang: Asy-Syifa'. h. 108.

dinamakan akhlak yang buruk. Jadial-*khuluq* adalah suatu sifat jiwa dengan gambaran batinnya. Dengan demikian akhlak adalah sebuah sistem lengkap yang terdiri dari karakter atau tingkah laku, dan membuat seseorang menjadi istimewa. Karakteristik-karakteristik ini membentuk kerangka psikologi seseorang dan menjadikannya berperilaku sesuai dengan dirinya dalam kondisi apapun.

Menurut Muhammad bin Ali asy-Syarif al-Jurjani, akhlak adalah suatu sifat yang tertanam kuat dalam diri, yang darinya terlahir perbuatan-perbuatan dengan mudah dan ringan, tanpa perlu berpikir dan merenung.³⁶ Jika dari sifat tersebut terlahir perbuatan-perbuatan yang indah menurut akal dan syariat dengan mudah, maka sifat tersebut dinamakan dengan akhlak yang baik. Sedangkan jika darinya terlahir perbuatan-perbuatan buruk, maka sifat tersebut dinamakan akhlak yang buruk. Dari penjelasan di atas tampak bahwa definisi akhlak menurut al-Jurjani tidak berbeda dengan definisi Imam al-Ghazali. Hal ini menunjukkan bahwa keduanya memiliki sumber yang sama, dan keduanya menjelaskan bahwa akhlak adalah apa yang dinilai baik oleh akal dan syariat.

Menurut Ibn Al-Jauzi (w. 597 H) *al-khuluq* adalah etika yang dipilih seseorang. Dinamakan *khuluq* karena etika bagaikan *khalqah* (karakter) pada dirinya. Jadi *khuluq* adalah etika yang menjadi pilihan dan diusahakan seseorang. Adapun etika yang sudah menjadi tabiat

³⁶Ali Abdul Halim Mahmud.2004.*Akhlaq Mulia*. h. 32.

bawannya dinamakan *al-khaym*.³⁷ Sedangkan Ahmad bin Musthafa (Thasy Kubra Zaadah) menjelaskan bahwa akhlak adalah ilmu yang darinya dapat diketahui jenis-jenis keutamaan. Adapun keutamaan didefinisikan sebagai terwujudnya keseimbangan antara tiga kekuatan, yaitu: kekuatan pikir, kekuatan marah, dan kekuatan syahwat. Masing-masing kekuatan itu mempunyai posisi pertengahan diantara dua posisi yang ekstrim (keburukan). Cara untuk mengatasinya adalah dengan menjaga diri agar tidak keluar dari posisi pertengahan, dan terus berada di posisi pertengahan antara sikap mengurangi dan berlebihan.³⁸ Penjelasan secara detail tentang hal-hal tersebut terdapat dalam ilmu akhlak.

Menurut Muhamad bin Ali al-Faarui at-Tahanawi, akhlak adalah keseluruhan kebiasaan, sifat alami, agama, dan harga diri. Lebih lanjut menurut at-Tahanawi bahwa Akhlak terbagi tiga: 1). Keutamaan, yang merupakan dasar bagi apa yang sempurna; 2). Kehinaan, yang merupakan dasar bagi apa yang kurang; 3). dan selain keduanya yang menjadi dasar bagi selain kedua hal itu. ³⁹ Sedangkan akhlak mulia dapat terwujud melalui empat pokok yaitu hikmah, keberanian, *iffah* (menjaga kesucian diri), dan keadilan.⁴⁰ Hikmah adalah kondisi jiwa yang dengannya

³⁷ Rosihon Anwar. 2010. *Akhlak Tasawuf*. Bandung: Pustaka Setia. h. 11.

³⁸ Ali Abdul Halim Mahmud. 2004. *Akhlak Mulia*. h. 34.

³⁹ Ali Abdul Halim Mahmud. 2004. *Akhlak Mulia*. Terjemahan oleh Abdul Hayyie al-Kattani dari "At-Tarbiyah al-Khuluqiyah". Jakarta: Gema Insani Press. h. 34-35.

⁴⁰ Ibnu Miskawaih. 1994. *Menuju Kesempurnaan Akhlak*. Terjemahan oleh Helmi Hidayat dari "Tahdzib Al-Akhlaq". Bandung: Mizan. h.43-46.

seorang dapat mengetahui yang benar dan salah, dalam seluruh perbuatan yang dilakukan secara suka rela. Keberanian adalah kondisi kekuatan kemarahan yang tunduk kepada akal, dalam maju dan mundurnya. Kesucian diri adalah melatih kekuatan syahwat dengan kendali akal dan syari'at. Keadilan adalah kondisi jiwa dan kekuatannya yang memimpin kemarahan dan syahwat, dan membimbingnya untuk berjalan sesuai dengan tuntutan hikmah, juga memegang kendalinya dalam melepas dan menahannya, sesuai dengan tuntutan kebaikan.

Secara substansial, ciri-ciri dalam perbuatan yang dinamakan akhlak adalah: 1). Perbuatan yang telah tertanam kuat dalam jiwa seseorang sehingga sudah menjadi kepribadiannya; 2). Perbuatan yang dilakukan dengan mudah tanpa pertimbangan dan pemikiran; 3). Perbuatan yang dilakukan seseorang tanpa ada paksaan atau tekanan dari luar; 4). Perbuatan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh, bukan sebuah sandiwara.

Dalam perkembangannya, akhlak kemudian menjadi sebuah disiplin ilmu yang membahas tentang perbuatan yang dapat dinilai baik atau buruk. Ada juga definisi yang mengatakan bahwa ilmu akhlak adalah ilmu tentang keutamaan-keutamaan dan cara mengikutinya hingga terisi dengannya dan tentang keburukan dan cara menghindarinya hingga jiwa kosong daripadanya.⁴¹ Selain itu bisa dikatakan bahwa obyek kajian dalam ilmu akhlak berkaitan dengan norma atau penilaian terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Jika dikatakan

⁴¹ Abuddin Nata. 2002. *Akhlaq Tasawuf*. Jakarta: Rajawali Pers. h. 8

baik atau buruk, maka ukuran yang harus digunakan adalah ukuran normatif. Sedangkan benar atau salah, maka ukurannya adalah perhitungan akal pikiran.

4. Susila

Selain istilah etika, moral, dan akhlak, dalam kosa kata bahasa Indonesia juga dikenal istilah susila. Susila adalah salah satu predikat nilai yang menjadi salah satu pokok bahasan dalam kajian etika, yakni pandangan yang menyebabkan seseorang dapat disebut susila. Kualitas atau atribut tersebut dinamakan kebajikan (*virtues*), kebalikan dari kejahatan (*vices*) yang berarti sifat-sifat yang menunjukkan bahwa orang yang memilikinya disebut sebagai orang yang tidak susila.⁴²

Kata susila berasal dari bahasa Sansekerta yang terdiri dari dua kata yaitu *su* yang berarti baik, dan *sila* yang berarti dasar, prinsip, peraturan hidup, atau norma. Kata susila juga berarti sopan, beradab, dan baik budi bahasanya. Dapat juga dikatakan bahwa kesusilaan sama dengan kesopanan.⁴³ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata susila memiliki tiga arti: 1). Baik budi bahasanya; beradab; sopan; 2) Adat istiadat yang baik; sopan santun; kesopanan; keadaban; kesusilaan; 3) Pengetahuan tentang adab.⁴⁴ Dengan demikian, kesusilaan mengacu pada suatu keadaan di mana seseorang selalu menerapkan nilai-nilai yang baik.

⁴²Louis O Kattsoff. 1996. *Pengantar Filsafat*. Terjemahan oleh Soejono Soemargono dari "Element of Philosophy". Yogyakarta: Tiara Wacana. h. 349.

⁴³ Abuddin Nata. 2002. *Akhlaq Tasawuf*. h. 94.

⁴⁴<http://kbbi.web.id/susila>. Diakses 22 april 2014.

Akan tetapi perlu diperhatikan bahwa konotasi makna yang terkandung dalam susila dan tidak susila tidak hanya berkaitan pada perbuatan yang berhubungan dengan seks saja. Melainkan semua perbuatan yang memiliki kualifikasi baik dan buruk secara umum, seperti: kebohongan merupakan perilaku yang tidak susila sedangkan kejujuran adalah perilaku susila. Dengan demikian arti 'bersifat susila' sebanding dengan pengertian 'bersifat etik' yakni suatu predikat yang dipakai untuk membedakan suatu perbuatan atau manusia tertentu dengan manusia yang lain.⁴⁵

Satu hal yang perlu diperhatikan bahwa 'bersifat susila' tidak harus berarti sama atau sesuai dengan adat-istiadat yang berlaku dalam suatu masyarakat. Ada kemungkinan seseorang tidak sependapat dengan salah satu adat-istiadat yang dianggap tidak susila. Bisa jadi adat-istiadat yang berlaku dalam komunitas tertentu hanya merupakan kebiasaan saja seperti masyarakat Irian Jaya yang tidak menganggap buruk orang yang tidak berpakaian.

Dalam konteks ini maka perbedaan dalam deskripsi di atas mengarah pada dua hal yakni antara 'keharusan' dan 'kenyataan'. Jadi ada dua kemungkinan menyelidiki masalah penilaian dengan dua cara. Dari sinilah kemudian etika bisa dibedakan menjadi dua pengertian, yakni sebagai ilmu pengetahuan dan sebagai sebuah ajaran.⁴⁶ Sebagai ilmu pengetahuan berarti penyelidikan tentang tanggapan kesusilaan, sedangkan sebagai sebuah ajaran berarti

⁴⁵Louis O Kattsoff. 1996. *Pengantar Filsafat*. h. 351.

⁴⁶Louis O Kattsoff. 1996. *Pengantar Filsafat*. h. 352.

berhubungan dengan membuat tanggapan kesusilaan. Dengan kata lain, terdapat suatu ilmu yang murni bersifat deskriptif yang hanya menggambarkan suatu obyek dengan cermat dan ilmu yang bersifat normatif yakni menetapkan suatu kaidah penilaian.

B. Titik Temu antara Etika, Moral, Susila dan Akhlak

Pada dasarnya makna etika dan moral terdapat persamaan sekaligus perbedaan. Sebagai sebuah ilmu, etika bukanlah ajaran moral. Antara etika dan ajaran moral tidak berada pada tingkatan yang sama. Antara etika dan moral pada dasarnya memiliki kesamaan arti meskipun bahasa asalnya berbeda. Kata 'moral' bisa digunakan untuk dua arti yakni sebagai nomina (kata benda) dan adjektif (kata sifat). Jika kata moral dipakai sebagai kata sifat artinya sama dengan etis dan jika dipakai sebagai kata benda artinya sama dengan etika yaitu nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya.⁴⁷ Sedangkan antara etika, moral, susila, dan akhlak memiliki kesamaan arti jika dilihat sebagai sebuah pembahasan tentang tingkah laku dan sifat manusia yang mengacu kepada sebuah pedoman untuk membimbing manusia agar bertingkah laku dengan baik berdasarkan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat serta segala sesuatu yang dipandang baik oleh masyarakat.

Penjelasan lain yang mengatakan bahwa antara etika (*ethos*) dengan moral (*mos*) memiliki makna setara berasal dari Karl Barth sebagaimana dikutip oleh

⁴⁷ K. Bertens. 2011. *Etika*. Yogyakarta: Kanisius. h. 7.

Nurcholish Madjid. Menurut Karl Barth,⁴⁸ etika dan moral merupakan filsafat tentang adat kebiasaan yang dalam bahasa Jerman disebut *sitten (sitte)* yang berasal dari akar kata *situ* (bahasa Jerman kuno), dan digunakan untuk menunjukkan arti *mode* tingkah laku manusia atau suatu *constancy* tindakan manusia. Dalam pengertian tersebut, maka etika dan moral secara umum adalah filsafat, ilmu, atau disiplin tentang *mode* tingkah laku manusia atau konstansi-konstansi tindakan manusia.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka terdapat kesamaan antara etika dan moral jika dilihat dari obyek materia atau lapangan pembahasan yaitu ruang lingkup bahasannya yakni tentang perbuatan manusia yang bisa dikategorisasikan sebagai perbuatan baik dan buruk. Ilmu akhlak dapat pula disebut sebagai ilmu yang berisi pembahasan untuk mengenal tingkah laku manusia, kemudian memberikan nilai atau hukum kepada perbuatan tersebut, yaitu termasuk perbuatan baik atau buruk.

Etika pada hakekatnya mengamati realitas moral secara kritis. Etika tidak memberikan ajaran moral, melainkan memeriksa kebiasaan, nilai, norma, dan pandangan moral secara kritis. Etika menuntut sebuah pertanggungjawaban dan menyingkapkan kerancuan.⁴⁹ Dengan kata lain, etika berusaha untuk menjernihkan permasalahan moral, sehingga yang menjadi sudut pandang khas bagi etika adalah segi normatifnya, yang sekaligus membedakan etika dengan ilmu-ilmu lain yang membahas tingkah laku manusia.

⁴⁸ Nurcholish Madjid. 1995. *Islam Doktrin dan Peradaban*. Jakarta: Paramadina. h. 466-467.

⁴⁹ Franz Magnis Suseso. 1987. *Etika Dasar*. h.18.

Selain itu antara etika, moral, susila, dan akhlak seringkali dipandang secara identik, sebagaimana definisi yang diberikan oleh Hasbullah Bakri. Etika berasal dari bahasa Yunani *ethos* yang berarti adat-kebiasaan. Dalam istilah lain, etika dinamakan moral. Berasal dari bahasa Latin *mores* (bentuk jamak dari *mos*) yang juga berarti adat kebiasaan. Dalam bahasa Arab disebut *akhlak* yang berarti budi pekerti dan dalam bahasa Indonesia dinamakan tata-susila.⁵⁰

Jika dilihat dari fungsi dan perannya maka dapat dikatakan bahwa antara etika, moral, susila, dan akhlak adalah sama yakni menentukan nilai baik-buruknya dari suatu perbuatan yang dilakukan manusia. Meskipun secara sempit pengertian akhlak dapat diartikan dengan: 1).Kumpulan kaidah untuk menempuh jalan yang baik; 2).Jalan yang sesuai untuk menuju akhlak; 3). Pandangan akal tentang kebaikan dan keburukan.⁵¹ Akan tetapi kesemua istilah tersebut sama-sama menghendaki terciptanya keadaan masyarakat yang baik, teratur, damai, dan tentram sehingga kesejahteraan lahiriah dan batiniah dapat tercapai.

Etika dan akhlak mempunyai persamaan dan perbedaan. Persamaannya adalah sama-sama membahas masalah baik dan buruknya tingkah laku manusia sehingga akhlak sering disebut dengan etika Islam. Perbedaannya adalah etika bertitik tolak dari akal pikiran bukan dari agama, sedangkan akhlak (etika Islam) berdasarkan ajaran Allah SWT dan Rasul-Nya. Selain itu kata *akhlak* lebih luas

⁵⁰ Hasbullah Bakri. 1986. *Sistematika Filsafat*. Jakarta: Wijaya. h. 70.

⁵¹ Rosihon Anwar. 2010. *Akhlak Tasawuf*. h.12.

daripada moral atau etika yang sering dipakai dalam bahasa Indonesia, karena *ahlak* meliputi segi-segi kejiwaan dari tingkah laku lahiriah dan batiniah seseorang. Ada pula yang menyamakannya karena keduanya membahas masalah baik dan buruknya tingkah laku manusia.

C. Hakekat Etika Filosofis

Etika adalah cabang filsafat yang mencari hakekat nilai baik dan buruk yang berkaitan dengan perbuatan dan tindakan seseorang yang dilakukan dengan penuh kesadaran berdasarkan pertimbangan pemikirannya.⁵² Sebagai salah satu cabang filsafat, maka etika termasuk dalam ruang lingkup kajian filsafat. Istilah filsafat yang dimaksud bukan mengacu pada kebijaksanaan hidup, sistem nilai, pandangan dunia, cita-cita tentang hal-hal yang luhur, melainkan dalam arti ilmiah. Sebagai sebuah aktifitas ilmiah, filsafat sejak lama mendapatkan tempat dalam dunia akademis meskipun, sehingga yang dipertanyakan dalam hal ini adalah fungsi filsafat diantara ilmu-ilmu pengetahuan lainnya. Sebagai sebuah aktifitas ilmiah, terdapat beberapa cabang filsafat berdasarkan bidang kajiannya. Meskipun demikian, secara umum filsafat terbagi dalam dua bidang utama yakni filsafat teoritis dan filsafat praktis. Filsafat teoritis mempertanyakan apa yang ada seperti: hakekat realitas, hakekat manusia, hakekat pengetahuan, tentang yang transenden, dan lain-lain. Sedangkan filsafat praktis

⁵² Musa Asy'ari.1999. *Filsafat Islam Sunnah Nabi dalam Berpikir*. Yogyakarta: Lesfi. h. 83.

berusaha mencari jawaban tentang bagaimana manusia bersikap terhadap persoalan yang dihadapi.

Akan tetapi, dalam pembahasan filsafat teoritis juga memiliki tujuan praktis. Karena pemahaman yang diperoleh, dapat digunakan oleh manusia untuk mengarahkan tindakannya termasuk tanggung jawab dan kewajiban moral. Meskipun kewajiban moral disadari sebagai sesuatu yang mengikat secara mutlak, akan tetapi manusia juga harus bersedia mempertanggungjawabkannya secara rasional.⁵³ Adapun filsafat yang secara langsung berkaitan dengan persoalan praktis manusia adalah etika.⁵⁴ Etika disebut sebagai filsafat praktis karena berkaitan langsung dengan perilaku manusia, membahas tentang yang harus

⁵³ Mempertanggungjawabkan sesuatu berarti mampu menunjukkan bahwa sesuatu itu memadai dengan norma yang harus diterapkan padanya. Pertanggungjawaban hanyalah mungkin kalau ada norma-norma yang menetapkan bagaimana keadaan yang seharusnya. Di sinilah peranan etika normatif yang memberikan dasar objektif pertanggungjawaban moral—yang sebenarnya dituntut oleh kesadaran moral itu sendiri. Suara hati menuntut manusia agar bertindak sesuai dengan tanggung jawab dan kewajiban yang sebenarnya bukan karena orang lain. Franz Magnis-Suseno. 1987. *Etika Dasar*. h. 95.

⁵⁴Etika sendiri dibagi ke dalam etika umum dan etika khusus. Etika umum mempertanyakan prinsip-prinsip dasar yang berlaku bagi segenap tindakan manusia, sedangkan etika khusus membahas prinsip-prinsip itu dalam hubungan dengan kewajiban manusia dalam berbagai lingkup kehidupannya. Di sini juga dibedakan antara etika individual yang mempertanyakan kewajiban manusia sebagai individu terutama terhadap dirinya sendiri dan melalui suara hati terhadap Yang Ilahi dan etika sosial. Sedangkan etika sosial jauh lebih luas dibandingkan etika individual karena hampir semua kewajiban manusia berhubungan dengan kenyataan bahwa ia merupakan makhluk sosial. Fanz Magnis-Suseno. 1994. *Etika Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. h. 13.

dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Jika semua cabang filsafat berbicara tentang yang 'ada', etika berbicara tentang apa yang 'harus dilakukan'. Jadi salah satu pertanyaan dalam etika yang sekaligus sebagai tugas etika adalah menyelidiki apa yang harus dilakukan oleh manusia.

Lebih dari itu, jika etika didefinisikan sebagai filsafat moral, maka etika tidak hanya mempertanyakan apa moral itu, melainkan juga mempertanyakan apa yang harus dan tidak boleh dilakukan, tentang yang baik dan buruk untuk dilakukan. Inilah yang membedakan etika sebagai cabang filsafat mempunyai kedudukan tersendiri dibandingkan cabang filsafat lainnya. Meskipun demikian, tidak berarti bahwa filsafat praktis menyiapkan resep-resep tertentu mengenai perilaku. Karena etika bukanlah buku petunjuk yang bisa digunakan untuk mengatasi kesulitan moral sebagaimana buku petunjuk teknis. Hal ini karena bidang kajian etika bersifat reflektif, bukan teknis.

Etika adalah refleksi kritis terhadap persoalan yang berkaitan dengan perilaku manusia. Etika mengkaji persoalan fundamental seperti hati nurani, kebebasan, tanggung jawab, nilai, norma, hak, kewajiban, keutamaan, dan lain-lain. Selain itu juga mengkaji kelemahan dan kekuatan teori-teori etika yang telah ada sebelumnya, sehingga dapat menilai ulang argumentasi moral yang diajukan sekaligus menyusun argumentasi moral yang telah teruji. Dengan kata lain, etika bergerak di bidang intelektual tapi objeknya berkaitan langsung dengan praktek kehidupan manusia. Karenanya terfokus pada dimensi normatif atau evaluatif.

Fungsi etika normatif terbagi menjadi dua.⁵⁵ *Pertama*, mencari prinsip-prinsip moral yang paling dasar yakni prinsip yang mendasari semua moral yang lebih kongkret. Akan tetapi fungsi pertama ini bukan berarti mencari norma moral dari semua bidang kehidupan manusia. Karena norma moral yang secara langsung dan kongkret dapat dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari merupakan pembahasan dari etika khusus (etika yang mengkaji bidang-bidang tertentu dalam kehidupan manusia).

Kedua, sebagai ilmu yang bersifat refleksi kritis, jadi bukan menciptakan norma baru. Tujuan etika normatif adalah mencari prinsip dasar yang memungkinkan manusia dapat menghadapi pandangan normatif moral yang terdapat dalam masyarakat atau diperjuangkan oleh berbagai ideologi secara rasional dan kritis. Melalui pendekatan rasional dan kritis ini dimaksudkan untuk menemukan unsur-unsur hakiki bagi segenap tuntutan moral yang disebut prinsip moral dasar.

Kontekstualisasi etika termanifestasikan dalam definisi yang diberikan oleh K. Bertens⁵⁶ adalah sebuah ilmu yang menggunakan pendekatan refleksi kritis, metodis, dan sistematis tentang tingkah laku manusia sejauh berkaitan dengan norma. Akan tetapi perlu diperhatikan bahwa tidak semua ilmu yang bersifat refleksi kritis, metodis, dan sistematis tentang tingkah laku manusia termasuk dalam kajian etika. Misalnya psikologi yang juga mengkaji tentang tingkah laku manusia,

⁵⁵Franz Magnis-Suseno. 1987. *Etika Dasar*. h. 96.

⁵⁶ K. Bertens. 2011. *Etika*. h. 26.

termasuk juga *behavioral sciences* (ilmu-ilmu tentang tingkah laku manusia yang merujuk pada ilmu psikologi dan sosiologi).

Etika dalam penelitian pembahasan ini adalah refleksi ilmiah tentang tingkah laku manusia dari sudut norma-norma atau sudut baik-buruk. Sudut pandang itulah yang menjadi ciri khas bagi etika dan membedakannya dengan ilmu-ilmu lain yang juga membahas tingkah laku manusia. Meskipun etika adalah sebuah ilmu—yang merupakan cabang filsafat—akan tetapi etika bukanlah ilmu empiris. Ilmu empiris adalah ilmu yang berdasarkan fakta dan dalam pembahasannya tidak pernah meninggalkan fakta. Seluruhnya berlangsung dalam ranah empiris, hasil observasi dan eksperimental serta kebenaran yang ditemukan juga dikembalikan pada fakta-fakta di lapangan.

Jika dibandingkan dengan ilmu-ilmu empiris, filsafat tidak membatasi diri pada gejala-gejala yang kongkret seperti yang dilakukan oleh ilmu-ilmu empiris, meskipun filsafat juga berbicara tentang hal kongkret, tetapi lebih dari itu. Kajian filsafat melampaui ranah empiris dengan mempertanyakan gejala di balik sesuatu yang empiris. Dengan demikian pemikiran filsafat dijalankan dengan cara non-empiris, yakni tidak membatasi pada pengalaman indrawi. Itulah perbedaan pokok antara filsafat dan ilmu-ilmu empiris (fisika, astronomi, sosiologi, psikologi, dan lain-lain).

Filsafat berusaha mengungkap inti dari obyek yang sama sekali tersembunyi dari observasi yakni kualitas yang paling dalam dari segala sesuatu—berpikir hakekat (metafisika) yakni sebuah kemampuan berpikir secara

abstrak untuk menemukan noumena dibalik fenomena, menemukan inti persoalan yang menjadi hal pokok dan penting sehingga memberi makna terhadap kehidupan manusia. Dengan sendirinya berbeda dengan apa yang nampak (*appearance*)—yang hanya merupakan representasi dari hakekat yang sebenarnya/kenyataan (*reality*).

Proses abstraksi ini sangat penting dan diperlukan untuk bisa mengetahui akar atau sesuatu yang tersembunyi dari segala persoalan yang dihadapi. Dengan ditemukannya akar persoalan, maka akan membawa manusia kepada pemahaman terhadap segala sesuatu. Pemahaman tersebut dapat dijadikan dasar dipilihnya suatu tindakan yang berorientasi pada tindakan bijaksana (sebagaimana arti kata filsafat yakni mencintai kebijaksanaan—terus-menerus berusaha untuk menyatukan diri dengan pengetahuan yang luas dan mendalam).

Filsafat sebagai sebuah pergumulan intelektual, terkait erat dengan pencarian mendasar atas makna dan arah kehidupan. Sebuah kebutuhan tentang bagaimana misteri-misteri kehidupan bisa dijelaskan dan dipahami. Sebuah kebutuhan untuk mengerti apa yang sesungguhnya diinginkan oleh jiwa itu sendiri. Karena seringkali titik terdalam jiwa manusia bukan tersentuh dan terisi oleh hal-hal material, bukan oleh kemewahan atau kedudukan, melainkan oleh rasa penasaran akan sesuatu yang misterius, dan filsafat dapat mengisi ruang kosong dalam jiwa manusia dan membimbingnya ke dasar kebutuhan batin tersebut.

Meskipun masa depan filsafat terkadang diragukan karena memang pada awalnya filsafat memuat seluruh pengetahuan manusia, namun dengan semakin berkembangnya ilmu pengetahuan khusus, semakin banyak pula bidang kajian yang dulunya menjadi kajian filsafat beralih pada ilmu pengetahuan khusus tersebut. Meskipun demikian kajian ilmu pengetahuan khusus hanyalah persoalan yang memang tidak termasuk dalam bidang filsafat. Selama filsafat masih merupakan ilmu universal, maka semua masalah ilmiah disentuhnya. Jika sekarang filsafat bukan lagi ilmu universal, maka kajian di dalamnya berhubungan dengan pertanyaan-pertanyaan yang secara prinsipil berdasarkan struktur metodis, tidak dapat dijawab oleh ilmu-ilmu pengetahuan lain.

Di kalangan kaum awam, seringkali filsafat tidak banyak diminati. Bahkan tidak jarang mendapat tuduhan sebagai ilmu yang mengawang-ngawang karena membahas hal-hal yang abstrak dan kurang relevan untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kebanyakan uraian filsafat dianggap jauh sekali dari kenyataan hidup sesungguhnya. Akan tetapi, etika sebagai cabang filsafat memiliki relevansi terhadap persoalan tentang baik dan buruk, tentang yang dilarang dan yang harus dilakukan. Bisa jadi seseorang yang sebetulnya tidak memahami filsafat, tidak jarang justru mempraktekkan etika filosofis, paling tidak secara implisit. Karena diakui atau tidak, etika membicarakan tentang masalah-masalah penting yang menyangkut inti kehidupan manusia.

D. Epistemologi Etika

Pada dasarnya, tujuan dalam mengkaji etika adalah untuk mencapai kesamaan penilaian tentang baik dan buruk di mana saja dan kapan saja. Akan tetapi hal ini akan menuai kesulitan tersendiri karena ukuran tentang baik dan buruk seringkali tergantung pada keadaan suatu daerah dan suasana suatu masa. Karenanya tanggapan tentang baik buruk bersifat nisbi atau relatif tergantung pada kebudayaan di mana tanggapan tersebut diberikan. Dari sinilah kemudian muncul beberapa pendekatan ilmiah yang bisa digunakan untuk mempelajari tingkah laku manusia termasuk baik dan buruk, antara lain etika deskriptif, etika normatif, dan metaetika.⁵⁷

Pertama, etika deskriptif melukiskan tingkah laku moral dalam arti luas seperti adat kebiasaan, anggapan-anggapan tentang baik dan buruk, tindakan yang diperbolehkan dan yang tidak; mempelajari moralitas yang terdapat pada individu tertentu, dalam kebudayaan atau subkultur tertentu dalam periode sejarah; memberi gambaran dari gejala kesadaran moral (suara batin), dari norma-norma dan konsep-konsep etis. Etika deskriptif berkaitan dengan pencatatan bermacam-macam predikat serta tanggapan kesusilaan yang ada dan tidak membicarakan ukuran penilaian. Jadi etika deskriptif hanya melukiskan atau memberi gambaran, tidak memberi penilaian. Etika deskriptif dijalankan oleh ilmu-ilmu sosial seperti antropologi budaya, psikologi, sosiologi, sejarah,

⁵⁷ K. Bertens. 2011. *Etika*. h. 17-24. Lihat juga Harry Hamersma. 1981. *Pintu Masuk*. h. 24. Lihat juga Louis O Kattsoff. 1996. *Pengantar Filsafat*. h. 352. Lihat juga Hasbullah Bakri. 1986. *Sistematika Filsafat*. h. 72.

dan sebagainya meskipun mereka tidak pernah memakai istilah etika deskriptif. Karenanya etika deskriptif termasuk ilmu pengetahuan empiris bukan filsafat.

Kedua, etika normatif tidak lagi berbicara tentang gejala-gejala, melainkan tentang apa yang sebenarnya harus merupakan tindakan yang dilakukan. Dalam etika normatif, norma-norma dinilai dan sikap manusia ditentukan. Artinya etika normatif menetapkan ukuran-ukuran atau kaidah-kaidah yang mendasari pemberian tanggapan atau penilaian terhadap perbuatan-perbuatan, dan membicarakan tentang apa yang seharusnya dikerjakan dan apa yang tidak. Jadi etika normatif tidak bersifat deskriptif melainkan preskriptif (memerintah), tidak melukiskan melainkan menentukan benar tidaknya tingkah laku atau anggapan moral. Etika normatif bertujuan merumuskan prinsip-prinsip etis yang dapat dipertanggungjawabkan.

Ketiga, metaetika (*meta* berasal dari bahasa Yunani yang berarti melebihi atau melampaui) atau etika kefilosofan yang berbeda dengan apa yang digunakan dalam ilmu-ilmu empiris sebagaimana dipergunakan dalam etika deskriptif. Yang dibahas bukanlah moralitas secara langsung melainkan seputar makna ucapan-ucapan dalam bentuk bahasa di bidang moralitas yakni berbicara pada taraf "bahasa etis" atau bahasa yang digunakan dalam bidang moral. Metaetika juga mempelajari logika khusus dari ucapan-ucapan etis. Bahasa etika memiliki ciri-ciri tertentu yang tidak dimiliki oleh kalimat-kalimat lain. Dan metaetika mengarahkan perhatian pada pemaknaan atau pengertian khusus dari bahasa etika itu. Sehingga metaetika disebut juga filsafat analitik dan etika analitis.

Secara singkat bisa dikatakan bahwa etika deskriptif sekedar melukiskan atau menggambarkan tingkah laku moral yang dijalankan oleh suatu masyarakat tanpa memberi penilaian. Etika normatif bersifat memberi penilaian dan menetapkan ukuran terhadap tingkah laku moral yang dijalankan, sehingga bersifat preskriptif bukan deskriptif. Sedangkan metaetika atau etika kefilosafatan hendak mempertanyakan makna yang dikandung dalam tingkah laku moral yang dipakai untuk memberi penilaian moral. Dengan demikian studi tentang tingkah laku atau moralitas secara umum bisa dikategorisasikan menjadi dua pendekatan yakni pendekatan non-filosofis dan pendekatan filosofis. Pendekatan non-filosofis adalah etika deskriptif, sedangkan pendekatan filosofis adalah etika normatif dan metaetika.

Uraian di atas menggambarkan tiga macam prinsip yang terkait dengan masalah-masalah pokok dalam etika dan menjadi landasan seseorang dalam mengambil keputusan yakni: 1). Apakah yang dapat dipakai sebagai dasar dalam membuat tanggapan terhadap tingkah laku? 2). Perbuatan apa yang dikatakan betul, artinya dapat dibenarkan dari segi kesusilaan? Apabila pada pertanyaan yang pertama, kata 'dapat' dihilangkan. Maka pembahasan tersebut menjadi wilayah kajian dari etika deskriptif. Akan tetapi jika kata 'dapat' tersebut digantikan dengan kata 'seharusnya' maka hal ini akan berhubungan dengan etika normatif. Dengan demikian muncullah pertanyaan berikutnya: 3). Makna apakah yang dikandung oleh kata 'seharusnya' dan apa yang menjadi sumber kewajiban tersebut?

Secara sederhana jawaban dari pertanyaan kedua dapat diajukan bahwa suatu perbuatan dikatakan benar apabila sesuai dengan prinsip-prinsip kesusilaan. Jawaban tersebut bisa dikategorisasikan sebagai usaha untuk menemukan serta menjelaskan prinsip-prinsip kesusilaan sebagaimana yang terdapat dalam teori kesusilaan dari para filosof. Kebanyakan teori tersebut menganalisa makna yang terdapat dalam kata-kata: baik, betul, seharusnya, wajib, dan lawan dari kata-kata tersebut. Analisa diarahkan untuk memverifikasi pertanyaan tersebut sekaligus menggambarkan dua masalah penting jawaban dari persoalan tersebut yang tidak terdapat kesepakatan diantara para filosof: 4). Apakah tanggapan-tanggapan kesusilaan dapat diverifikasi, dan jika dapat bagaimanakah caranya? 5). Makna apakah yang dikandung oleh predikat-predikat nilai? Bahkan implisit di dalamnya juga terkandung tentang pertanyaan mengenai makna yang terdapat dalam istilah 'seharusnya'.

E. Aksiologi Etika: Agama dan Modernitas

Setiap masyarakat mengenal nilai-nilai dan norma-norma etis. Dalam masyarakat yang homogen, nilai-nilai dan norma-norma itu seringkali diterima begitu saja tanpa dipertanyakan. Lebih-lebih jika sumber nilai-nilai etis itu berasal dari agama. Akan tetapi jika dilihat dalam konteks realitas sosial yang bersifat dinamis, maka nilai-nilai tersebut mengalami pergeseran seiring dinamika zaman, terutama ketika peradaban manusia telah sampai pada masa yang disebut modern. Di sinilah urgensi etika ditempatkan dalam pembahasan tentang keterkaitan modernitas dengan persoalan etis yang mulai mengemuka.

Meskipun berbeda dengan ajaran moral, karena etika tidak mempunyai pretensi untuk secara langsung dapat membuat manusia menjadi lebih baik. Akan tetapi etika adalah pemikiran sistematis tentang moralitas. Yang dihasilkan langsung bukanlah kebaikan melainkan suatu pengertian yang lebih mendasar dan kritis. Etika mau menyediakan orientasi. Meskipun tidak semua orang memerlukan orientasi itu—apalagi tanpa etika ilmiahpun kebanyakan orang dengan sendirinya sedikit beretika—namun orang yang tidak begitu saja percaya pada pandangan lingkungannya akan merasakan kebutuhan suatu orientasi kritis di bidang moral.

Secara umum, urgensi etika bisa digambarkan dalam empat hal berikut: *Pertama*, manusia pada saat ini berada pada “*global Village*” (kampung global) atau “*global stadium*” (stadion global),⁵⁸ sehingga batas-batas antar wilayah menjadi sempit dan manusia tidak lagi bisa mengisolasi diri. Pada saat yang sama, persoalan besar

⁵⁸ Dalam zaman *cyberspace* seperti saat ini manusia tidak lagi bisa mengisolasi persoalan sosial-kemanusiaan menjadi persoalan sektoral belaka, seperti semata-mata persoalan ekonomi, politik, sains, maupun teknologi. Setiap aspek kehidupan saling berinteraksi, berkorelasi, dan saling berpengaruh dalam sebuah jaringan kehidupan. Perkembangan teknologi komunikasi dan komunikasi telah membuat dunia seperti *global village*, sehingga interkoneksi antar penduduk dunia menjadi sedemikian intensif. Teknologi media menurut McLuhan, teknologi media telah mentransformasikan masyarakat-masyarakat manusia di dunia menjadi sebuah satuan komunitas global tanpa dinding pembatas lama seperti ideologi politik, nasionalitas, dan agama, serta batas-batas geografis. Lihat Husein Heriyanto. 2003. *Paradigma Holistik Dialog Filsafat, Sains, dan Kehidupan Menurut Shadra dan Whitehead*. Jakarta: Teraju. h. 9.

yang menghadang peradaban global saat ini adalah ketidaksesuaian antara tuntutan zaman dengan cara pandang manusia, termasuk di dalamnya berkaitan dengan persoalan moralitas yang semakin pluralistik. Perjumpaan manusia dari berbagai suku, daerah, dan agama yang berbeda-beda. Kesatuan tatanan normatif sudah tidak ada lagi, sehingga manusia berhadapan dengan sekian banyak pandangan moral yang seringkali saling bertentangan.⁵⁹

Dalam perspektif historis, pluralitas moral ini sudah pernah dijumpai, terutama munculnya pemikiran etika di kalangan filosof. Etika sebagai kajian filsafat mulai muncul pada saat terjadinya dekadensi moral di lingkungan kebudayaan Yunani 2500 tahun lalu. Karena pandangan-pandangan lama tentang baik dan buruk tidak lagi dipercayai, para filosof mempertanyakan kembali norma-norma dasar bagi kelakuan manusia.⁶⁰

Situasi yang terjadi pada saat itu diakibatkan oleh kaum sofis yang menawarkan kesuksesan instan melalui kepintaran dan keliahaian bersilat lidah. Mereka adalah orang-orang pragmatis yang mengajarkan teknik berargumentasi (retorika) terlepas dari soal apakah argumentasi itu benar atau salah. Sofisme mendidik orang untuk meyakinkan orang lain dan merebut hati publik. Tidak peduli *content*, yang penting ilmunya efektif memenangkan orang yang telah membayar mahal kursus yang mereka berikan. Dari sinilah kemudian moralitas diputarbalikkan. Situasi tersebut juga tidak jauh berbeda dengan zaman sekarang. Untuk mencapai suatu pendirian

⁵⁹Franz Magnis-Suseno. 1987. *Etika Dasar Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral*. Yogyakarta: Kanisius. h.15.

⁶⁰Franz Magnis-Suseno. 1987. *Etika Dasar*. h. 15.

dalam pergolakan pandangan-pandangan moral ini refleksi kritis etika diperlukan.

Kedua, pluralisme moral terutama lebih dirasakan karena manusia berada dalam era informasi dan komunikasi. Melalui media komunikasi modern informasi dari seluruh dunia bisa diakses lewat internet. Transformasi masyarakat berlangsung tanpa henti. Perubahan besar telah terjadi dihantam kekuatan modernisasi, dan berimplikasi pada perubahan cara berpikir manusia secara radikal. Rasionalisme, individualisme, nasionalisme, sekularisme, materialisme, keparcayaan akan kemajuan, konsumerisme, pluralisme religius serta sistem pendidikan modern secara hakiki mengubah lingkungan budaya yang selama ini telah lama mengakar di Indonesia.

Globalisasi tidak saja merupakan gejala ekonomi melainkan juga di bidang moral.⁶¹ Dalam transformasi ekonomi, sosial, intelektual dan budaya itu nilai-nilai budaya yang tradisional mendapat tantangan besar. Dalam situasi ini etika membantu manusia agar tidak kehilangan orientasi, dapat membedakan mana yang hakiki dan mana yang boleh berubah, agar mampu mengambil sikap yang dapat dipertanggungjawabkan.

Ketiga, Perkembangan pesat dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi menimbulkan masalah-masalah etis baru khususnya ilmu-ilmu biomedis seperti rekayasa genetika, reproduksi artifisial, dan lain-lain. Proses perubahan sosial budaya dan moral dimanfaatkan oleh berbagai pihak untuk menawarkan ideologi baru

⁶¹K. Bertens. 2011. *Etika*. h. 35.

sebagai obat penyelamat. Di sinilah etika menjadi penting karena mampu membantu manusia menghadapi ideologi tersebut secara kritis dan objektif agar memiliki kemandirian sikap untuk bertahan, tidak begitu saja mengikuti arus perubahan, tidak naif dan ekstrim. Manusia tidak begitu begitu mudah menganut pandangan baru, sekaligus tidak mudah menolak nilai-nilai karena nilai itu terbilang baru.⁶² Situasi moral dalam dunia modern inilah yang menuntut manusia untuk mendalami kajian etika, sebagaimana satu cara untuk mengatasi persoalan moral pada zaman modern ini, terutama sangat diperlukan diperlukan bagi orang beragama.

Keempat, Etika diperlukan oleh kaum agamawan yang di satu sisi menemukan dasar kemantapan mereka dalam iman, pada sisi lain sekaligus berpartisipasi dengan tidak menutup diri dalam semua dimensi kehidupan masyarakat yang sedang berubah. Selain itu etika berguna untuk menemukan pesan hakiki yang terkandung di dalam wahyu. Etika juga digunakan untuk mempertanyakan kembali moral agama yang dianut oleh manusia,⁶³ sekaligus menanggapi persoalan moral keagamaan yang belum disebutkan secara eksplisit dalam wahyu.

Setiap agama mengandung ajaran moral yang menjadi pegangan bagi penganutnya. Ajaran moral tersebut, menjadi sangat penting karena ajaran itu berdasarkan wahyu, berasal dari Tuhan dan mengungkapkan kehendak Tuhan. Akan tetapi, untuk memahami ajaran moral tersebut diperlukan akal. Etika

⁶²Franz Magnis-Suseno. 1987. *Etika Dasar*. h. 16.

⁶³Franz Magnis-Suseno. 1987. *Etika Dasar*. h. 16.

adalah usaha manusia untuk memahami ajaran moral yang berasal dari wahyu dengan menggunakan akal budi dan daya fikirnya untuk memecahkan masalah bagaimana ia harus hidup kalau ia ingin menjadi baik. Akal sebagai ciptaan Tuhanyang diberikan kepada manusia memiliki potensi luar biasa untuk bisa dipergunakan dalam segala segi kehidupan. Namun dengan adanya wahyu bukan berarti kerja dihentikan. Justru sebaliknya, orang beragama harus mengoptimalkan fungsi akal.

Etika memang tidak menggantikan agama, tetapi di lain pihak etika juga tidak bertentangan dengan agama, bahkan diperlukan olehnya. Terdapat dua bidang moral agama yang tidak dapat dipecahkan tanpa penggunaan metode-metode etika. *Pertama*, persoalan interpretasi terhadap wahyu. *Kedua*, bagaimana masalah-masalah moral baru, yang tidak langsung dibahas dalam wahyu, dapat dipecahkan sesuai dengan semangat agama tersebut. Selain itu, manfaat ilmu akhlak (etika) sebagaimana disebutkan oleh Mansur Ali Rajab, adalah:⁶⁴

1. Memberikan pengetahuan kepada manusia tentang kriteria baik dan buruk, lalu memberikan tuntunan tentang cara yang terbaik untuk melakukan perbuatan baik, serta cara yang terbaik untuk menjauhi perbuatan buruk. Inilah yang disebut dengan ranah kognitif (*quwwatu al-ilmu*).
2. Menanamkansikap pada diri manusia, bahwa perbuatan baik dapat memperoleh kebaikan hidup, sedangkan

⁶⁴Mahjuddin. 2010. *Akhlak Tasawuf II: Pencarian Ma'rifat bagi Sufi Klasik dan Penemuan Kebahagiaan Batin bagi Sufi Kontemporer*. Jakarta: Radar Jaya. h. 10-11.

perbuatan buruk dapat menyengsarakannya. Inilah yang disebut dengan ranah afektif (*quwwatu al-hali*).

3. Bersedia berbuat kebaikan, kapan dan dimana saja bila dibutuhkan, dan bersedia menghindari perbuatan buruk, kapan dan dimana saja untuk memelihara agamanya, masyarakatnya dan dirinya. Inilah yang disebut dengan ranah psikomotorik (*quwwatu al-amal*).

Sedangkan menurut Ibnu-Qoyim al-Jauziyyah, manfaat ilmu akhlak adalah agar manusia sedapat mungkin menjadi sosok yang sempurna dalam perbuatan-perbuatannya, sehingga di dunia ia berbahagia dan di akhirat menjadi sosok yang terpuji.⁶⁵ Akhlak baik bersumber dari ketakwaan kepada Allah, semakin kuat ketakwaan seseorang, semakin baik pula akhlaknya. Takwa kepada Allah, mendorong manusia untuk selalu berbuat baik terhadap-Nya, hingga ia dapat mencintainya. Sedangkan akhlak baik dapat mendorong manusia untuk selalu berkomunikasi dan berinteraksi dengan baik terhadap sesama manusia. Dengan mengamalkan tuntunan dalam ilmu akhlak, maka manusia diharapkan melakukan perbuatan yang mulia (*al-fadilah*) dan memperoleh kebahagiaan dan kepuasan batin (*al-sa'adah*); baik kebahagiaan di dunia dan akhirat.

⁶⁵Mahjuddin. 2010. *Akhlak Tasawuf II*. h. 11.

BAB III BERKENALAN DENGAN ARISTOTELES

A. Riwayat Hidup Aristoteles

Aristoteles lahir pada tahun 384 SM di Stageira Thrace, sebuah kota di Yunani Utara.¹ Kemungkinan besar masa muda Aristoteles berada di istana (tepatnya di kota Pella), karena ayahnya seorang dokter pribadi Amyntas II—raja Makedonia. Pada saat Aristoteles berusia ± 18 tahun, dia dikirim ke Athena untuk belajar di Akademia Plato selama kurang lebih 20 tahun hingga Plato meninggal pada tahun 348/7 SM. Pada waktu belajar di Akademia, Aristoteles juga menjadi pengajar anggota akademia yang lebih muda, khususnya pelajaran logika dan retorika serta menerbitkan beberapa karya.²

Sesudah kematian Plato, kepala Akademia digantikan oleh Speusippos (kemenakannya), sedangkan Aristoteles meninggalkan Athena bersama Xenokrates (murid Plato). Mereka berangkat ke Assos yang terletak dipesisir Asia Kecil—saat itu penguasa negara adalah murid akademia yang bernama Hermeias. Plato telah mengirimkan dua orang murid (Erastos dan Koriskos) serta meminta agar mereka membuka sekolah di wilayah

¹Bertrand Russell. 2007. *Sejarah Filsafat Barat dan Kaitannya dengan Kondisi Sosio-politik dari Zaman Kuno hingga Sekarang*. Diterjemahkan oleh Sigit Jatmoko, dkk dari "History of Western Philosophy and its Connection with Political and social Circumstances from the Earliest Times to the Present Day". Yogyakarta: Pustaka Pelajar. h. 217.

²K. Bertens. 1999. *Sejarah Filsafat Yunani*. Yogyakarta: Kanisius. h. 154.

tersebut. Aristoteles dan kawannya mulai mengajar di sekolah Assos. Aristoteles menikah dengan Pythias (anak angkat Hermeias),³ dan dikaruniai seorang anak perempuan. Sepeninggal istrinya, Aristoteles menikah dengan Herpyllis dan memiliki seorang anak laki-laki yang bernama Nikomakhos.

Pada tahun 345 SM, Hermeias ditangkap dan dibunuh oleh tentara Parsi. Peristiwa pembunuhan itu memaksa Aristoteles dan kawan-kawannya melarikan diri dari Assos dan pergi ke Mytilene di pulau Lesbos—tidak jauh dari Assos—atas undangan Theophrastos (muriddan sahabat Aristoteles). Di Assos dan di Mytilene Aristoteles mengadakan riset dalam bidang biologi dan zoologi. Sebagian data untuk riset tersebut, telah dikumpulkan dalam buku yang berjudul *Historia Animalium*.

Sekitar tahun 342 SM, Aristoteles mendapat undangan dari raja Philippos di Makedonia (anak Amyntas II) untuk menjadi pendidik bagi Alexander (anak raja Philippos).⁴ Pada tahun 340 SM, saat Alexander masih berusia 19 tahun, dia diangkat menjadi raja Makedonia untuk menggantikan ayahnya. Beberapa waktu kemudian setelah Alexander menjadi raja, Aristoteles kembali ke Athena, dimana Xenokrates sudah menggantikan Speusippos sebagai kepala Akademia. Meskipun Xenokrates tetap menjadi sahabat Aristoteles, namun dia tidak kembali ke Akademia, melainkan menetap di kota asalnya Stageira dan mendirikan sekolah yang dinamakan Lyceum—tempatnyanya dekat halaman yang dipersembahkan

³K. Bertens. 1999. *Sejarah*. h. 155.

⁴Fuad Hasan. 2001. *Pengantar Filsafat Barat*. Jakarta: Pustaka Jaya. h. 39.

untuk dewa Apollo Lykeios,⁵ hingga nantinya Aristoteles menulis dua buah tulisan untuk Alexander yang berjudul *Perihal Monarki* dan *Tentang Pendirian Perantauan*.

Aristoteles membuka sebuah perpustakaan dengan mengumpulkan bermacam-macam manuskrip dan peta bumi. Berdasarkan kesaksian Stabo—seorang sejarawan Yunani-Romawi, perpustakaan tersebut merupakan perpustakaan pertama dalam sejarah manusia. Aristoteles juga membuka semacam museum dalam bidang biologi dan zoologi. Alexander memberi sumbangan besar untuk membentuk koleksi tersebut dengan memerintahkan semua pemburu, penangkap unggas, dan nelayan dalam kerajaanya, agar mereka melaporkan kepada Aristoteles mengenai semua hasil pekerjaannya yang menarik dari sudut pandang ilmiah.

Kematian Alexander Agung pada tahun 323 SM merupakan kejadian yang sangat menyedihkan bagi *Lyceum*,⁶ hingga muncul suatu gerakan anti Makedonia dengan tujuan untuk melepaskan Athena dari kerajaan Makedonia. Karena Aristoteles mendapat tuduhan *asebeia* (kedurhakaan), maka ia meletakkan pimpinan *Lyceum* ke tangan Theophrastos (muridnya), kemudian dia melarikan diri ke Khalkis, tempat asal ibunya. Berdasarkan sejarah Yunani kuno, saat itu Aristoteles mengatakan bahwa 'ia tidak akan membiarkan Athena berdosa terhadap filsafat untuk kedua kali' (dengan alusi kepada nasib Sokrates).

⁵K. Bertens. 1993. *Sejarah Ringkas Filsafat Barat*. Yogyakarta: Kanisius. h. 14.

⁶K. Bertens. 1999. *Sejarah*. h. 156.

Tetapi pada tahun berikutnya ia meninggal pada usia 62 atau 63 tahun.⁷

B. Karya-karya Aristoteles

Beberapa karya yang ditulis Aristoteles berhubungan dengan pengajarannya di *Lyceum* (Lykeion) dan di tempat lain. Secara umum, karya-karya Aristoteles bisa dikategorikan menjadi tiga: ⁸

Pertama, Karya-karya yang diterbitkan oleh Aristoteles sendiri. Karya-karya ini sebagian besar berupa dialog yang ditulis ketika Aristoteles berada di Akademia. Semua karya tersebut ditulis dengan gaya bahasa yang memikat hati. Terdapat tiga dialog dalam karya tersebut, antara lain:⁹

- 1). *Eudemos* atau persoalan jiwa. Salah satu contoh dalam dialog ini adalah *Phaidon*, ditulis sesudah tahun 354. Sebagaimana judulnya, dialog ini menjelaskan tentang persoalan-persoalan jiwa. Aristoteles menerima beberapa ajaran pokok dari Plato seperti pra-eksistensi jiwa, perpindahan jiwa dan pengetahuan dapat disamakan dengan peningkatan.
- 2). *Protrephtikos*. Karya ini berbentuk sastra dan ditulis dengan tujuan untuk mengajak Themison, kepala negara di pulau Kypros (Siprus), untuk berfilsafat. *Protrephtikos* mempertentangkan pengetahuan pragmatis yang dipraktekan dalam sekolah Isokrates,

⁷Bertrand Russell. 2007. *Sejarah*. h. 218. Lihat juga K. Bertens. 1999. *Sejarah*. h. 156.

⁸K. Bertens. 1999. *Sejarah*. h. 157.

⁹K. Bertens. 1999. *Sejarah*. h. 157-158. Bertrand Russell. 2007. *Sejarah*. h.229.

saingan Akademia. Di dalamnya juga pemikiran Aristoteles mengenai etika. Meskipun di dalamnya banyak terdapat gagasan-gagasan yang mengingatkan pada Plato, namun juga terdapat beberapa pokok pikiran khas Aristoteles.

- 3). *Perihal filsafat* yang terdiri dari tiga buku. Buku pertama menyajikan penjelasan tentang perkembangan umat manusia di dalamnya terdapat beberapa hal yang dipengaruhi oleh Plato. Buku kedua memuat kritikan tajam atas ajaran Plato tentang idea-idea. Buku ketiga memuat pendapatnya tentang Allah dan susunan *kosmos*. Di dalamnya terdapat pertentangan pandangan antara Aristoteles dengan Plato (dalam dialog *Timaios*). Menurut Aristoteles kosmos tidak mempunyai permulaan waktu. Penulisan karya Aristoteles ini oleh para ahli dinilai dilakukan di Assos sesudah kematian Plato.

Kedua, Karya-karya dalam bentuk risalah-risalah ilmiah. Kebanyakan karya ini ditulis oleh Aristoteles pada saat mengajar di Lykeion. Namun hampir semua karya tersebut, saat ini tidak lagi bisa ditemukan. Adapun yang masih tersimpan adalah karya yang disebut dalam bahasa Latin *Historia Animalium* (penyelidikan mengenai binatang-binatang). Karya ini disisipkan oleh Andronikos dari Rhodos dalam edisi buku-buku Aristoteles. Karya lainnya berjudul *Athenaion Politeia* (Tata Negara Athena) ditemukan pada tahun 1890 di padang pasir daerah Mesir. Karya tersebut hanya merupakan satu bagian dari satu karya

raksasa yang mengumpulkan Undang-Undang Dasar dari 158 negara Yunani.¹⁰

Ketiga, Karya-karya yang ditulis oleh Aristoteles terkait dengan pengajaran yang dilakukan. Karya-karya ini tidak untuk diterbitkan, hanya berupa catatan yang disusun Aristoteles untuk keperluan kuliah-kuliahnya. Sebagian kecil buku-buku tersebut berasal dari catatan muridnya saat mengikuti kuliah. Namun karya-karya ini juga memuat ringkasan-ringkasan yang disusun Aristoteles untuk murid-muridnya yang tidak sempat menghadiri kuliahnya. Bahasa yang digunakan bersifat padat, lugas dan sarat dengan istilah teknis. Seringkali juga terdapat pengulangan di dalamnya bahkan pertentangan antar kalimat.¹¹

Sesudah kematian Aristoteles, murid-muridnya (antara lain Eudemus dari Rhodos dan anaknya yang bernama Nikomakhos) menyusun kembali tulisan-tulisan tersebut menjadi sebuah buku. Theopharastos mewasiatkan manuskrip-manuskrip Aristoteles kepada anggota Lykeion lain yang bernama Neleus dari Skepsis. Namun pengikut-pengikut Neleus menyembunyikan manuskrip tersebut di gudang bawah tanah, hingga ditemukan oleh seorang perwira tentara raja Pontos yang bernama Mithridates di Apellikon. Karena manuskrip itu dalam keadaan kurang baik, maka ia membawa ke Athena sekitar tahun 100 SM. Pada tahun 84 SM, konsul Romawi yang bernama Sulla membawanya ke Roma dan meminta

¹⁰Betrand Russell. 2007. *Sejarah* . h.276-282.

¹¹K. Bertens. 1999. *Sejarah*. h.159-160.

sarjana-sarjana untuk menerbitkan karya-karya itu. Penerbitan itu dilaksanakan oleh Andronikos dari Rhodos sekitar tahun 40 SM.

Meskipun tidak ditemukan informasi yang jelas, namun tidak menutup kemungkinan bahwa penerbitan tersebut berdasarkan manuskrip-manuskrip baru yang ditemukan sebelumnya. Meskipun demikian tidak berarti bahwa antara tahun 250 SM sampai 70 SM (pada tahun ini Andronikos mulai mengajar di Athena) karya-karya Aristoteles yang terpenting tidak dikenal sama sekali. Teks-teks Aristoteles yang ada sekarang ini semuanya berdasarkan edisi yang diseleksi oleh Andronikos dari Rhodos. Andronikos adalah orang yang pertama melakukan pemilahan karya-karya otentik Aristoteles dan yang berasal dari murid-muridnya.

Berikut ini adalah klasifikasi karya-karya Aristoteles:¹²

Pertama, dalam bidang Logika: 1). *Categoriae* (kategori-kategori) dimana otentisitasnya dipersoalkan, tetapi banyak ahli cenderung berpikir bahwa karya ini betul-betul ditulis oleh Aristoteles; 2). *De interpretatione* (Penafsiran); 3). *Analytica Priora* (Analitika adalah nama yang dipakai Aristoteles untuk logika; 4). *Analytica Posteriora* (Analitika lanjutan); 5). *Topica* terdiri dari 8 buku; 6). *De Sophisticis Elenchis* (Cara berargumentasi kaum Sofis) karya ini kadang-kadang di anggap sebagai buku IX dari *Topica*.

Kedua, dalam bidang Filsafat Alam: 1). *Physica* 8 buku; 2). *De Caelo* (Persoalan langit) 4 buku; 3). *De*

¹²K. Bertens. 1999. *Sejarah*. h. 160-163.

generatione et Carruptione (Persoalan kemunculan dan kepunahan makhluk jasmani) 2 buku; 4). *Meteorologica* (Ajaran tentang jagat raya) terdiri dari 4 buku, tetapi buku terakhir biasanya tidak dianggap otentik.

Ketiga, Dalam bidang Psikologi: 1). *De anima* (perihal jiwa) 3 buku; 2). *Parva Naturalia* (tulisan singkat tentang persoalan alamiah) yang meliputi 8 tulisan:

- a) *De Sensu et Sensibili* (Panca Indra dan Objeknya)
- b) *De Memoria et Reminiscentia* (Ingatan dan Peningkatan)
- c) *De Somno* (Tidur)
- d) *De Insomnis* (Impian-impian)
- e) *De Divinatione per Somnum* (Tenung dengan tidur)
- f) *De Longitudine et Brevitate Vitae* (Panjang Pendeknya Kehidupan Manusia)
- g) *De Vita et Morte* (Kehidupan dan Kematian)
- h) *De respiratione* (Pernapasan)

Keempat, dalam bidang Biologi: 1). *De Partibus Animalium* (Tentang Bagian-bagian Binatang); 2). *De Motu Animalium* (Tentang Gerak Binatang-binatang); 3). *De Incessu Animalium* (Tentang Berjalannya Binatang-binatang); 4). *De Generatione Animalium* (Tentang Kejadian Binatang-binatang). Keempat karya ini menyajikan peninjauan-peninjauan teoretis yang berdasarkan fakta-fakta dalam *Historia Animalium*.

Kelima, dalam bidang Metafisika terdiri dari 14 buku. Namun istilah metafisika tidak digunakan oleh Aristoteles. Sebagai gantinya, ia menggunakan filsafat pertama dan *theologia*.

Keenam, dalam bidang Etika: ¹³ 1). *Ethica Nicomachea* terdiri dari 10 buku, nama ini diberikan karena—menurut kesaksian sejarah—anak Aristoteles yang bernama Nikomakhos telah menyusun karya ini sesudah bapaknya meninggal; 2). *Magna Moralia* (tulisan tentang moral) yang terdiri dari dua buku, namun lebih panjang dari buku biasanya. Karya ini dianggap tidak otentik dan sepertinya berasal dari generasi Lykeion pertama sesudah kematian Aristoteles; 3). *Ethica Eudemia* terdiri dari 7 buku, tetapi buku IV,V dan VI isinya sama dengan buku V,VI dan VII dari *Ethica Nicomachea*. Redaksinya berasal dari pengajaran dari Aristoteles yang kemudian ditulis menjadi *Ethica Nicomachea*, dan oleh hampir semua ahli dianggap karya otentik.

Ketujuh, Bidang politik dan ekonomi: 1). *Politica* 8 buku; 2). *Economica*, yang terdiri dari 3 buku dan secara umum karya ini dianggap tidak otentik.

Kedelapan, Bidang retorika dan poetika: 1). *Rhetorica* 3 buku; 2). *Poetica* bersifat fragmentaris, tetapi dianggap otentik.

Adapun yang akan dieksplorasi dalam bab ini adalah pemikiran Aristoteles tentang etika.

C. Pemikiran Aristoteles tentang Etika

Dalam kumpulan karya Aristoteles, terdapat tiga risalah tentang etika, namun dua diantaranya dianggap sebagai karya murid-muridnya. Karya Aristoteles dalam

¹³Bernard Delfgaauw. 1992. *Sejarah Ringkas Filsafat Barat*. Yogyakarta: Tiara Wacana. h. 30.

bidang Etika:¹⁴ 1). *Ethica Nicomachea* terdiri dari 10 buku. Nama tersebut diberikan karena—menurut kesaksian sejarah—disusun oleh Nikomakhos (anak Aristoteles) setelah bapaknya meninggal; 2). *Magna moralia* (karya dalam bidang moral) terdiri dari dua buku. Namun karya ini dianggap tidak otentik karena berasal dari generasi Lykeion yang pertama sesudah kematian Aristoteles; 3). *Ethica Eudemia* terdiri dari 7 buku, tetapi buku IV,V dan VI isinya sama dengan buku V,VI dan VII dari *Ethica Nicomachea*. Hampir semua ahli menganggap sebagai karya otentik Aristoteles.

Terdapat perbedaan pandangan antara Aristoteles dan plato tentang etika. Plato tidak banyak terpengaruh oleh berbagai keyakinan agama mistik dan tidak mengemukakan teori-teori yang berbeda dari buku *Rebpublic*. Di dalam buku *Ethics*, pembahasan di dalamnya bersifat sistematis dengan sejumlah prinsip dasar bahwa perilaku manusia memang harus diatur.¹⁵

Adapun uraian berikut ini hanya akan dibatasi pada karya yang terakhir, dengan beberapa bagian di dalamnya:

- 1). Kebahagiaan sebagai tujuan;
- 2). Kebahagiaan berdasarkan isinya;
- 3). Ajaran tentang keutamaan;
- 4). Kehidupan ideal.

Berikut ini akan dijelaskan empat bagian pemikiran tersebut.

¹⁴Bernard Delfgaauw. 1992. *Sejarah Ringkas Filsafat Barat*. Yogyakarta: Tiara Wacana. h. 30.

¹⁵Betrand Russell. 2007. *Sejarah* . h. 233.

1. Kebahagiaan sebagai tujuan

Dalam *Ethica Nicomachea*, disebutkan bahwa setiap keterampilan dan ajaran, juga tindakan dan keputusan tampaknya mengejar salah satu nilai.¹⁶ Secara faktual, segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia, mengindikasikan adanya suatu tujuan, sebuah pencarian akan sesuatu yang baik bagi dirinya. Karena ketika manusia melakukan sesuatu, pasti dilatarbelakangi oleh tujuan tertentu. Tujuan itu dikejar karena sebuah nilai, sebuah kebaikan bagi diri manusia, dan seringkali seseorang mengejar suatu tujuan untuk mencapai tujuan yang lain, dan seterusnya.

Pertanyaan yang kemudian muncul adalah apakah ada tujuan yang ingin diraih karena dirinya sendiri, bukan karena serangkaian tujuan yang lain? Apakah ada kebaikan terakhir yang tidak dicari demi sesuatu yang lain lagi? Apakah ada tujuan yang merupakan tujuan akhir? Suatu tujuan tertinggi yang ingin diraih semata-mata hanya karena tujuan tersebut bukan demi tujuan lain, dan semua rangkaian tujuan yang ada sebelumnya mengarah ke tujuan tertinggi tersebut. Tujuan terakhir dan tertinggi merupakan sesuatu yang jika telah tercapai tidak ada lagi yang masih diinginkan. Tujuan terakhir dan tertinggi itu menurut Aristoteles adalah kebahagiaan (*eudaimonia*). Jika manusia sudah bahagia, maka tidak ada yang diinginkannya lagi. Dalam bahasa Aristoteles: "Kebahagiaan selalu dicari demi dirinya sendiri, bukan demi sesuatu yang lain. Karena kebahagiaan mencukupi

¹⁶Franz Magnis Suseso. 2009. *Menjadi Manusia Belajar dari Aristoteles*. Yogyakarta: Kanisius. h.1.

dirinya sendiri, maka apabila seseorang sudah bahagia, tidak ada lagi yang masih diinginkannya”.¹⁷

Menurut Aristoteles, semua orang akan sepakat bahwa tujuan tertinggi—atau dalam terminologi modern disebut makna terakhir hidup manusia—adalah kebahagiaan (*eudaimonia*).¹⁸ Akan tetapi hal ini belum meliputi seluruh persoalan, karena kebahagiaan dipahami secara berbeda oleh masing-masing orang. Ada yang menganggap kesenangan sebagai kebahagiaan, ada juga yang mengatakan bahwa kekayaan merupakan point utama kebahagiaan, bahkan ada pula anggapan bahwa status sosial, reputasi dan popularitas adalah kebahagiaan, dan lain sebagainya.

Akan tetapi bagi Aristoteles, semua itu bukan tujuan terakhir. Seseorang baru dapat mencapai tujuan terakhir apabila dia dapat menjalankan fungsi kemanusiaannya dengan baik, maka ia akan dapat meraih tujuan terakhirnya yakni kebahagiaan.¹⁹ Pertanyaan yang kemudian muncul adalah apakah fungsi kemanusiaan yang khas bagi manusia itu? Apakah kelebihan manusia jika dibandingkan dengan makhluk lain? Menurut Aristoteles, jawabannya adalah akal budi atau rasio.

¹⁷*Eudaimonia* dalam terjemahan bahasa Indonesia adalah kebahagiaan yang sebenarnya agak kurang tepat. *Eudaimonia* dalam bahasa Yunani tidak dimaksudkan suatu perasaan subjektif, tetapi suatu keadaan manusia yang bersifat demikian sehingga segala yang harus ada padanya terdapat pada manusia (*well-being*). K. Bertens. 1999. *Sejarah*. h. 193. Lihat juga Franz Magnis Suseno. 2009. *Menjadi Manusia*. h. 3-4.

¹⁸K. Bertens. 2011. *Etika*. Jakarta: Gramedia. h. 257.

¹⁹K. Bertens. 2011. *Etika*. h. 258.

Dalam pandangan Aristoteles, akal budi adalah kemampuan khas yang hanya dimiliki oleh manusia. Manusia dikatakan berbuat kebajikan sepanjang ia menggunakan akal budinya.²⁰ Bagi Aristoteles, kebaikan segala sesuatuitu terletak pada perwujudan hakekatnya yang tertinggi. Hal ini berlaku juga bagi manusia. Kebaikan tertinggi bagi manusia adalah apabila dia mampu mewujudkan kemampuannya secara optimal. Apabila manusia mengatur kehidupannya berdasarkan rasio dan menjalankan secara optimal kegiatan rasionalnya, maka ia telah memfungsikan dirinya dengan baik. Karenanya prinsip etika Aristoteles mengatakan bahwa setiap tindakan yang mengarah kepada pencapaian tujuan bersifat rasional, sedangkan setiap tindakan yang tidak menunjang tercapainya tujuan manusiadengan sendirinya tidak bersifat rasional. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Aristoteles menggunakan pendekatan analitis-logis dalam menjawab pertanyaan tentang tujuan manusia.

Menurut Franz Magnis-Suseno, Aristoteles adalah filosof pertama yang merumuskan bahwa yang dicari oleh semua orang adalah kebahagiaan. Karena itulah etikanya disebut *Eudaimonia*.²¹ Untuk bisa bahagia, manusia harus menata kehidupannya berdasarkan rasionya. Karena aturan-aturan moralitas bagi Aristoteles bukan sesuatu yang tidak dapat dimengerti atau sesuatu yang diharuskan dari luar, melainkan sesuatu yang rasional atau masuk akal.

²⁰Louis O. Kattsoff. 1996. *Pengantar Filsafat*. Diterjemahkan oleh Soejono Soemargono dari "Elements of Philosophy". Yogyakarta: Tiara Wacana. h.368.

²¹Lihat juga Franz Magnis Suseso. 2009. *Menjadi Manusia*. h. 4.

Jalan yang harus ditempuh oleh manusia untuk mendapatkan kebahagiaan adalah hidup secara bermoral. Dengan demikian, tujuan moralitas adalah mengantarkan manusia ke arah tujuan terakhirnya yakni kebahagiaan.

Terdapat dua tujuan manusia yang oleh Aristoteles dibedakan secara tegas yaitu tujuan sementara dan tujuan akhir.²² Tujuan sementara adalah sebuah tujuan yang ingin dicapai untuk tujuan lain atau tujuan berikutnya. Dapat juga dikatakan bahwa tujuan sementara adalah sarana atau alat untuk mencapai tujuan berikutnya, dan seterusnya. Jadi terdapat serangkaian tujuan yang saling terkait satu sama lain hingga sampai pada tujuan akhir. Adapun tujuan akhir manusia adalah kebahagiaan.

Selain itu Aristoteles juga menjelaskan bahwa terdapat beberapa tujuan yang menurutnya tidak tepat atau keliru, yaitu harta atau kekayaan dan popularitas. Pertama, bagi Aristoteles kekayaan hanyalah sarana, bukan tujuan pada dirinya sendiri, karena tidak ada jaminan bahwa orang yang kaya adalah orang yang bahagia. Apabila seseorang mengarahkan seluruh hidupnya untuk mendapatkan kekayaan, justru ia tidak akan mencapai tujuannya. Kedua, popularitas merupakan sesuatu dalam pandangan orang lain, bukan dalam diri orang yang bersangkutan. Seseorang bisa saja populer meskipun tidak memiliki kualitas atau prestasi dalam bidang tertentu. Namun apabila orang tersebut populer sebagai implikasi dari kualitas dirinya atau prestasinya, maka yang harus

²²K. Bertens. 1999. *Sejarah*. h. 192-193. Lihat juga Franz Magnis Suseno. 2009. *Menjadi Manusia*. h. 3.

dusahakan adalah prestasinya tersebut, bukan popularitasnya.

Meskipun demikian, perlu diperhatikan pula bahwa kebahagiaan bukanlah sesuatu yang bisa diusahakan secara langsung. Karena sifat kebahagiaan adalah diberikan bukan direbut. Kebahagiaan dapat diperoleh manusia apabila ia menjalani kehidupannya dengan melakukan sesuatu yang mendukung kebahagiaannya. Dengan kata lain, yang harus diusahakan adalah melakukan sesuatu dalam hidup yang mendukung kebahagiaan, bukan kebahagiaan itu sendiri. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah semacam apakah hidup yang bisa mengarah kepada kebahagiaan?

2.Kebahagiaan berdasarkan isinya

Kebahagiaan bukan merupakan sesuatu potensialitas belaka, karena kebahagiaan bersifat aktualitas. Manusia dikatakan sempurna sebagai manusia apabila mampu mengaktualisasikan potetnsi tertinggi yang terdapat dalam dirinya yakni rasio. Oleh karenanya, kebahagiaan bagi manusia dapat diartikan menjalankan aktivitas spesifik baginya yakni pemikiran. Pemikiran merupakan aktivitas jiwa yang dapat mengarah pada kebahagiaan.

Aristoteles mengikuti pendapat Plato yang menjelaskan bahwa jiwa terbagi menjadi dua, yakni rasional dan irrasional. Bagian yang irrasional terdiri dari vegetatif (terdapat pada tumbuhan) dan apetitif (terdapat pada binatang).²³ Bagian apetitif sampai taraf tertentu bisa

²³Betrand Russell. 2007. *Sejarah* . h.234.

rasional, apabila kebaikan yang dicari berdasarkan pada pertimbangan nalar. Namun apabila dihubungkan dengan konsep keutamaan, maka hal ini akan menjadi persoalan esensial, karena nalar dalam pemikiran Aristoteles bersifat kontemplatif, dan tanpa bantuan aspek appetitif tidak dapat mengarah pada kegiatan praktis apa pun.

Bagi manusia, kebahagiaan ialah memandangi kebenaran (*theoria: contemplation*). Menurut Franz Magnis-Suseno, berfilsafat adalah kegiatan orang yang ber-*theoria*.²⁴ Magnis menjelaskan bahwa *theoria* bukan berarti pandangan teoritis terhadap suatu masalah sebagaimana teori dalam terminologi modern. Karena *theoria* bagi orang Yunani adalah “memandang”, dalam artian refleksi kritis, kontemplasi atau merenungkan suatu realitas abadi, realitas tertinggi yang tak berubah yakni realitas Ilahi. Dalam *theoria*, manusia mengarahkan diri kepada realitas yang abadi—realitas tertinggi yang mengatasi dirinya sehingga memperoleh *sophia* (kebijaksanaan). Jadi manusia yang ber-*theoria* disebut seorang *philo-sophos* (seorang pecinta kebijaksanaan), seorang filosof. Dengan demikian, filsafat merupakan sebuah kegiatan reflektif-kontemplatif, memandangi dengan penuh kekaguman realitas tertinggi, sesuatu yang mengatasi diri manusia, sebuah realitas abadi yang bersifat Ilahiah—dan inilah sebuah kebahagiaan.

Untuk bisa mencapai kebahagiaan, manusia juga harus menjalankan aktivitasnya berdasarkan keutamaan

²⁴Franz Magnis-Suseno. 2009. *Menjadi Manusia Belajar dari Aristoteles*. Yogyakarta: Kanisius. h.26.

(*areté*),²⁵ yakni dengan “dipaksa” untuk menerima kebiasaan yang baik. Kebiasaan baik tidak cukup hanya dilakukan secara temporer saja, melainkan menjadikan perilaku tersebut sebagai kebiasaan yang selalu ditingkatkan intensitasnya hingga menjadi suatu sikap dan tindakan yang tetap. Apabila kebiasaan baik telah dilakukan secara kontinu dengan intensitas berulang dan mendarah daging dalam diri seseorang, maka dia akan mendapatkan kenikmatan dalam menjalankan tindakan-tindakannya tersebut.

Kenikmatan dalam pandangan Aristoteles tersebut tidak dapat dilepaskan dari etika filosofis. Mengingat tujuan etika filosofis adalah untuk menemukan pertimbangan rasional sebagai dasar dari moralitas seseorang. Sementara moralitas merupakan fenomena khas manusiawi yang esensial, sehingga untuk bisa menjadi orang yang baik, manusia harus mengatur kehidupannya. Jadi semua yang dilakukan oleh manusia menggunakan pertimbangan paling rasional sebagai dasar kehidupan bermoral dengan mengarahkannya pada kebahagiaan. Dengan sendirinya sesuatu yang harus diusahakan oleh manusia adalah tingkah laku yang menghasilkan kebahagiaan.

Menurut penjelasan Epicuros (341-270): “kalau kamu ingin bahagia, hindarilah perasaan sakit dan usahakan rasa nikmat”.²⁶ Dalam filsafat, pandangan demikian disebut *hedonisme* (dari bahasa Yunani *hedone*: nikmat, kegembiraan). Akan tetapi dalam perspektif

²⁵K. Bertens. 1999. *Sejarah*. h. 194.

²⁶Fuad Hassan. 2001. *Pengantar Filsafat Barat*. Jakarta: Pustaka Jaya. h. 50.

religius, mengejar kenikmatan sebagai dasar hidup bermoral memunculkan banyak pertanyaan. Karena semua agama mengajarkan kepada manusia agar tidak menurutkan keinginan hawa nafsunya semata-mata. Kenikmatan tidak boleh dikejar sedemikian rupa kecuali dengan persyaratan ketat (misalnya nikmat seksual hanya dibenarkan dalam rangka perkawinan). Bahkan dalam keyakinan keagamaan, apabila manusia hanya mengejar kenikmatan, maka dia kelak akan menjadi penghuni neraka.

Akan tetapi pertanyaan yang kemudian muncul adalah: Apakah hanya karena alasan agama, kehidupan seseorang dengan mengejar kenikmatan dan menghindari rasa sakit sebagai tujuan hidup harus ditolak? Ataukah memang di dalam tujuan hidup tersebut implisit terdapat sesuatu yang tidak benar? Apakah dasar penerimaan seseorang mematuhi apa yang dilarang agama hanya karena telah disebutkan di dalam kitab suci semata-mata, ataukah secara rasional dapat dipahami? Jika demikian, bagaimanakah rasionalitas yang dapat dijelaskan terkait pencapaian kenikmatan dan penghindaran rasa sakit sebagai tujuan akhir hidup manusia?

Dalam pandangan Aristoteles, hedonisme tidak dibenarkan karena menerapkan cara hidup binatang, sehingga kehidupan tersebut tidak bersifat rasional. Di dalam hedonisme juga tidak terdapat perbedaan antara kehidupan manusia dan binatang, karenanya menerapkan kehidupan seperti itu sangat memalukan. Aristoteles menyebutkan ada tiga pola hidup yang membawa kepuasan dalam dirinya sendiri yakni hidup mengejar

kenikmatan, berpolitik, dan berfilsafat.²⁷ Meskipun demikian, pandangan Aristoteles tentang nikmat dan rasa sakit tidak sesederhana itu.

Aristoteles menjelaskan bahwa nikmat merupakan salah satu unsur penting dalam segala aspek kehidupan moral, akan tetapi bukan merupakan tujuan pada dirinya sendiri. Karena itu, ada tiga hal yang perlu diperhatikan dalam hal ini:²⁸ *Pertama*, nikmat dan perasaan sakit bukanlah sesuatu yang dapat diabaikan begitu saja, karena berperan penting dalam mengantarkan seseorang menuju kehidupan yang baik terutama dalam meraih keutamaan etis. Kedua kekuatan tersebut menurut Aristoteles harus dimanfaatkan oleh seseorang agar dalam mengembangkan diri, dia semakin merasas nikmat untuk bertindak berdasarkan keutamaan dan merasa semakin tidak nyaman dan merasa sakit apabila ia mengikuti keinginan hawa nafsunya. Dengan sendirinya, implikasi hal ini jika diterapkan dalam pendidikan karakter maka seseorang akan dapat berperilaku baik dengan cara menyenangkan tanpa pemaksaan, sebagai implementasi dari keutamaan. Sebaliknya, apabila seseorang berperilaku tidak baik maka akan menimbulkan perasaantidak nyaman, tidak enak, dan merasa sakit dalam dirinya sendiri. Dengan demikian, manusia utama adalah orang yang merasa nikmat apabila melakukan perbuatan baik, dan sebaliknya merasa sakit atau tidak enak jika melakukan perbuatan yang tidak baik.

Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa substansi dari keutamaan moral yang harus dikembangkan

²⁷Franz Magins-Suseno. 2009. *Menjadi Manusia*. h. 14.

²⁸Franz Magins-Suseno. 2009. *Menjadi Manusia*. h. 14-20.

adalah perbuatan baik itu sendiri yang dapat menimbulkan perasaan nyaman dan menyenangkan, sedangkan perbuatan buruk membawa implikasi sebaliknya, yakni tidak menyenangkan dan meninggalkan perasaan sakit. Dengan kata lain, dimensi rasa batin atau dimensi hati menjadi sesuatu yang diprioritaskan karena darinya dapat memunculkan perasaan senang dan membawa kenikmatan dalam hati apabila berbuat baik, dan sebaliknya jika berbuat tidak baik, maka akan muncul perasaan “sakit” (malu, tidak nyaman, dan bersalah). Melalui olah rasa dalam dimensi batin tersebut, seseorang secara senang hati dan tanpa ada paksaan, akan dapat belajar berbuat baik secara mudah dan menyatakan penolakan terhadap hal-hal yang buruk dan memalukan, inilah yang disebut Aristoteles sebagai keutamaan.

Kedua, kenikmatan bukanlah sesuatu yang dapat berdiri sendiri karena kenikmatan baru bisa diperoleh sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukan. Dengan kata lain, munculnya kenikmatan merupakan implikasi dari suatu perbuatan, dan selalu berkaitan dengan suatu perbuatan. Karenanya, hasil dari suatu perbuatan tersebut timbul beberapa macam kenikmatan dan perasaan sakit. Selain itu, kualitas dari suatu perbuatan akan menentukan kualitas kenikmatan. Apabila seseorang melakukan perbuatan yang luhur, maka kenikmatan yang diperoleh berupa keluhuran, dan sebaliknya perbuatan yang keji akan memberikan kenikmatan yang keji pula. Dengan demikian, prinsip hidup yang mengejar kenikmatan dan menghindari perasaan sakit merupakan sesuatu yang tidak rasional, karena yang bisa diusahakan dan dihindari adalah

perbuatan tertentu, bukan kenikmatannya atau perasaan sakitnya.

Ketiga, seseorang akan dapat merasakan kenikmatan apabila dia telah berhasil menyelesaikan pekerjaannya. Kenikmatan itu muncul sebagai akibat terselesaikannya suatu pekerjaan. Namun, jika yang diinginkan dan diusahakannya adalah kenikmatan itu sendiri, maka nikmat tidak akan bisa didapatkan, kecuali nikmat indrawi (makan, minum, dan seksual). Nikmat semacam itu memang dikejar untuk dirinya sendiri, akan tetapi nikmat yang luhur akan tertutup dari manusia karena hal itu merupakan cara hidup binatang.

Keempat, kebahagiaan dapat diperoleh tidak dengan cara mengejar kenikmatan dan menghindari perasaan sakit. Namun yang harus dilakukan untuk memperoleh kebahagiaan adalah perbuatan yang bermakna. Jika perbuatan bermakna telah dilakukan, dengan sendirinya nikmat akan diperoleh. Dengan demikian, jika manusia ingin dapat menikmati hidup dan mencapai kehidupan yang bermutu, maka harus melakukan perbuatan yang bermakna yaitu perbuatan yang berkeutamaan, bukan kenikmatan itu sendiri.

3. Ajaran tentang Keutamaan

Aristoteles tidak sependapat dengan pemikiran Sokrates dan Plato tentang keutamaan (*areté*) yang disamakan dengan pengetahuan yang bisa diajarkan. Menurut Aristoteles, keutamaan tidak hanya sekedar pengetahuan, melainkan harus dijalankan.²⁹Jadi prosesnya

²⁹K. Bertens. 1999. *Sejarah*. h. 196.

harus dimulai dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Dengan sendirinya, kebiasaan tersebut secara lambat-laun terbentuk dalam watak dan selanjutnya perbuatan-perbuatan akan dilakukan karena keutamaan.

Keutamaan berkaitan dengan dua fungsi rasio yaitu keutamaan intelektual dan keutamaan moral. Keutamaan intelektual adalah keutamaan yang dapat menyempurnakan rasio, sedangkan keutamaan moral adalah keutamaan yang dapat mengatur watak. Keutamaan intelektual diperoleh melalui pengajaran, sedangkan keutamaan moral berasal dari kebiasaan.³⁰Melalui keutamaan moral, rasio akan menjalankan pilihan perbuatan yang terkait dengan kehidupan sehari-hari.

Berikut ini penjelasan tentang kedua keutamaan tersebut:

a. Keutamaan intelektual(*sophia/wisdom*)

Di dalam menjelaskan keutamaan intelektual ini Aristoteles terlebih dahulu menjelaskan bahwa rasio manusia mempunyai dua fungsi yaitu rasio teoritis yakni sebuah potensi atau kemampuan yang memungkinkan manusia dapat mengetahui kebenaran dan rasio praktis yakni potensi atau kemampuan untuk mengetahui apa yang harus diputuskan dalam keadaan tertentu, serta bertindak berdasarkan pertimbangan yang tepat. Kedua fungsi rasio ini berimplikasi pada adanya dua macam keutamaan yang berhubungan dengan penyempurnaan rasio yakni kebijaksanaan teoritis dan kebijaksanaan praktis. Kebijaksanaan teoritis disebut Aristoteles dengan

³⁰Bertrand Russell. 2007. *Sejarah*. h.234. Lihat juga K. Bertens. 2011. *Etika*. h. 258.

istilah *sophia/wisdom* atau kearifan yang hanya dimiliki oleh orang-orang terpelajar. Jadi jalan menuju pada kebijaksanaan teoritis tersebut adalah suatu jalan panjang yang meliputi seluruh pendidikan ilmiah.

Rasio selanjutnya menentukan jalan tengah antara dua posisi ekstrem yang berlawanan. Dengan kata lain, keutamaan adalah keseimbangan antara sesuatu yang kurang dan sesuatu yang berlebihan. Keutamaan ini disebut kebijaksanaan praktis yang diistilahkan *phronesis* (Inggris: *prudence*).³¹ Kebijaksanaan praktis adalah kebijaksanaan dalam kehidupan sehari-hari, kelakuan bijaksana, dan menghadapi persoalan secara bijaksana. Jadi mengambil keputusan bijaksana yaitu keputusan dengan mempertimbangkan keutamaan dalam suatu situasi kongkret, sehingga keutamaan ini merupakan inti seluruh kehidupan moral.

b. Keutamaan moral

Aristoteles menekankan keutamaan moral melalui jalan tengah di antara dua posisi ekstrem sebagaimana diuraikan di atas. Keutamaan moral yang sejati selalu disertai kebijaksanaan moral.³² Aristoteles menggambarkan keutamaan moral sebagai suatu sikap watak yang memungkinkan manusia untuk memilih jalan tengah antara dua posisi ekstrem yang berlawanan. Setiap keutamaan adalah suatu pertengahan diantara dua posisi ekstrem, yang masing-masing buruk.³³ Ini dibuktikan dari pengujian terhadap beraneka macam keutamaan. Misalnya:

³¹K. Bertens. 2011. *Etika*. h. 258.

³²K. Bertens. 1999. *Sejarah*. h. 199.

³³K. Bertens. 1999. *Sejarah*. h. 196. Lihat juga Bertrand Russell. 2007. *Sejarah*. h.235.

keberanian adalah posisi tengah di antara sikap gegabah dan sikap pengecut; kemurahan hati adalah posisi tengah di antara kekikiran dan pemborosan; dermawan adalah posisi tengah di antara sifat boros dan sifat kikir; harga diri adalah posisi tengah di antara kecongkakan dan kerendahan diri; kerendahan hati adalah posisi tengah di antara sikap malu-malu dan sikap tak kenal malu, dan lain-lain.

Menurut Aristoteles, pemilihan posisi pertengahan harus dipandang secara subjektif, karena tidak dapat diberlakukan secara general untuk semua orang. Hal ini karena ketidakmungkinan menentukan ukuran pertengahan antara dua sikap ekstrem secara matematis, dengan faktor pribadi sebagai bahan pertimbangan. Dengan demikian, hidup menurut keutamaan tidak merupakan suatu persoalan teoritis melainkan persoalan praktis. Orang yang bijaksana dalam keutamaan moral akan mampu menentukan pertengahan antara kekurangan dan kelebihan dengan mempertimbangkan keadaan kongkret.

4. Kehidupan Ideal

Dalam *Ethica Nicomachea* Aristoteles menjelaskan tentang unsur terpenting dalam kebahagiaan manusia adalah “memandang” kebenaran. Pandangan Aristoteles tidak berbeda jauh dari pemikiran Plato bahwa tidak ada orang yang mempunyai cara hidup lebih luhur daripada filosof. Filosoflah yang mengenal kebenaran dengan memandang ide-ide. Meskipun Aristoteles menolak ide-ide, akan tetapi ia mengakui juga bahwa *theoria* (memandang

kebenaran) adalah aktivitas manusia yang paling tinggi.³⁴ Jadi hidup yang bahagia ialah hidup sebagai filosof. Karena rasio merupakan unsur Ilahi dalam diri manusia, maka dapat dikatakan bahwa menjalankan aktivitas rasio merupakan cara hidup Ilahiah. Oleh karena itu filosof sedapat mungkin akan memelihara hidup Ilahi itu dengan mengabaikan hal-hal manusiawi belaka. Dengan hidup seperti itu, maka filosof adalah teman karib dari para dewa.

Kebahagiaan bersumber dari aktivitas yang utama, dan kebahagiaan yang sempurna bersumber dari aktivitas yang terbaik, yang bersifat pemikiran. Berpikir lebih utama daripada perang, politik, atau kegiatan praktis lainnya, sebab berpikir masyarakatkan kesenggangan, dan kesenggangan penting untuk mencapai kebahagiaan. Keutamaan praktis hanya menghasilkan kebahagiaan jenis kedua, kebahagiaan tertingi tercapai berkat kegiatan akal, sebab akal lebih dari segala hal lainnya, adalah hakikat manusia. Manusia tak dapat sepenuhnya kontemplatif, namun sejauh dia berkontemplasi maka ia mengambil bagian dalam kehidupan ilahi.

Manusia yang berbudi luhur haruslah sungguh-sungguh baik, dan keluhuran dalam setiap perbuatan hendaknya menjadi sifat orang yang berbudi luhur. Orang yang berbudi luhur tidak selayaknya melarikan diri dari bahaya, berpangku tangan, atau menyalahkan orang lain. Keluhuran budi adalah semacam mahkota bagi keutamaan. Sebab keluhuran budi tak mungkin tercipta tanpa sikap yang terhormat dan kebaikan sifat. Manusia yang berbudi luhur terutama peduli terhadap kehormatan dan kehinaan,

³⁴K. Bertens. 1999. *Sejarah*. h. 201.

dan terhadap kehormatan yang luhur dan diberikan oleh orang-orang yang baik ia akan merasa cukup senang, menganggap bahwa dengan itu ia tampil sesuai dengan dirinya sendiri atau bahkan kurang dibandingkan dirinya sendiri, sebab tak ada kehormatan senialai dengan keutamaan yang sempurna.

Pendapat Aristoteles tentang persoalan-persoalan moral tidak lain adalah pandangan konvensional pada zamannya. Pemikiran tentang keutamaan yang disebutkan Aristoteles tersebut bukan semata-mata hasil pemikirannya, melainkan dilatarbelakangi oleh pandangan etis masyarakat Yunani pada waktu itu. Selain itu juga mencerminkan pandangan kaum elit dalam masyarakat Athena dimana Aristoteles hidup.³⁵ Karenanya dalam hal-hal tertentu tidak bisa berlaku secara general bagi setiap kebudayaan dan periodisasi sejarah lainnya.

³⁵K. Bertens. 2011. *Etika*. h. 259.

BAB IV KORUPSI DALAM TINJAUAN

A. Pengertian Korupsi

Secara sederhana, korupsi dapat didefinisikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan dan kepercayaan untuk keuntungan pribadi.¹ Sedangkan secara leksikal, istilah korupsi berasal dari bahasa latin *corruptio* atau *corrupus* (Inggris: *corruption* atau *corrupt*; Perancis: *corruption*; Belanda: *corruptie (korrupctie)*, yang berarti kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah.²

Secara etimologis, definisi *korupsi* dalam dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan, organisasi, yayasan dan lain-lain) untuk keuntungan pribadi atau orang lain.³ Dalam kamus lengkap *Webster's Third New International Dictionary* adalah ajakan (dari seorang pejabat politik) dengan pertimbangan-pertimbangan yang tidak semestinya (misalnya suap) untuk melakukan pelanggaran tugas.⁴ Sedangkan dalam kamus hukum, korupsi berarti suatu perbuatan buruk, busuk, bejat, suka

¹ Jeremy Pope. 2003. *Strategi Memberantas Korupsi: Elemen Sistem Integritas Nasional*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia. h. 6.

² Andi Hamzah. 2005. *Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Nasional dan Internasional*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. h. 4.

³Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. h. 736.

⁴Robert Klitgaard. 2001. *Membasmi Korupsi*. Diterjemahkan oleh Hermoyo. Jakarta: Yayasan Obor. h. 29.

disuap, perbuatan yang menghina atau memfitnah, menyimpang dari kesucian, tidak bermoral.⁵

Terkait beberapa definisi di atas, dalam pandangan Max Weber⁶ tidak seharusnya seseorang memulai pembahasan tentang korupsi dengan suatu definisi. Akan tetapi yang harus dilakukan adalah menderivasikan definisi yang ada sesuai dengan contoh khusus—yang bagaimanapun juga, tidak akan pernah menjadi definisi akhir, melainkan sebuah definisi yang disesuaikan dengan maksud dan tujuansebuah pembicaraan. Jadi sebuah definisi harus tersusun dari masing-masing bagian yang diambil dari realitas sejarah. Dengan demikian konsep final dan definitif tidak mungkin terdapat pada awal pembahasan, melainkan baru akan muncul di akhir pembahasan. Bahkan lebih penting dari itu, rumusan konseptual yang terbaik ketika memberikan analisis dan penjelasan historis terhadap apa yang dilakukan, tentunya bukan sekedar definisi konseptual, melainkan hanya sekedar deskripsi sementara—sekurang-kurangnya pada awalnya.

Sekedar memberi sedikit gambaran tentang arti korupsi, menurut Baharuddin Lopa *corruption* ialah *the offering and accepting of bribes* (penawaran/pemberian hadiah-hadiah berupa suap). Selain itu, korupsi juga berarti “*decay*” (kebusukan/kerusakan) yakni mengacu kepada

⁵ Andi Hamzah. 1986. *Kamus Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia. h. 339.

⁶Robert Klitgaard. 2001. *Membasmi Korupsi*. Diterjemahkan oleh Hermoyo. Jakarta: Yayasan Obor. h. 31.

moral oknum yang melakukan perbuatan korupsi.⁷ Penjelasan yang sama juga disampaikan oleh Kartini Kartono, bahwa korupsi adalah tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan guna mengeruk keuntungan pribadi dan/kelompok yang dapat merugikan kepentingan umum dan negara.⁸ Korupsi juga didefinisikan sebagai tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi sebuah jabatan negara karena keuntungan status atau uang yang menyangkut pribadi (perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri); atau melanggar aturan-aturan pelaksanaan beberapa tingkah laku pribadi.⁹ Dengan demikian dapat dikatakan bahwa korupsi mengandung unsur-unsur penyalahgunaan wewenang atau jabatan untuk kepentingan pribadi, melalui penerimaan hadiah tertentu untuk tujuan tertentu.

Dalam bahasa Arab, korupsi disebut *risywah* yang berarti penyuapan atau uang suap. Korupsi juga mengindikasikan sebuah tindakan merusak dan berkhianat yang disebut *fasad (ifsad)* dan *ghulul*.¹⁰ Secara umum, gambaran makna korupsi terdapat pada beberapa kata berikut. Pertama, *risywah*. Secara etimologi, *risywah* berasal dari يرشو – يرش yang masdar atau verbal nounnya bisa dibaca رشوة, رَشْوَة, رُشْوَة, berarti upah, hadiah, komisi

⁷ Baharuddin Lopa. 1997. *Masalah Korupsi dan Pemecahannya*. Jakarta: PT. Kipas Putih Aksara. h. 1.

⁸Maghfur Ahmad, dkk.2011.*Islam dan Perubahan Sosial, Respon Terhadap Isu-isu Korupsi, Kemiskinan dan Lingkungan Hidup*. Pekalongan: STAIN Pekalongan Press. h. 76.

⁹Robert Klitgaard. 2001. *Membasmi Korupsi*. Diterjemahkan oleh Hermoyo. Jakarta: Yayasan Obor. h. 31.

¹⁰ Ahmad Warsono Munawir.1884.*Kamus al-Munawir Arab – Indonesia*. Yogyakarta: Pongpes Krapyak al-Munawir. h. 537.

atau suap. Ibnu manzur juga mengemukakan penjelasan dari Abul Abas tentang makna kata *risywah* yang mengatakan bahwa kata *risywah* terbentuk dari kalimat رشا الفرخ yang berarti anak burung yang merengek ketika mengangkat kepalanya agar disuapi oleh induknya.¹¹ Adapun secara terminologi *risywah* adalah sesuatu yang diberikan dalam rangka mewujudkan kemaslahatan atau sesuatu yang diberikan dalam rangka membenarkan yang batil/salah atau menyalahkan yang benar.¹²

Kedua, *ghulul*. Secara etimologis kata *ghulul* berasal dari kata kerja يغلل غل yang masdarnya ada beberapa pola yaitu: الغل-الغلة-الغلل-الغليل yang semuanya itu diartikan Ibnu Manzur dengan شدة العطس وحرارته sangat kehausan dan kepanasan.¹³ Dalam *al-Mu'jam al-Wasit*, kata *ghulul* berasal dari kata kerja غل-يغلل yang berarti خان في المغنم وغيره berkhianat dalam pembagian harta rampasan perang atau dalam harta-harta lain.¹⁴

Ketiga, *ghashab* (mengambil paksa hak orang lain). Secara etimologis, *ghashab* berasal dari kata kerja غصب غصباً (mengambil sesuatu secara paksa dan dzalim). Secara terminologis, *ghashab* didefinisikan sebagai upaya untuk menguasai hak orang lain secara permusuhan/terang-terangan.¹⁵ Sedangkan

¹¹ Ibnu Manzur. *Lisan al-Arab*. Beirut: Dar Sadir. Jilid. 14. h. 322.

¹² Muhammad Nurul Irfan. 2009. *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dalam Perspektif Fikih Jinayah*. Jakarta: Litbang Departemen Agama RI Badan. h.89.

¹³ Ibni Mandzur. 1119. *Lisan al-Arab*. Jilid II. Kornais al-Niil: Daar al-Ma'arif. h.3285.

¹⁴ Muhammad Nurul Irfan. 2009. *Tindak Pidana*. h. 94.

¹⁵ Muhammad Nurul Irfan. 2009. *Tindak Pidana*. h. 105.

secara terminologis berarti upaya untuk menguasai hak orang lain secara permusuhan/terangan-terangan. *Ghashab* adalah mengambil atau menguasai harta/hak orang lain tanpa izin pemiliknya dengan adanya unsur pemaksaan dan terkadang dengan adanya kekerasan serta dilakukan secara terang-terangan.¹⁶

Keempat, *sariqah* (pencurian). Secara etimologi *sariqah* adalah bentuk masdar dari kata kerja سرق يسرق سَرْقاً yang berarti أخذ ماله خفية و حيلة سرقة yang berarti mengambil harta milik seseorang secara sembunyi-sembunyi dan dengan tipu daya. Sedangkan secara terminologis *sariqah* dalam syari'at Islam adalah mengambil sejumlah harta senilai sepuluh dirham yang masih berlaku, disimpan pada tempat penyimpanannya atau dijaga seorang mukallaf secara sembunyi-sembunyi serta tidak terdapat unsur subhat.¹⁷

Kelima, *hirabah* (perampokan). Secara etimologis *hirabah* adalah bentuk masdar dari kata kerja حارب يحارب محاربة حراية yang berarti قاتله yakni "memerangi". Secara terminologis, *muharib* atau *qutta'u al-tariq* adalah mereka yang melakukan penyerangan dengan membawa senjata tajam kepada suatu komunitas orang sehingga para pelaku merampas harta kekayaan mereka di tempat-tempat terbuka secara terang-terangan.¹⁸ Secara etimologis *hirabah* adalah bentuk masdar dari حارب يحارب محاربة وحرية yang berarti قاتله memerangi atau dalam kalimat حارب الله berarti seseorang bermaksiat kepada Allah. Adapun secara terminologis, *muharib* atau *qutta'u al-tariq* adalah

¹⁶Muhammad Nurul Irfan. 2009. *Tindak Pidana*.h.125.

¹⁷Muhammad Nurul Irfan. 2009.*Tindak Pidana*.h.117.

¹⁸Muhammad Nurul Irfan. 2009.*Tindak Pidana*.h.122.

melakukan penyerangan dengan membawa senjata kepada sebuah komunitas orang, sehingga para pelaku merampas harta kekayaan mereka ditempat-tempat terbuka secara terang-terangan.

Definisi-definisi di atas tidaklah statis, karena pemahaman masyarakat tentang apa yang disebut *corrupt* tersebut semakin berkembang. Sepanjang perjalanan waktu masyarakat lambat laun mampu membuat pembedaan yang lebih tajam antara suap dan tindakan timbal balik atau transaksi dan semakin mampu membuat pembedaan-pembedaan ini berlaku dalam praktek. Dan dalam setiap zaman, suatu masyarakat cenderung menemukan sekurang-kurangnya empat definisi yang berbeda: definisi dari kaum moralis, definisi hukum sebagaimana tertulis, definisi hukum sejauh ditegakkan, dan definisi praktek yang lazim.¹⁹

Secara historis konsep tersebut merujuk sekaligus pada tingkah laku politik dan seksual. Kata latin *corruptus*, *corrupt* menimbulkan serangkaian gambaran jahat, berarti apa saja yang merusak keutuhan—di dalam kata tersebut terdapat indikasi moral. Dengan demikian, bisa diidentifikasi bahwa apapun asal kata dan definisi maupun makna dari kata korupsi, implisit di dalamnya suatu bentuk dari tindak kejahatan yang mengandung dua unsur di dalamnya yakni pemberian dan penerimaan suap.

Dari penjelasan tersebut dapat digarisbawahi bahwa terdapat dua hal yang tidak bisa dilepaskan yakni pemberian suap dan penerimaan suap yang keduanya

¹⁹Robert Klitgaard. 2001. *Membasmi Korupsi*. Diterjemahkan oleh Hermoyo. Jakarta: Yayasan Obor. h. 32.

disebut koruptor. Selain itu, Transparency Internasional memasukkan tiga unsur korupsi yaitu: penyalahgunaan kekuasaan (*a misuse of power*), kekuasaan yang dipercayakan (*a power that is entrusted*), dan keuntungan pribadi (*a private benefit*), keluarga maupun kerabat dekat lainnya. Definisi lain yang lebih spesifik pada unsur pemerintah diberikan oleh JJ. Senturia, bahwa korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan pemerintahan untuk keuntungan pribadi.²⁰

Akan tetapi secara faktual, korupsi tidak hanya dilakukan oleh pegawai pemerintahan melainkan juga dilakukan oleh pihak swasta, pejabat publik seperti politisi, pegawai negeri, dan lain-lain yang ingin memperkaya diri dengan cara melanggar hukum. Dengan demikian korupsi bisa dilakukan oleh tenaga struktural, fungsional, maupun peserta didik (mahasiswa) yang terlibat dalam sebuah kepengurusan untuk memperoleh keuntungan baik untuk dirinya sendiri, keluarga, maupun kerabat dekat lainnya.²¹

Menurut Bakir Ihsan²² ada tiga level dalam korupsi. Pertama, tindakan pengkhianatan terhadap kepercayaan (*betrayal of trust*). Ini adalah bentuk korupsi yang paling sederhana dalam kehidupan sehari-hari akibat nilai-nilai menyimpang yang terintrodusir di alam bawah sadar maupun karena intensitas internalisasi budaya korupsi. Dalam hal ini semua orang yang berkhianat atau

²⁰Bakir Ihsan. 2006. "Pengertian Korupsi dan Prinsip-prinsip Antikorupsi" dalam Karlina Helmanita dan Sukron Kamil (Ed). *Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi*. Jakarta: CSRC. h. 27-28.

²¹Jeremy Pope. 2003. *Strategi Memberantas Korupsi: Elemen Sistem Integritas Nasional*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia. h. 49.

²²Bakir Ihsan. 2006. "Pengertian. h. 29.

mengkhianati kepercayaan atau amanat yang diterimanya dikategorikan sebagai korupsi.

Kedua, semua tindakan penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*), meskipun pelakunya tidak mendapatkan keuntungan material. Jika pada level pertama korupsi berlangsung pada ranah (budaya) publik, maka pada level kedua berlangsung pada wilayah kekuasaan meskipun tidak memperoleh keuntungan materi. Korupsi disini terkait dengan struktur kekuasaan, baik pada tingkat negara maupun lembaga struktural lainnya, termasuk pendidikan.

Ketiga, korupsi dalam bentuk tindakan penyalahgunaan kekuasaan untuk mendapatkan keuntungan material (*material benefit*) yang bukan haknya. Korupsi tidak hanya terkait dengan penyimpangan kekuasaan atau wewenang, namun juga mengambil keuntungan material, baik bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Korupsi pada tingkat ini merupakan hal yang membahayakan karena melibatkan kekuasaan dan keuntungan material.

Korupsi menjadi ancaman yang sangat serius ketika berlangsung pada ranah struktural dengan mencari keuntungan material melalui keterlibatan kekuasaan yang dimiliki. Pada titik ini korupsi tidak hanya merugikan keuangan, tapi menyelewengkan kekuasaan dan wewenang untuk kepentingan pribadi maupun orang terdekat. Kenyataan ini akan merusak tatanan sosial kemasyarakatan maupun eksistensi sebuah lembaga, bahkan eksistensi negara bangsa. Itulah sebabnya dalam bentuk yang ekstrem, korupsi dapat menjadi cikal bakal terjadinya konflik dan disintegrasi, karena adanya

pengebirian dan distorsi atas hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh masyarakat.

B. Latar Belakang Timbulnya Korupsi

Terdapat beberapa pendapat terkait faktor-faktor yang melatarbelakangi timbulnya korupsi.²³ Menurut Sarlito Wirawan Sarwono ada dua hal yang melatarbelakangi terjadinya korupsi, yaitu faktor internal dan eksternal:1). Faktor internal merupakan dorongan dari dalam diri sendiri (keinginan, hasrat, dan kehendak, dan lain-lain), 2). Faktor eksternal atau rangsangan dari luar (dari teman, adanya kesempatan, kurangnya kontrol, dan sebagainya). Berbeda dari itu, menurut Andi Hamzah latar belakang korupsi lebih rinci dan bersifat faktual, yakni: 1). Ketidakseimbangan gaji pegawai negeri dengan kebutuhan yang semakin meningkat, 2). Kultur masyarakat yang memicu meluasnya tindakan korupsi, 3). Manajemen yang kurang baik dan kontrol yang kurang efektif dan efisien, sehingga berpeluang bagi seseorang untuk melakukan korupsi, 4). Modernisasi. Sedangkan menurut Dzuriyatun Toyibah, faktor-faktor penyebab korupsi terdiri dari dua hal yaitu: faktor internal yakni dari dalam diri si pelaku terkait dengan persepsi terhadap korupsi dan moralitas maupun integritas moral individu yang bersangkutan. Sedangkan faktor eksternal, meliputi faktor di luar diri pelaku korupsi yakni sistem dan struktur hukum, politik, *corporate culture*, sistem dan struktur sosial, dan sistem pendidikan.

²³Dzuriyatun Toyibah. 2006. "Faktor-faktor Penyebab Korupsi" dalam Karlina Helmanita dan Sukron Kamil (Ed). *Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi*. Jakarta: CSRC. h.66.

Meskipun korupsi adalah sebuah perbuatan kriminal dan kejahatan yang sudah disepakati bersama. Akan tetapi ada anggapan yang mengatakan bahwa korupsi bersifat fungsional, karena dapat meningkatkan derajat ekonomi seseorang. Uang suap juga dianggap dapat memberi kontribusi positif, yaitu dapat mengatasi rigiditas dan kompleksitas sistem administrasi yang kaku. Namun jika ditelusuri lebih jauh maka pendapat yang melihat korupsi bersifat fungsional dapat dipertanyakan, karena korupsi memiliki dampak positif dan menguntungkan hanya untuk orang-orang tertentu yang terlibat, dan tetap merugikan masyarakat umum. Secara faktual korupsi berdampak negatif, karena bisa jadi sebuah masyarakat mau membayar uang administrasi untuk mendapatkan surat izin, lisensi, dan sebagainya, meskipun dalam jumlah sedikit. Namun bukan berarti bahwa mereka menyetujui hal tersebut. Meskipun uang administrasi merupakan cara yang paling praktis untuk dapat memperoleh apa yang dibutuhkan, tetapi anggapan ini lama kelamaan menjadi tidak benar, karena jumlah yang diminta semakin besar.

Disamping persepsi tentang korupsi yang fungsional tersebut, tindakan korupsi yang seringkali disebabkan karena minimnya pengetahuan pada pelaku korupsi. Misalnya kebiasaan untuk memberikan uang tanda terima kasih ketika membuat KTP, atau uang terima kasih dari orang tua kepada guru ketika masa penerimaan raport, atau membawa oleh-oleh kepada dosen ketika bimbingan skripsi seringkali dianggap bukan bagian dari tindakan korupsi.

Secara umum, kebiasaan tersebut merupakan hal yang wajar. Karena dianggap sebagai bentuk

kedermawanan (*philanthropy*). Motif dan dampak pemberian/hadiah akan sangat menentukan, apakah sebuah pemberian merupakan salah satu bentuk korupsi atau salah satu faktor pendukung korupsi. Tradisi pemberian hadiah biasanya dilakukan secara sukarela kepada teman, saudara atau pihak-pihak yang membutuhkan tanpa motif-motif tertentu, dan diberikan dalam bentuk sewajarnya. Jika pemberian sudah menyalahi prinsip-prinsip tersebut, maka besar kemungkinan pemberian tersebut termasuk suap dan uang pelicin yang kemudian dapat dikategorisasikan dengan korupsi.

Jika uraian di atas menjelaskan tentang korupsi kultural, maka ada juga korupsi yang bersifat sistemik.²⁴ Secara sederhana, korupsi sistemis adalah suatu perbuatan korupsi yang melibatkan suatu sistem atau susunan yang teratur dan dilakukan secara rapi, sulit dilacak, sulit dibuktikan, dan sulit menyentuh mereka yang berada di posisi puncak kekuasaan dari sistem praktik korupsi. Kesulitan ini muncul karena memang secara formal, bukti-bukti yang ada sulit menyentuh para pengambil kebijakan. Apabila dilihat dari cara yang dilakukan dalam tindakan ini, praktik korupsi di Indonesia memang dilakukan secara sistematis. Dalam banyak kejadian, aparat hukum sulit sekali memperoleh barang bukti terjadinya tindak pidana korupsi. Dalam kasus penyusunan, politik uang (terutama pada masa pemilihan kepala daerah oleh anggota DPRD pada era UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah) hampir tidak ada bukti yang

²⁴Amzulian Rifai. 2006. "Praktik Korupsi Sistemis: Berdayakah Hukum?". Dalam Suyitno (Ed). *Korupsi, Hukum, dan Moralitas Agama*. Yogyakarta: Gama Media. h. 6.

mampu dikumpulkan untuk mendukung terjadinya korupsi.

Selain itu, tindak korupsi sulit dilakukan oleh satu orang saja. Apabila menyangkut suatu lembaga, maka terdapat keterlibatan beberapa orang dalam tindakan itu. Hanya saja kendalanya terjadi suatu kontradiksi, aparat hukum di satu sisi kesulitan mendapatkan alat bukti yang mengarah kepada pucuk pimpinan, dan di sisi lain masyarakat beranggapan bahwa aparat hukum belum serius menangani perkara korupsi apabila belum mampu menyentuh (baca mengadili) para pengambil keputusan/ para pimpinan dari suatu lembaga. Dalam kasus-kasus besar, biasanya dilakukan secara sistematis dan melibatkan banyak orang, tetapi hanya “kalangan bawah” yang dikorbankan, sedangkan pada pimpinan yang lebih tinggi belum bisa ditemukan bukti-bukti.

Indonesia Corruption Watch (ICW) dalam buku “Menyingkap Tabir Mafia Peradilan” memberikan gambaran bagaimana pola korupsi di Mahkamah Agung, sebagai lembaga hukum tertinggi di Indonesia. Ada delapan perilaku korup di Mahkamah Agung, yaitu melalui:²⁵

1. Surat Sakti yang dikeluarkan untuk menunda atau menghentikan eksekusi suatu perkara. Surat tersebut biasanya diterbitkan setelah ada negosiasi antara hakim dan lawan dari pihak yang berperkara.
2. Pemerasan, dalam hal ini hakim agung bekerjasama dengan asistennya atau hakim yustisi. Asisten ini tidak memiliki jabatan struktural dan direkrut dari hakim senior yang telah bertugas di pengadilan tinggi dan

²⁵Amzulian Rifai. 2006. “Praktik Korupsi”. h. 13.

pengadilan negeri. Selanjutnya, hakim yustisi yang akan menghubungi pihak-pihak yang berperkara. Tawaran yang diajukan tidak hanya kemenangan, melainkan juga percepatan perkara. Apabila, perkara di Mahkamah Agung mencapai belasan ribu kasus. Percaloan juga dapat dilakukan karyawan Mahkamah Agung. Saat putusan lisan sudah dijatuhkan tetapi belum diketik, panitera dan staf administrasi lembaga itu menghubungi pemenang. Staf ini bisa meminta uang kepada pemenang dengan imbalan bantuan untuk memenangkan perkara. Padahal, sebetulnya pihak lain yang berperkara itu memang sudah diputuskan menang oleh majelis hakim kasasi.

3. Vanis yang Tak Bisa Dieksekusi. Apabila suatu perkara menang di tingkat kasasi, eksekusi akan dilakukan oleh Pengadilan Negeri. Tapi kalau lobi di tingkat Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung kalah dari pihak lawan, maka eksekusi bisa terganjal oleh tuntutan dalam perkara serupa.
4. Makelar Perkara. Ada beragam latar belakang pihak yang berstatus calo di Mahkamah Agung. Mereka adalah kerabat dekat Hakim Agung dan petinggi Mahkamah Agung. Calo ada juga yang berstatus pengacara. Dalam percaloan seperti ini, hakim bersama-sama calo atau pengacara melakukan pemerasan pada pihak yang berperkara.
5. Pengaburan perkara. Dalam hal ini terdapat dua modus, *pertama*, pengaburan perkara dilakukan dengan penghilangan data oleh panitera dari berkas perkara. Biasanya, tindakan itu dilakukan panitera senior. Supaya praktik ini lancar, panitera bekerja sama dengan

hakim yang akan memeriksa perkara yang terdaftar. *Kedua*, pengaburan perkara dilakukan asisten hakim agung pembuat *resume* yang mempunyai kesepakatan khusus dengan pihak yang berperkara. Asisten tersebut akan membuat resume yang menguntungkan satu pihak, sehingga ketika vonis kasasi diputus, akan membuat pihak tersebut menang.

6. Pengaturan Majelis yang Menguntungkan. Menurut Frans H. Winarata dari komisi Hukum Nasional, para pengacara berlomba menghubungi pihak yang mempunyai wewenang menentukan komposisi majelis hakim. Cara lain adalah menyiasati majelis hakim yang akan menyidangkan kasus yakni dengan tidak melengkapi berkas perkara. Karena tidak lengkap, berkas perkara akan bertahan di direktorat yang ada di Mahkamah Agung, sesuai dengan perkarannya.
7. Pemalsuan Vonis yang telah diputuskan biasanya dilakukan oleh karyawan Mahkamah Agung.
8. Penyuapan. Praktik kolusi antara hakim dan pihak-pihak yang berperkara seakan menjadi kebiasaan dalam peradilan kita. Penyuapan dilakukan pihak-pihak yang berperkara dan pengacaranya. Penyuapan terhadap seorang hakim terjadi ketika pengacara yang sedang diperiksa perkaranya aktif menghubungi hakim agung. Pengacara bersangkutan membujuk hakim agung dengan sejumlah uang agar memenangkan perkaranya.

Kedelapan teknik mafia peradilan ini tersebut dengan sendirinya merusak citra lembaga pengadilan yang seharusnya mampu memberikan rasa keadilan kepada masyarakat. Dengan demikian keadilan dapat diberikan kalau lembaga peradilan sendiri tidak mempunyai

kredibilitas di hadapan masyarakatnya. Padahal kredibilitas itu diperlukan agar para pencari keadilan mempunyai suatu keyakinan bahwa mereka mendatangi institusi yang tepat sebagai usaha untuk memperoleh keadilan.

Pertanyaan yang muncul kemudian adalah apa penyebab sebenarnya dari korupsi? Sebagian orang akan menjawab kemiskinan adalah akar dari masalah korupsi. Tanpa kemiskinan tidak akan ada korupsi. Akan tetapi jika kemiskinan yang menyebabkan korupsi, maka sulit dijelaskan mengapa negara-negara kaya dan makmur penuh dengan skandal, dan sangat sedikit sekali melibatkan orang yang termasuk golongan “miskin” atau “kekurangan”.²⁶ Pendapat tersebut tampaknya tidak kontekstual karena menyamakan kemiskinan dengan ketidakjujuran, dan dengan demikian dapat menyudutkan komunitas orang-orang miskin. Juga tidak dapat dikatakan bahwa orang-orang yang memanipulasi sistem perbankan, memberikan pinjaman uang yang tidak dikembalikan dan melakukan perdagangan orang dalam dengan deposito nasabah tertentu, adalah orang-orang miskin. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pendapat yang mengatakan penyebab korupsi adalah karena ketiadaan harta tidak kontekstual dengan realitas.

World Bank memperkirakan kekayaan yang disimpan para pemimpin Afrika di bank-bank Eropa mencapai beberapa miliar dolar AS. Tidak satupun dari para pemimpin ini yang dapat dikatakan miskin. Namun

²⁶Jeremy Pope. 2003. *Strategi Memberantas Korupsi: Elemen Sistem Integritas Nasional*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia. h.17.

mereka menguras habis harta negara, dapat menyebabkan rakyat miskin bertambah. Selain itu, pengambil keputusan dalam suatu negara menentukan anggaran publik kadang-kadang didasarkan pada pertimbangan keuntungan pribadi dengan didukung uang pelicin yang diberikan oleh perusahaan-perusahaan dari negara-negara industri dengan tanpa mempertimbangkan kepentingan negara dan rakyatnya. Ini membawa dampak buruk pada pembangunan sosial dan ekonomi. Karena itu, korupsi bukan disebabkan oleh kemiskinan, tetapi sebaliknya justru, kemiskinan merupakan akar penyebab dari korupsi.

Selain berkaitan dengan persoalan kemiskinan di atas, korupsi juga bersifat administratif dan struktural.²⁷ Korupsi yang bersifat administratif adalah korupsi yang dilakukan oleh pegawai pemerintah atau pejabat negara dan tidak ada urusannya dengan politik. Pelakunya hanya mau hidup enak dalam waktu yang singkat, bisa karena kebutuhan mendesak atau karena moralitas serakah semata-mata. Sedangkan yang bersifat struktural adalah korupsi yang berkaitan dengan struktur kekuasaan dengan tindak pidana korupsi atau kolusi yang dilaksanakan dengan cara bekerja sama atau persekongkolan.

Dalam hal ini struktur dan sistem politik biasanya dipahami sebagai proses bagaimana kekuasaan didapatkan dan dijalankan. Meskipun perilaku penggelapan dan penyuapan adalah hal yang sudah lama terjadi, namun seringkali cara pandang politik tradisional membenarkan

²⁷Suyuti Pulungan.2006. "Korupsi di Negeri Penduduk Mayoritas Muslim: Suatu Kajian tentang Sistem Politik". Dalam Suyitno (Ed). *Korupsi, Hukum, dan Moralitas Agama*. Yogyakarta: Gama Media. h. 203.

seorang raja atau penguasa menggunakan penghasilan negara demi kepentingan keluarga, pejabat menggunakan penghasilan dari jabatannya untuk menunjukkan keagungannya sebagai pejabat negara. Karenanya secara tradisional, pejabat merasa berhak menggunakan kekayaan negara untuk pribadi.

Namun demikian sejak awal sudah muncul respon bahwa perilaku-perilaku tersebut adalah perilaku yang tidak adil. Sistem politik yang berkembang lebih berorientasi pada hubungan personal antara pemimpin dan bawahan yang tidak didasarkan asas persamaan. Hubungan atasan dan bawahan lebih mencerminkan hubungan persaudaraan yang lebih banyak menggunakan hubungan dan cara bersifat emosional dan cenderung untuk memberikan toleransi terhadap penyelewengan. Jika ada penyelewengan dari atasan, maka bawahannya tidak berani untuk melakukan kritik karena perasaan tidak enak atau dalam rangka menjaga hubungan baik.

Hal ini disebabkan karena pengangkatan pegawai bukan karena *merit system* atau pengangkatan pegawai yang didasarkan pada sistem yang profesional, dimana yang menjadi ukuran penilainya adalah kemampuan dan kompetensi. Karena jasa si atasanlah, maka seorang bisa menjadi pegawai. Kondisi ini membuat bawahan menjadi tidak enak dan ingin berbalas budi. Di sinilah terjadi hubungan timbal balik yang menuntut bawahan untuk membalas budi terhadap kebaikan yang ia keluarkan. Oleh karena itu, seringkali terjadi korupsi disandingkan dengan kolusi dan nepotisme. Yang dimaksud dengan nepotisme adalah mengangkat orang memiliki hubungan kekerabatan atau pertemanan untuk mengisi jabatan publik tanpa

mempertimbangkan aspek profesionalisme dan kompetensi. Dengan demikian korupsi dapat muncul jika ada monopoli kekuasaan ditambah dengan wewenang pejabat yang absolut tanpa adanya mekanisme pertanggungjawaban. Sebaliknya korupsi akan berkurang bila ada pemisahan kekuasaan. Di sinilah pentingnya demokrasi dan *good governance* untuk meminimalisir perbuatan korupsi.

Faktor selanjutnya yang menjadi penyebab korupsi adalah faktor budaya lembaga.²⁸ *Corporate culture* adalah kebiasaan kerja seluruh perangkat perusahaan dan lembaga baik menegemen maupun seluruh lapisan karyawan yang dibentuk yang dibekukan serta diterima sebagai standar perilaku kerja, inti dari *Corporate culture* adalah nilai yang menjadi landasan kerja.

Nilai-nilai yang menjadi landasan kerja bisa berasal dari ajaran agama atau tradisi. Tingkat korupsi yang sangat akut di Indonesia, sebagai negara dengan mayoritas pemeluk agama Islam, memang sangat disayangkan. Ajaran Islam yang memiliki nilai-nilai luhur sebagai inspirasi untuk tumbuhnya *Corporate culture* yang modern belum terbukti. Sebaliknya yang terjadi adalah budaya keserakahan yang melahirkan korupsi dan budaya korupsi terhadap waktu, tanggung jawab, sarana dan prasarana, dan dana. Sementara di Indonesia berkembang apa yang disebut dengan *Zero Sum Game* yakni perolehan kerja dengan merugikan orang lain atau situasi dimana keuntungan seseorang harus berimbang dengan kerugian oranglain.

²⁸Jeremy Pope. 2003. *Strategi Memberantas Korupsi : Elemen Sistem Integritas Nasional*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia. h.18.

Contoh, seorang pejabat menjadi kaya dengan mengambil hak rakyat, sementara orang lain hidup kesusahan dan dia hidup dengan kemewahan.

Struktur dan sistem sosial tersebut akan semakin memberi peluang untuk korupsi jika ditingkat masyarakat juga muncul budaya *nrimo* dan *ewuh pakewuh*. Budaya ini pada awalnya tampak tumbuh di masyarakat Jawa, bahwa manusia harus menerima kenyataan, sabar dengan kenyataan dan sebaiknya tidak banyak protes mengkritisi perbuatan orang lain, karena hal itu akan menimbulkan hubungan tidak baik dan akhirnya akan menimbulkan kekacauan di masyarakat. Misalnya, ada seorang lurah, camat dan pegawai pemerintah lainnya yang hidup secara mewah di luar batas kewajaran. Karena pengaruh budaya yang sudah biasa menganggap pejabat seharusnya kuat secara ekonomi, maka mempertanyakan dari mana kekayaan itu didapat, kadang-kadang masih dianggap sesuatu yang tabu. Jika dihubungkan dengan korupsi di Indonesia maka muncul satu praduga bahwa korupsi hampir menjadi kultur yang diterima oleh masyarakat Indonesia. Tradisi memberi dianggap sebagai biang keladi munculnya korupsi. Demikian juga nilai kekeluargaan dianggap menjadi penyebab munculnya nepotisme.

C. Bentuk-bentuk dan jenis-jenis Korupsi

Korupsi sebagaimana dalam definisi di atas, tidak ditemukan bentuk yang tunggal dan dapat disepakati secara umum. Akan tetapi korupsi dapat dibedakan dengan bentuk kriminal lainnya seperti pencurian, pencopetan, perampokan, dan lain-lain. Sebagai gambaran umum

tentang korupsi berikut ini adalah pendapat Syed Hussain Alatas yang merumuskan sembilan ciri korupsi:²⁹

- 1). Pengkhianatan terhadap kepercayaan;
- 2). Penipuan terhadap badan pemerintah;
- 3). Melalaikan kepentingan umum untuk kepentingan khusus;
- 4). Dilakukan dengan rahasia, kecuali dengan keadaan dimana orang-orang yang berkuasa atau bawahannya menganggapnya tidak perlu;
- 5). Melibatkan lebih dari satu orang atau satu pihak;
- 6). Adanya kewajiban atau keuntungan bersama dalam bentuk uang atau yang lain;
- 7). Terpusatnya kegiatan korupsi pada mereka yang menghendaki keputusan yang pasti dan mereka yang dapat mempengaruhi keputusan;
- 8). Adanya usaha untuk menutupi perbuatan korup dalam bentuk-bentuk pengesahan hukum; dan
- 9). Menunjukkan fungsi ganda yang kontradiktif pada mereka yang melakukan korupsi.

Sedangkan menurut Gerald E. Caiden, bentuk-bentuk korupsi secara umum antara lain:³⁰

1. Berkhianat, subversi, transaksi luar negeri illegal, penyelendupan.

²⁹Irfan Abubakar. 2003. "Bentuk-bentuk Korupsi" dalam Karlina Helmanita dan Sukron Kamil (Ed). *Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi*. Jakarta: CSRC. h. 49.

³⁰ Gerald E. Caiden, "Toward a General Theory of Official Corruption", *Asian Journal of Public Administration*, Vol. 10. No. 1. 1988.

2. Menggelapkan barang milik lembaga, swastanisasi anggaran pemerintah, menipu dan mencuri.
3. Menggunakan uang yang tidak tepat, memalsu dokumen dan menggelapkan uang, mengalirkan uang lembaga ke rekening pribadi, menggelapkan pajak, menyalahgunakan dana.
4. Menyalahgunakan wewenang, intimidasi, menyiksa, penganiayaan, member ampun dan grasi tidak pada tempatnya.
5. Menipu dan mengecoh, member kesan yang salah, mencurangi dan memperdaya.
6. Mengabaikan keadilan, melanggar hukum, memberikan kesaksian palsu, menahan secara tidak sah dan menjebak.
7. Tidak menjalankan tugas, desersi, hidup menempel pada orang lain seperti benalu.
8. Penyipuan dan penyogokan, memeras, mengutip pungutan, meminta komisi.
9. Menjegal pemilihan umum, memalsukan kartu suara, membagi-bagi wilayah pemilihan umum agar bisa unggul.
10. Menggunakan informasi internal dan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi; membuat laporan palsu.
11. Menjual tanpa izin jabatan pemerintah, barang milik pemerintah, dan surat izin pemerintah.
12. Manipulasi peraturan, pembelian barang persediaan, kontrak, dan pinjaman orang.
13. Menghindari pajak, meraih laba berlebih-lebihan.
14. Menjual pengaruh, menawarkan jasa perantara, konflik kepentingan.

15. Menerima hadiah, uang jasa, uang pelican dan hiburan, perjalanan, yang tidak pada tempatnya.
16. Berhubungan dengan organisasi kejahatan, operasi pasar gelap.
17. Perkoncoan, menutupi kejahatan.
18. Memata-matai secara tidak sah, menyalahgunakan telekomunikasi dan pos.
19. menyalah gunakan stempel dan kertas surat kantor, rumah jabatan, dan hak istimewa jabatan.

Sedangkan menurut Irfan Abubakar dengan melihat modus operandi, maka korupsi mencakup beberapa bentuk sebagai berikut:³¹

1. Penyuapan (*bribery*)

Perbuatan kriminal yang melibatkan sejumlah pemberian kepada seseorang agar yang bersangkutan mengubah perilaku sedemikian rupa sehingga bertentangan dengan tugas dan tanggung jawabnya. Sesuatu yang diberikan tidak harus berupa uang, tetapi bisa berupa barang berharga, rujukan istimewa, keuntungan ataupun janji yang dapat dipakai untuk membujuk atau mempengaruhi tindakan, suara, atau pengaruh seseorang dalam sebuah jabatan publik.

Ketika perilaku penerima suap benar-benar mengikuti pemberi suap akibat transaksi penyuapan tersebut, dan mengubah kebijakannya dengan melanggar tugas dan tanggungjawabnya, maka telah terjadi pengkhianatan terhadap kepercayaan yang diberikan kepadanya. Selain itu dia sekaligus telah menyalahgunakan

³¹Irfan Abubakar. 2003. "Bentuk-bentuk Korupsi" dalam Karlina Helmanita dan Sukron Kamil (Ed). *Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi*. Jakarta: CSRC. h. 50-59.

wewenang untuk kepentingan pribadi. Barang suap yang diberikan kepada penerima suap, baik berupa uang maupun barang berharga lainnya merupakan keuntungan material yang diperoleh. Sedangkan pemberi suap juga mendapatkan keuntungan berupa kemudahan izin atau hak-hak istimewa yang belum tentu didapatkan tanpa melalui tindakan korupsi tersebut.

Pertanyaannya adalah apakah sama antara hadiah (gratifikasi) dengan suap? Memang benar bahwa pemberian hadiah tidak sama dengan korupsi atau penyuapan. Pemberian hadiah bukan bersifat rahasia melainkan terbuka, tidak menyebabkan pelanggaran tugas dan hak-hak publik, serta tidak merupakan penggelapan dana pemerintah atau pemerasan publik. Namun dalam suatu masyarakat yang korupsinya telah membudaya, pemberian hadiah bisa disalahgunakan dan menjadi lahan subur bagi korupsi dalam bentuk pemerasan.

Penyalahgunaan ini bisa mengambil bentuk pemberian barang atau jasa tanpa ada pertalian langsung dengan keuntungan tertentu, selain keuntungan yang dibayangkan akan diperoleh di masa yang akan datang. Misalnya, KPK melarang pejabat menerima hadiah parcel Idul Fitri atau hari besar keagamaan lainnya. Hal ini dilakukan untuk menghindarkan diri dari penyalahgunaan hadiah yang diberikan oleh pengusaha, dan terhindar juga dari tuduhan terlibat praktek suap.

2. Penggelapan (*embezzlement*) dan pemalsuan/ pengelembungan (*fraud*)

Suatu bentuk korupsi yang melibatkan pencurian uang, properti, atau barang berharga oleh seseorang yang diberi amanat untuk menjaga dan mengurus uang, properti

atau barang berharga tersebut. Penggelembungan mengacu kepada praktek penggunaan informasi yang menyesatkan guna membujuk seseorang agar mau mengalihkan harta atau uang secara sukarela. Bentuk korupsi penggelembungan atau pemalsuan lebih bersifat *otogenik* atau mengacu kepada tindakan korupsi yang dilakukan sendiri tanpa melibatkan orang lain. Meskipun demikian, perilaku ini juga memenuhi ciri-ciri sebagai bentuk korupsi karena ada unsur pengkhianatan terhadap amanah, penyalahgunaan wewenang, dan pengambilan keuntungan pribadi dengan mengorbankan masyarakat umum.

3. Pemerasan (*extortion*)

Penggunaan ancaman kekerasan atau penampilan informasi yang menghancurkan guna membujuk seseorang agar mau bekerjasama. Dalam hal ini pemangku jabatan dapat menjadi pemerasan atau korban pemerasan.

4. Nepotisme (*nepotism*)

Memilih keluarga atau teman dekat berdasarkan pertimbangan hubungan, bukan karena kemampuannya. Bentuk korupsi ini disebut juga korupsi kekerabatan dengan melibatkan pengangkatan sanak-saudara, teman-teman atau rekan-rekan politik pada jabatan-jabatan publik tanpa memandang kemampuan mereka memberikan pelayanan publik yang baik dan mendukung kesejahteraan masyarakat.

Semua bentuk dan jenis korupsi sebagaimana penjelasan di atas—apapun alasan dan motivasinya—merupakan bentuk pelanggaran terhadap norma-norma dan tanggungjawab moral maupun sosial yang berakibat pada kerugian negara dan keperluan publik. Meskipun demikian, perilaku korupsi nampaknya semakin

meningkat. Adapun faktor peningkatan tersebut disebabkan oleh:

1. Nilai-nilai sosial yang melemah, kepentingan umum dan tanggung jawab sosial dikesampingkan dengan mengejar status yang diukur dengan pemilikan harta benda mendapat tempat utama dalam etika pribadi sebagian besar orang.
2. Tidak ada transparansi dan tanggung gugat dalam sistem integritas publik.

Di banyak negara ada pendapat yang makin luas dalam masyarakat bahwa pelayanan publik semakin buruk, banyak unsur pelayanan publik yang korup, seperti juga halnya di perusahaan-perusahaan swasta yang melakukan transaksi dengan sektor publik. Korupsi adalah salah satu dari sekian banyak tantangan besar yang dihadapi di zaman kini dan menjadi ancaman serius bagi hak asasi manusia, lembaga-lembaga demokrasi dan hak-hak dasar kemerdekaan, juga menghambat pembangunan dan memperparah kemiskinan di seluruh dunia. Jika korupsi terus dibiarkan maka akan tercipta pemerintahan yang irasional—karena pemerintah tersebut didorong oleh keserakahan, bukan oleh tekad untuk mensejahterakan rakyat. Dengan demikian korupsi akan menjauhkan kebutuhan dasar manusia yakni harapan.

D. Korupsi dan Etika Aristoteles

1. Tujuan Hidup Manusia

Dalam etika Aristoteles dijelaskan bahwa kebajikan (*virtue*) atau keutamaan (*areté*) dalam kehidupan harus menuju pada tercapainya kebahagiaan. Karena tujuan hidup bukanlah tercapainya kebajikan demi kebajikan itu

sendiri, melainkan kebajikan dicapai untuk tujuan yang lebih tinggi yaitu kebahagiaan.³² Etika dapat pula diartikan sebagai seni untuk mencapai kebaikan yang dilakukan melalui perbuatan. Adapun puncak kebajikan yang dilakukan oleh manusia adalah berpikir murni, karena yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya adalah akal.³³ Berpikir murni itulah yang merupakan puncak kebahagiaan tertinggi manusia. Karenanya, Aristoteles mengajarkan bahwa manusia berbuat kebajikan sepanjang ia menggunakan akal budinya, mengingat kemampuan khas yang dimiliki manusia adalah akal budi.

Di dalam bukunya *Etica Nichomachea*, dijelaskan bahwa segala sesuatu dikatakan baik apabila mampu mengoptimalkan potensinya atau mewujudkan hakekatnya yang tertinggi. Hal ini juga berlaku bagi manusia. Karenanya, kebaikan yang tertinggi atau terakhir bagi manusia adalah mewujudkan kemampuannya secara penuh sebagai manusia atau penyempurnaan diri.³⁴

Berkaitan dengan optimalisasi kemampuan manusia tersebut, maka tujuan tertinggi atau terakhir kehidupan manusia adalah kebahagiaan (*eudaimonia*), mengingat hanya kebahagiaan yang diusahakan demi kebahagiaan itu sendiri, dan orang yang bahagia tidak lagi

³²Fuad Hasan. 2001. *Pengantar Filsafat Barat*. Jakarta: Pustaka Jaya. h. 44.

³³ Bernard Delfgaauw. 1992. *Sejarah Ringkas Filsafat Barat*. Yogyakarta: Tiara Wacana. h.34.

³⁴Louis O. Kattsoff. 1992. *Pengantar Filsafat*. Diterjemahkan oleh Soejono Soemargono dari "Elements of Philosophy". Yogyakarta: Tiara Wacana. h. 368.

menginginkan sesuatu yang lain.³⁵ Berkaitan dengan hal tersebut, karakteristik khas manusia sebagai manusia harus dijadikan tolok ukur bagi kebahagiaan hidupnya sebagai manusia. Karakteristik khas tersebut adalah kemampuan akal yang terdapat dalam diri manusia, sehingga kebahagiaan hidup manusia tergantung tingkat pencapaian akalnya tersebut. Akal dapat berfungsi untuk menjernihkan pikiran pada saat pengambilan keputusan yang harus dilakukan dan saat memberi penilaian terkait suatu hal, sehingga dapat terhindar dari kekeliruan dan perilaku yang menyesatkan.

Etika Aristoteles juga mengajarkan manusia untuk menghindari perilaku yang berlebih-lebihan karena segala perilaku yang eksekif dapat berakibat destruktif. Prinsip dasar dalam etika Aristoteles adalah sikap menjauhi segala sesuatu yang berlebihan (*nothing in excess*), karena segala sesuatu yang berlebihan tidak akan dapat mendatangkan kebahagiaan. Konsekuensinya, Aristoteles mengajarkan etika perilaku melalui prinsip “jalan tengah” diantara dua posisi yang ekstrem agar dapat mencapai keutamaan (*areté*). Jalan tengah (*meden agan*) dituntun oleh pertimbangan akal, sehingga dapat memberikan jaminan terpeliharanya keseimbangan, dan inilah yang disebut *the golden mean*.³⁶

Keutamaan (*areté*) dapat dicapai melalui proses pembiasaan terhadap perbuatan-perbuatan yang baik.

³⁵Franz Magnis-Suseno. 1994. *Etika Politik Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. h. 188.

³⁶Fuad Hasan. 2001. *Pengantar Filsafat Barat*. Jakarta: Pustaka Jaya. h. 45.

Dengan begitu, secara lambat-laun kebiasaan tersebut dapat membentuk watak. Pada gilirannya hidup menurut keutamaan dapat mengantarkan manusia memiliki keutamaan pribadi, dan semua orientasi perbuatannya dilakukan karena keutamaan. Dengan kata lain, keutamaan tercapai melalui latihan moral dengan mengembangkan diri secara terus-menerus.

Latihan moral akan menjadikan seseorang semakin menikmati bertindak menurut keutamaan dan merasa semakin tidak nyaman dan sakit apabila dia mengikuti dorongan keinginan hawa nafsunya yang rendah. Implikasinya, apabila seseorang melakukan tindakan yang baik—sebagai implementasi keutamaan—maka menjadi sesuatu yang menyenangkan, dan sebaliknya apabila melakukan sesuatu yang tidak baik akan meninggalkan perasaan tidak nyaman. Sedangkan manusia utama adalah orang yang menikmati bertindak luhur, merasa tidak nyaman dan merasa sakit kalau memikirkan dan melakukan tindakan yang tidak luhur. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa melalui perbuatan baik itulah akan timbul perasaan menyenangkan, dan sebaliknya. Implikasinya, perbuatan baik adalah perbuatan yang dikejar oleh manusia dan itulah perbuatan yang bermakna. Dengan sendirinya, perbuatan tersebut akan menimbulkan kenikmatan, dan itulah yang disebut keutamaan.

Setiap keutamaan berasal dari rasio, karenanya rasio memiliki peran penting dalam hal ini. Menurut Aristoteles, ada dua jenis keutamaan:³⁷ keutamaan yang dapat menyempurnakan rasio dan keutamaan yang dapat

³⁷Bertrand Russell. 2007. *Sejarah*. h.234.

mengatur watak. Keutamaan yang pertama disebut *intelektual* dan keutamaan yang kedua disebut *moral*. Keutamaan intelektual dihasilkan dari pengajaran, sedangkan keutamaan moral berasal dari kebiasaan.

Menurut Aristoteles, rasio manusia mempunyai dua fungsi: Fungsi pertama adalah memungkinkan manusia untuk mengenal kebenaran. Fungsi rasio ini disebut rasio teoritis. Kedua, rasio yang dapat memberikan petunjuk agar seseorang dapat mengetahui apa yang harus diputuskan dalam keadaan tertentu. Rasio ini dinamakan rasio praktis. Implikasinya, menurut Aristoteles, ada dua macam keutamaan yang dapat menyempurnakan rasio yakni kebijaksanaan teoritis dan kebijaksanaan praktis.

Kebijaksanaan teoritis ditunjukkan oleh Aristoteles dengan sebutan *sophia* atau kearifan. Kebijaksanaan teoritis ini hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu yaitu orang-orang terpelajar. Jadi jalan menuju pada kebijaksanaan teoritis tersebut adalah suatu jalan panjang yang meliputi seluruh pendidikan ilmiah. Sedangkan kebijaksanaan praktis disebut oleh Aristoteles menggunakan kata *phronesis*. Istilah ini diterjemahkan dengan kata *prudencia* (Inggris: *prudence*). Kebijaksanaan praktis merupakan sikap jiwa yang memungkinkan manusia mengatakan mana yang dianggap baik untuk hidupnya. Dalam hal ini tidak dapat dilepaskan dari keutamaan moral. Aristoteles menekankan keutamaan moral melalui jalan tengah antara dua posisi yang ekstrem. Keutamaan moral yang sejati selalu disertai kebijaksanaan moral.³⁸

³⁸K. Bertens. 1999. *Sejarah*. h. 199.

Aristoteles melukiskan keutamaan moral sebagai suatu sikap watak yang memungkinkan manusia untuk memilih jalan tengah antara dua posisi ekstrem yang berlawanan. Setiap keutamaan adalah suatu pertengahan diantara dua sisi ekstrem, yang masing-masing buruk.³⁹ Ini dibuktikan dari pengujian terhadap beranekaragam keutamaan. Keberanian adalah pertengahan antara sikap pengecut dan sikap nekat, kebebasan adalah antara sifat boros dan sifat kikir, harga diri adalah antara kecongkakan dan kerendahan diri, kelakar adalah antara sikap membadut dan sikap kasar, kerendahan hati adalah antara sikap malu-malu dan sikap tak kenal malu.

Menurut Aristoteles, jalan tengah tidak dapat ditentukan dengan cara yang sama untuk semua orang. Dengan kata lain, jalan tengah harus dipandang subjektif, bukan objektif. Tidak mungkin mengukur pertengahan antara dua sikap ekstrem dengan cara matematis, faktor pribadi harus dipertimbangkan. Dengan demikian, hidup menurut keutamaan tidak merupakan suatu persoalan teoritis. Orang yang bijaksana dalam praksis moral akan mampu menentukan pertengahan antara kekurangan dan kelebihan dengan mempertimbangkan keadaan kongkret.

Berdasarkan penjelasan di atas, manusia harus menata kehidupannya agar bisa bahagia. Menurut Aristoteles aturan-aturan moralitas bukan sesuatu yang tidak dapat dimengerti atau sesuatu yang diharuskan dari luar, melainkan sesuatu yang masuk akal. Tujuan moralitas adalah mengantar manusia ke arah tujuan terakhirnya

³⁹K. Bertens. 1999. *Sejarah*. h. 196. Lihat juga Bertrand Russell. 2007. *Sejarah* . h.235.

yakni kebahagiaan. Jadi apabila manusia hidup mengikuti aturan-aturan moral, maka dia telah menempuh jalan kebahagiaan.

2. Korupsi: Sebuah Kesuksesan Imajiner

Jika kebahagiaan merupakan tujuan akhir manusia, maka dalam realitas dijumpai tujuan tertentu yang dianggap tidak memadai atau tujuan akhir yang keliru. Aristoteles menyebut dua tujuan akhir yang salah yakni harta dan popularitas. Harta hanyalah sarana, bukan tujuan yang terdapat dalam dirinya sendiri karena itulah harta tidak menjamin kebahagiaan. Maka ketika orang mengarahkan seluruh hidupnya pada harta, justru akan menjauh dari tujuannya yakni kebahagiaan.

Sedangkan popularitas merupakan sesuatu yang terdapat dalam pandangan orang lain, bukan dalam diri orang yang bersangkutan. Orang bisa saja populer meskipun tidak berkualitas. Apabila seseorang populer karena kualitas diri dan prestasinya, maka sesuatu yang harus diusahakan adalah kualitas diri dan prestasinya tersebut, bukan popularitasnya. Dari sini bisa dipahami bahwa kebahagiaan adalah terberi, konsekuensi dari perkembangan kemampuan manusia yang sepenuhnya.

Masyarakat menawarkan banyak citra kesuksesan yang membawa pada kebahagiaan. Misalnya: harta berlimpah, reputasi atau popularitas, dan citra diri yang elegan. Seakan-akan manusia dalam kondisi tersebut dijamin bahagia. Untuk mencapai kondisi itulah manusia menempuh tujuan yang keliru seperti melakukan korupsi untuk mendapatkan harta yang digunakan untuk mendukung popularitasnya. Melalui korupsi, manusia akan

memiliki banyak harta dan citra kesuksesan akan melekat padadirinya.

Namun secara umum, kebahagiaan seringkali tidak berkaitan dengan kondisi material. Reputasi dan nama besar tidak identik dengan kebahagiaan. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa kesuksesan tidak selalu harus bersifat material seperti kaya raya dan terkenal, karena semua itu hanyalah kesuksesan imajiner. Terutama di jaman modern seperti saat ini, kesuksesan dipahami sebagai *money, fame, power, and status*.⁴⁰ Empat hal inilah yang menjadi impian setiap orang. Harta dan reputasi hanyalah sarana, Meskipun tidak mudah untuk mempertahankan diri di hadapan harta dan reputasi, karena apa yang dianggap sekedar sarana dengan mudah akan memperbudak manusia. Inilah hasrat irrasional yang cenderung tidak terbatas yang merupakan cara keliru dalam mengejar kebahagiaan. Melalui filsafat etika, Aristoteles menawarkan cara rasional untuk mencapai kesuksesan sejati yang dapat membawa pada pencapaian kebahagiaan.

Menurut Aristoteles, jiwa merupakan prinsip dasar atau asas hidup yang terdapat dalam diri manusia. Manakala jiwa manusia termanifestasikan secara optimal, maka akan muncul keutamaan (*areté*). Sedangkan kesejatian jiwa adalah rasio, maka *areté* dapat berfungsi mengoptimalkan pengetahuan dan merefleksikan rasionalitas. Memiliki keutamaan, *excellency* dengan demikian berarti dasar pengetahuan (kebijaksanaan)

⁴⁰A. Setyo Wibowo. 2010. *Areté: Hidup Sukses menurut Platon*. Yogyakarta: Kanisius. h. 13.

manusia secara rasional mengerti tujuan yang ingin dicapainya dan sarana yang tepat untuk dipilih agar tujuannya tercapai.

Keutamaan (*areté*) atau optimalisasi jiwa hanya bisa diperoleh lewat refleksi rasional atas apapun yang ada di sekitar manusia. Harta benda, reputasi, atau apapun namanya yang bersifat eksternal tidak pernah menjadi harta paling berharga bagi manusia. Semua itu harus dikesampingkan dengan mengarusutamakan tuntutan reflektifitas rasio agar jiwa manusia bisa tertata secara benar. Mengingat kebahagiaan hanya bisa diraih melalui sikap hidup yang optimal dengan menempatkan rasio dan pengetahuan sebagai yang memerintah diri manusia. Karenanya, sejauh keutamaan diperoleh melalui pengetahuan, maka pengetahuan menjadi syarat mutlak untuk hidup yang baik dan bahagia.

Pengetahuan yang dimaksud dalam hal ini bukanlah pengetahuan objektif, yang seakan-akan ketika sudah dipelajari otomatis membuat orang bermoral. Pengetahuan yang dimaksudkan Aristoteles adalah intelektualisme etis.⁴¹ Pengetahuan yang bukan semata-mata teoritis, melainkan pengetahuan yang baik dan telah mendarah daging dalam diri manusia yang bersifat eksistensial. Sehingga melibatkan seluruh kepribadian manusia. Jika seseorang berpengetahuan baik, maka tidak bisa tidak, dia pasti akan mengaplikasikan pengetahuan itu dalam tindakan nyata serta memberikan pengajaran kepada sesama untuk mencapai kesempurnaan manusia sebagai manusia.

⁴¹K. Bertens. 1999. *Sejarah Filsafat Yunani*. h. 100.

Pengetahuan tersebut akan memberikan referensi kepada seluruh tindakan manusia bahwa tawaran kesuksesan yang masif, menghadirkan diri dalam popularitas dan citra elegan dengan simbol material, adalah sebuah keberanian mengambil resiko karena hanya kebaikan yang mengantarkan manusia pada kebahagiaan. Akan tetapi susah sekali menentang fakta yang ada di masyarakat, dimana perilaku korupsi menjadi sangat seksi sehingga diminati, dan orang jujur akan hancur sehingga semua orang mundur darinya. Bukankah orang-orang yang korup itu tidak bodoh? Mereka juga beragama, dan rajin membantu pembangunan tempat ibadah, rajin menyantuni anak yatim, dan lain-lain? Bukankah orang-orang korup dan jahat sangat pandai? Mereka mendapatkan kebahagiaan dan penghargaan di mata dunia?

Menjadi orang korup tidak selalu lebih menguntungkan dibandingkan menjadi orang baik. Orang-orang yang diperbudak nafsu, harta, ambisi untuk menghalalkan segala cara demi reputasi dan popularitas diri belum tentu beruntung dan bahagia dibandingkan orang-orang yang hidup dalam kegembiraan karena menemukan kesejatan pengetahuan (kebijaksanaan). Dalam perspektif ini, hidup dengan mengutamakan rasio (hidup baik)—menghindarkan manusia dari segala pikiran penuh kelicikan dan siasat—mengindikasikan dari dirinya sendiri yang sudah berharga. Dengan demikian, ketika manusia hidup dituntun oleh rasionya, ia menjaga *daimon*-nya (inteleknnya) dalam kondisi yang baik (*eudaimonia*).⁴²

⁴²Franz Magnis Suseso. 2009. *Menjadi Manusia*. h. 4.

Di sinilah etika Aristoteles hendak menjadikan manusia sebagai manusia utama melalui rasio yang merupakan salah satu bagian dari jiwa. Maka untuk bisa menjadi manusia utama dengan cara mengoptimalkan jiwa—khususnya rasio—agar bisa mencapai tujuan tertinggi dalam kehidupan yakni kebahagiaan (*eudaimonia*).

3. Menjadi Manusia Utama

Menurut Aristoteles manusia harus mengetahui arah kehidupannya dan dapat mengembangkan dirinya. Akan tetapi mengetahui saja tidaklah cukup. Karenanya, Aristoteles mengajarkan agar manusia mampu mengarahkan kehidupannya ke arah yang benar. Untuk itu terlebih dahulu manusia harus membangun kekuatan intelktual dan etis agar kualitas dirinya meningkat hingga mampu memberi arah yang benar pada kehidupannya. Kualitas individual seseorang ditentukan oleh keutamaan yang dibangun oleh masing-masing individu itu sendiri.

Untuk membangun kehidupan yang bermutu dan bermakna membutuhkan usaha mengembangkan keutamaan diri secara terus-menerus. Dalam pandangan Aristoteles, keutamaan merupakan kemantapan sikap yang menjadikan manusia utama.⁴³Oleh karena itu, agar manusia dapat menjadi manusia yang seutuhnya, memiliki kemantapan diri, dan mampu menjalani kehidupannya secara bermakna, ia harus mengembangkan keutamaan

⁴³Franz Magins-Suseno. 2009. *Menjadi Manusia Belajar dari Aristoteles*. Yogyakarta: Kanisius. h.35-36.

intelektual dan etis. Dengan begitu, dia memiliki keutamaan dan menjadi manusia yang berbudi luhur.

Dalam hal keutamaan, Aristoteles membedakan dua macam keutamaan yaitu keutamaan dalam berpikir dan bertindak serta keutamaan etis. Keutamaan dalam berpikir adalah keutamaan intelektual yakni kebijaksanaan atau *phronesis*. Keutamaan tersebut tidak sama dengan dua keutamaan intelektual lainnya yakni *sophia* dan *episteme* (dua keutamaan lain lagi adalah *nous*, wawasan akal budi, dan *techne*, keterampilan praktis).

Menurut Franz Magnis-Suseno, dalam bahasa Yunani ada dua hal yang mengacu pada makna kebijaksanaan dalam bahasa Indonesia, yakni *sophia* dan *phronesis*. *Sophia* dalam pembahasan filsafat adalah kegiatan orang yang ber-*theoria*.⁴⁴ Dengan merujuk pada pemikiran Plato dan Aristoteles, Magnis menjelaskan bahwa *theoria* bukan berarti pandangan teoritis terhadap suatu masalah. *Theoria* bagi orang Yunani adalah “memandang”, merenungkan realitas abadi, realitas yang tak berubah yakni realitas Ilahi. Dalam *theoria*, manusia mengarahkan diri kepada realitas yang abadi—realitas yang mengatasinya sehingga memperoleh *sophia* (kebijaksanaan). Jadi manusia yang ber-*theoria* disebut seorang *philo-sophos* (seorang pecinta kebijaksanaan), seorang filosof. Dengan demikian filsafat adalah kegiatan memandang penuh kagum hal-hal yang abadi-Ilahi. Dengan sendirinya, kebijaksanaan berarti kemampuan manusia untuk memandang yang Ilahi (Yang Abadi).

⁴⁴Franz Magins-Suseno. 2009. *Menjadi Manusia Belajar dari Aristoteles*. Yogyakarta: Kanisius. h.26.

Dalam pandangan A. Setyo Wibowo,⁴⁵ *philosophia* adalah sebuah kebaikan yang datang dari para dewa. Ketika manusia memikirkan dirinya sebagai makhluk *mortal* (bisa mati seperti binatang dan tumbuhan), maka manusia menemukan diri dalam hasrat keilahian, menikmati keabadian dan immortalitas penuh bahagia yang menjadi kodrat keilahian. Dalam artian ini, menjadi filosof tidak berarti memiliki *sophia* (kebijaksanaan), melainkan bergerak dalam situasi tidak tahu (*ignorantia*) menuju situasi menjadi tahu. Dengan sendirinya, filosof secara definitif, adalah orang yang tahu bahwa ia sedang mencari tahu.

Filsafat juga merupakan hasil “menjadi”—sadarinya manusia mengenai dirinya sendiri sebagai pemikir, dan “menjadi”—kritisnya manusia terhadap diri sendiri sebagai pemikir di dalam dunia yang dipikirkannya.⁴⁶ Konsekuensinya, perbincangan filsafat tidak hanya seputar dunia saja, melainkan kegiatan berpikir itu sendiri. Karena itu filsafat merupakan pemikiran tentang hal-hal yang dipikirkan sekaligus pemikiran itu sendiri yang dilakukan oleh pemikir. Melalui pemikiran tersebut diharapkan manusia sampai pada rahasia kehidupan sehingga dapat mencapai kebahagiaan.

Adapun *phronesis* adalah kebijaksanaan dalam kehidupan sehari-hari. Implikasi pengertian *phronesis* adalah tingkah laku manusia akan mengarah kepada kebijaksanaan dalam arti kemampuan untuk memecahkan masalah yang dihadapi secara bijaksana. Dalam pandangan

⁴⁵A. Setyo Wibowo. 2010. *Hidup Sukses Menurut Platon*. Yogyakarta: Kanisius. h.25-27.

⁴⁶Louis O. Kattsoff. 1992. *Pengantar Filsafat*. h. 7.

Aristoteles, *phronesis* (kebijaksanaan praktis) tidak berkaitan dengan *sophia* (kebijaksanaan dalam kaitannya dengan filsafat), karena *phronesis* berkaitan dengan hal-hal yang bersifat aplikatif.⁴⁷

Phronesis juga berbeda dengan *episteme*. *Episteme* adalah ketajaman pengetahuan ilmiah melalui perhitungan, kalkulasi, kemudian menarik kesimpulan logis melalui penalaran praktis dengan mengamati dan memahami hukum alam. Dalam bahasa lain, *episteme* adalah ketajaman berpikir dalam sains. Jika *phronesis* mengacu pada kebijaksanaan manusia dalam bertindak, maka hal inilah yang menjadi ciri khas manusia, dimana tindakannya tidak dapat dipastikan dengan cara sains. Manusia bertindak menurut pertimbangan akalanya, bukan berdasarkan hukum alam.

Kebijaksanaan praktis (*phronesis*) sangat penting bagi manusia. Karena manusia yang bijaksana, akan bertindak tepat dalam berbagai situasi. Definisi Aristoteles tentang *phronesis* adalah kebiasaan bertindak berdasarkan pertimbangan yang tepat berkaitan dengan masalah baik dan buruk bagi manusia.⁴⁸ *Phronesis* tidak dapat dipelajari seperti halnya *episteme*. *Phronesis* dapat diperoleh melalui pengalaman dan kebiasaan dalam bertindak. *Phronesis* membuat manusia menjadi pandai dan benar dalam membawa diri dan dalam berinteraksi dengan orang lain. *Phronesis* menjadikan manusia mampu bertindak tepat dan etis, dalam bahasa Jawa dapat dibandingkan dengan *rasa*.⁴⁹

⁴⁷Franz Magins-Suseno. 2009. *Menjadi Manusia Belajar dari Aristoteles*. Yogyakarta: Kanisius. h.38.

⁴⁸Franz Magins-Suseno. 2009. *Menjadi Manusia*. 38.

⁴⁹Franz Magins-Suseno. 2009. *Menjadi Manusia*. 39.

Menurut orang Jawa, manusia harus mengolah rasanya agar dia mampu membawa diri dalam menghadapi orang lain.

Phronesis adalah sebuah wawasan intelektual yang akan berlaku efektif untuk mengarahkan hidup menuju kebahagiaan jika didukung oleh keutamaan etis. *Phronesis* dalam arti sesungguhnya hanya dimiliki oleh seseorang yang memiliki kemantapan dalam bertindak secara etis. Kemantapan ini diperoleh melalui penanaman kepribadian secara etis dan kontinu. Inilah yang disebut oleh Aristoteles dengan keutamaan.

Orang yang memiliki keutamaan adalah orang yang semakin kuat, mantap dan bahagia—dalam istilah modern orang yang mengalami hidupnya sebagai bermakna dan bermutu. Manusia yang utama atau “*a virtuous person*” bukan hanya menunjuk pada orang yang selalu berbuat baik, melainkan orang yang kuat batinnya, mantap dan tidak mudah goyah, tidak resah, berani dan dapat diandalkan. Itulah visi Aristoteles tentang manusia etis.⁵⁰

Manusia utama memiliki kemantapan sikap dalam bertindak. Hal ini karena melakukan tindakan etis merupakan sesuatu yang mudah, dan sebaliknya, bertindak tidak etis dapat berakibat menggelisahkan. Contohnya adalah bertindak jujur. Bagi orang yang memiliki sifat jujur, melakukan tindakan jujur merupakan sesuatu yang ringan, dia tidak akan berbohong untuk menyembunyikan sesuatu, tidak menipu serta tidak akan melakukan korupsi karena memiliki kepribadian yang kuat.

⁵⁰Franz Magins-Suseno. 2009. *Menjadi Manusia*. h. 43.

Sedangkan bagi orang yang tidak jujur, bertindak jujur merupakan sesuatu yang sangat susah dan berat untuk dilakukan, sehingga selalu kalah dan tidak mampu mempertahankan diri di hadapan godaan tersebut kemudian bertindak curang. Padahal di dalam hatinya sebenarnya memiliki pengetahuan bahwa apa yang dia lakukan adalah keliru dan seharusnya tidak dilakukan. Jadi ia tahu bahwa ia tidak mampu untuk mencapai apa yang sebenarnya dia harapkan, dan karena itu dia tidak mungkin bahagia. Dia akan merasa rendah, karena tahu bahwa dia kalah terhadap dorongan nafsu yang sebenarnya tidak dikehendaki dan tidak disetujui oleh dirinya sendiri.

Berbeda dengan orang yang memiliki kemantapan dalam berbuat jujur—mungkin saja mengalami berbagai macam kerugian karenanya, akan tetapi hatinya tetap mantap dan harga dirinya tidak jatuh. Dalam kesederhanaanpun dia tetap merasa gembira. Meskipun secara umum bertentangan dengan pendapat orang banyak, akan tetapi bagi orang yang jujur, dia akan mudah menolak perilaku ketidakjujuran. Seandainya dengan pertimbangan tertentu, kemudian dia melakukan ketidakjujuran, maka di hatinya akan timbul kegelisahan.

Di sinilah hubungan antara perbuatan bermoral dengan rasa nikmat atau gembira dengan rasa sakit atau sedih. Menjadi manusia utama berarti belajar merasa gembira apabila ia bertindak sesuai dengan keutamaan etis, dan merasa sedih serta resah apabila ia bertindak tidak etis. Kemantapan dalam melakukan perbuatan etis merupakan sebuah kekuatan batin yang mendasari perilaku manusia. Itulah yang dimaksudkan oleh

Aristoteles tentang pengembangan diri manusia yang khas sebagai manusia dengan membangun keutamaan.

Proses untuk mencapai manusia etis atau manusia utama adalah melalui pembiasaan. Pengembangan keutamaan diri harus dibiasakan secara intens. Semakin lama hal itu dibiasakan, maka akan semakin mudah dapat dilakukan. Dengan sendirinya, bertindak menurut keutamaan akan menjadi bagian dari kehidupannya. Keutamaan tersebut merupakan kekuatan batin, sebuah kemampuan untuk membawa diri agar tidak tergoda untuk melakukan perbuatan korupsi. Pembiasaan untuk bertindak jujur, adil, menepati janji, tidak menerima suap atau memberi suap, tidak berkeras hati, dan keutamaan-keutamaan lainnya melalui proses belajar bukan karena dilakukan dengan ceramah, melainkan “diajak” untuk bertindak demikian.

Keutamaan adalah tanda kepribadian yang mantap, bersikap lurus dan kuat. Sebuah tanda bahwa orang tersebut dapat dipercaya dan bertindak jujur. Dalam pandangan Aristoteles apakah seorang manusia akan menjadi orang yang kuat secara moral ataukah lemah bukan karena takdir, nasib atau bakat alami. Tetapi tergantung dari usaha manusia itu sendiri hendak menjadikan dirinya seperti apa.⁵¹ Inilah bangunan karakter yang diperlukan oleh seseorang.

Membangun karakter adalah proses mengukir atau memahat jiwa sedemikian rupa, sehingga berbentuk unik, menarik, dan berbeda atau dapat dibedakan dengan orang lain. Proses membangun karakter itu memerlukan disiplin

⁵¹Franz Magins-Suseno. 2009. *Menjadi Manusia*. h. 49.

tinggi karena tidak bisa dilakukan dengan mudah dan seketika atau instant. Diperlukan *refleksi* mendalam untuk membuat rentetan *moral choice* (keputusan moral) dan ditindaklanjuti dengan aksi nyata sehingga menjadi praksis, refleksi, dan praktik. Butuh proses panjang untuk membuat semua itu menjadi *custom* (kebiasaan) dan membentuk watak atau tabiat seseorang. Dengan melalui pendidikan—yang dalam hal ini—lebih dari semacam pengkondisian, tetapi pembiasaan belajar melakukan sesuatu secara rutin dengan sendirinya merupakan unsur penting dalam pembangunan karakter seseorang agar memiliki kepribadian yang mantap dan utuh.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada dasarnya korupsi adalah realitas yang bersifat plural, utuh, dan kaya serta saling terkait satu sama lain yang sangat sulit dipersepsi dan dideskripsikan. Korupsi sebagai sebuah konsep mengalami pemaknaan yang beragam, baik yang bersifat etimologis maupun terminologis. Korupsi sebagai sebuah penyimpangan, tidak hanya berlangsung pada ranah kekuasaan untuk mencari keuntungan materi, namun juga dalam bentuk penyimpangan kepercayaan (*betrayal of trust*) yang ada pada setiap orang. Adapun bentuk-bentuk korupsi merupakan manifestasi korupsi dilihat dari cara pelaksanaannya yang meliputi penyuapan (*blibery*), penggelapan (*embezzlement*), pemalsuan atau penggelembungan (*fraud*), pemerasan (*extortion*), nepotisme (*nepotism*).

Apapun makna dan bentuk korupsi, implisit di dalamnya adalah persoalan moral yang terdapat dalam diri manusia yang mengalami deviasi. Sehingga tidak semata-mata terkait dengan hukum atau ekonomi saja. Muatan moral ini menjadi semakin jelas ketika unsur kesengajaan dalam penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang tersebut ditonjolkan. Sehingga unsur manusia sebagai pelaku yang berkesadaran menduduki posisi sentral. Moralitas merupakan suatu dimensi nyata dalam kehidupan setiap manusia secara individual maupun secara sosial. Dalam konteks ini, hanya manusialah—yang mempunyai kesadaran diri—yang bisa melakukan

korupsi. Dengan demikian, korupsi berkaitan erat dengan moral yang ada di dalam diri manusia itu sendiri. Di sinilah filsafat moral (etika) menemukan momen yang tepat untuk memotret fenomena korupsi yang dilakukan oleh manusia.

Etika Aristoteles bertujuan menjadikan manusia sebagai manusia utama melalui rasionya agar bisa mencapai tujuan tertinggi dalam kehidupan *eudaimonia*. Prosesnya melalui intelektualisme etis yakni menjadikan pengetahuan bukan semata-mata teoritis, melainkan pengetahuan yang baik yang bersifat eksistensial, sehingga melibatkan seluruh kepribadian manusia. Pengetahuan eksistensial adalah bangunan karakter yang bisa dilakukan melalui pendidikan—sebuah proses mengukir atau memahat jiwa sedemikian rupa, sehingga berbentuk unik, menarik, dan berbeda atau dapat dibedakan dengan orang lain. Proses membangun karakter itu memerlukan disiplin tinggi karena tidak bisa dilakukan dengan mudah dan seketika atau instant. Diperlukan *refleksi* mendalam untuk membuat rentetan *moral choice* (keputusan moral) dan ditindaklanjuti dengan aksi nyata sehingga menjadi praksis, refleksi, dan praktik. Membutuhkan proses panjang untuk membuat semua itu menjadi *custom* (kebiasaan) dan membentuk watak atau tabiat seseorang.

B. Rekomendasi

Etika Aristoteles bisa diaktualisasikan melalui lembaga pendidikan di Indonesia. Karena hakekat pendidikan bukan semata-mata sarana transfer ilmu pengetahuan saja, melainkan sarana pembudayaan dan penyaluran nilai (enkulturasi dan sosialisasi). Selain itu lembaga pendidikan merupakan salah satu lembaga yang

bisa menjadi salah satu sarana kuratif atau penyembuh penyakit sosial seperti korupsi yang sudah menggerogoti sendi-sendi bangsa Indonesia.

Walau bagaimanapun, hidup dan kemanusiaan adalah poros utama dan dasar terdalam segala kiprah pendidikan. Agar pendidikan dapat bergerak ke depan secara tepat sasaran, dibutuhkan kajian ke belakang tentang bagaimana manusia dipahami selama ini. Dan untuk memahami manusia, salah satunya ditemukan dalam pemikiran etika Aristoteles. Melalui studi etika diharapkan bisa menghasilkan sosok pribadi yang memiliki keseimbangan intelektual maupun moral sekaligus.

Maka dengan selesainya pembahasan ini, bukan berarti bahasan tentang permasalahan korupsi telah selesai dan sempurna, namun masih banyak persoalan yang belum diuraikan dan masih membutuhkan studi analitik lebih lanjut. Terutama bagaimana format yang tepat untuk memberikan pendidikan karakter kepada mahasiswa STAIN Pekalongan perlu ada pembahasan secara khusus. Akhirnya kepada Allah juga segalanya dikembalikan.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Setyo Wibowo. 2010. *Areté: Hidup Sukses menurut Platon*. Yogyakarta: Kanisius.
- Abuddin Nata. 2002. *Akhlaq Tasawuf*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Achmad Charris Zubair. 1980. *Kuliah Etika*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Adelbert Snijders. 2004. *Antropologi Filsafat Manusia Paradoksdan Seruan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Ahmad Amin. 1983. *Etika (Ilmu Akhlak)*. Terj. oleh KH. Farid Ma'ruf dari *al-akhlak*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Ahmad Warsono Munawir. 1884. *Kamus al-Munawir Arab – Indonesia*. Yogyakarta: Ponpes Krapyak al-Munawir.
- Ali Abdul Halim Mahmud. 2004. *Akhlaq Mulia*. Terjemahan oleh Abdul Hayyie al-Kattani dari “At-Tarbiyah al-Khuluqiyah”. Jakarta: Gema Insani Press.
- Amzulian Rifai. 2006. “Praktik Korupsi Sistemis: Berdayakah Hukum”? Dalam Suyitno (Ed). *Korupsi, Hukum, dan Moralitas Agama*. Yogyakarta: Gama Media.
- Andi Hamzah. 2005. *Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Nasional dan Internasional*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Anton Bekker dan Ahmad Charis Zubair. 1990. *Metodologi Penelitian Filsafat*. Yogyakarta: Kanisius.
- Aristoteles. 1998. *The Nicomachean Ethics*. Translate by Ross, David. Revised by Ackrill J.L and J.O Urmson. Inggris: Oxford University Press.

- Azyumardi Azra. 2006. "Pendidikan Antikorupsi: Mengapa Penting" dalam Kata Pengantar. Karlina Helmanita dan Sukron Kamil (Ed). *Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi*. Jakarta: CSRC.
- B.D. Brooks & Goble F.G. 1997. *The Case for Character Education: The Role of The School in Teaching Values and Virtue*. Northridge: Studio 4 Productions.
- Baharuddin Lopa. 1997. *Masalah Korupsidan Pemecahannya*. Jakarta: PT. Kipas Putih Aksara.
- Bakir Ihsan. 2006. "Pengertian Korupsi dan Prinsip-prinsip Antikorupsi". Dalam Karlina Helmanita dan Sukron Kamil (Ed). *Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi*. Jakarta: CSRC.
- Bernard Delfgaauw. 1992. *Sejarah Ringkas Filsafat Barat*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Bertrand Russell. 2007. *Sejarah Filsafat Barat dan Kaitannya dengan Kondisi Sosio-politik dari Zaman Kuno hingga Sekarang*. Diterjemahkan oleh Sigit Jatmoko, dkk dari "History of Western Philosophy and its Connection with Political and social Circumstances from the Earliest Times to the Present Day". Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Dzuriyatun Toyibah. 2006. "Faktor-faktor Penyebab Korupsi" dalam Karlina Helmanita dan Sukron Kamil (Ed). *Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi*. Jakarta: CSRC.
- Endang Saefuddin Anshari. 1992. *Ilmu Filsafat dan Agama*. Surabaya: Bina Ilmu.

- F. Budi Hardiman. 2003. *Melampaui Positivisme dan Modernitas Diskursus Filosofis tentang Metode Ilmiah dan Problem Modernitas*. Yogyakarta: Kanisius.
- Fanz Magnis-Suseno. 1994. *Etika Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Franz Magnis-Suseso. 1987. *Etika Dasar Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral*. Yogyakarta: Kanisius.
- Franz Magnis Suseso. 2009. *Menjadi Manusia Belajar dari Aristoteles*. Yogyakarta: Kanisius.
- Franz Magnis-Suseno. 1993. *Etika Jawa Sebuah Falsafi tentang Kebijaksanaan Hidup Jawa*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Franz Magnis-Suseno. 1994. *Etika Politik Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Fuad Hasan. 2001. *Pengantar Filsafat Barat*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Gerald E. Caiden, "Toward a General Theory of Official Corruption", *Asian Journal of Public Administration*, Vol. 10. No. 1. 1988.
- Haidar Bagir. 1999. "Kembali Berfilsafat: Kembali Menjadi Manusia". Dalam pengantar buku Oliver Leaman. *Pengantar Filsafat Islam Sebuah Pendekatan Tematis*. Diterjemahkan oleh Musa Kazhim dan Arif Mulyadi dari A Brief Introduction to Islamic Philosophy. Mizan: Bandung.
- Harry Hamersma. 1981. *Pintu Masuk ke Dunia Filsafat*. Yogyakarta: Kanisius.
- Hasbullah Bakri. 1986. *Sistematika Filsafat*. Jakarta: Wijaya.

<http://kbbi.web.id/etika>. Diakses 22 april 2014.

<http://kbbi.web.id/moral>. Diakses 22 april 2014.

<http://kbbi.web.id/susila>. Diakses 22 april 2014.

Husein Heriyanto. 2003. *Paradigma Holistik Dialog Filsafat, Sains, dan Kehidupan menurut Shadra dan Whitehead*. Jakarta: Teraju.

Ibnu Manzur. tt. *Lisan al-Arab*. Beirut: Dar Sadir. Jilid. 14.

Ibnu Miskawaih. 1329 H. *Tahzib al-Akhlak*. Mesir: al-Mthba'ah al-Husainiyah.

Ibnu Miskawaih. 1994. *Menuju Kesempurnaan Akhlak*. Terjemahan oleh Helmi Hidayat dari "Tahdzib Al-Akhlaq". Bandung: Mizan.

Imam Al-Ghazali. *Ihya' Ulumuddin jilid V*. Terjemahan oleh Moh. Zuhri dari "Ihya' Ulumuddin". Semarang: Asy-Syifa'.

Irfan Abubakar. 2003. "Bentuk-bentuk Korupsi" dalam Karlina Helmanita dan Sukron Kamil (Ed). *Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi*. Jakarta: CSRC.

Jeremy Pope. 2003. *Strategi Memberantas Korupsi : Elemen Sistem Integritas Nasional*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.

Jujun S Suriasumantri. 1990. *Filsafat Ilmu, Sebuah Pengantar Populer*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

K. Bertens. 2011. *Etika*. Yogyakarta: Kanisius.

K. Bertens. 1999. *Sejarah Filsafat Yunani*. Yogyakarta: Kanisius.

- K. Bertens. 1993. *Sejarah Ringkas Filsafat Barat*. Yogyakarta: Kanisius.
- Karlina Helmanita. 2006. "Pendidikan Antikorupsi Sebuah Langkah Strategis" dalam Karlina Helmanita dan Sukron Kamil (Ed). *Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi*. Jakarta: CSRC.
- Komaruddin Hidayat. 1996. *Memahami Bahasa Agama Sebuah Kajian Hermeneutik*. Jakarta: Paramadina.
- Louis O Kattsoff. 1996. *Pengantar Filsafat*. Terjemahan oleh Soejono Soemargono dari "Element of Philosophy". Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Maghfur Ahmad, dkk. 2011. *Islam dan Perubahan Sosial, Respon Terhadap Isu-isu Korupsi, Kemiskinan dan Lingkungan Hidup*. Pekalongan: STAIN Pekalongan Press.
- Mahjuddin. 2010. *Akhlaq Tasawuf II: Pencarian Ma'rifat bagi Sufi Klasik dan Penemuan Kebahagiaan Batin bagi Sufi Kontemporer*. Jakarta: Radar Jaya.
- MB. Miles dan Haberman. 1972. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press.
- Mudlor Ahmad. tt. *Etika dalam Islam*. Surabaya: Al-Ikhlash.
- Muhammad Nurul Irfan. 2009. *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dalam Perspektif Fikih Jinayah*. Jakarta: Litbang Departemen Agama RI Badan.
- Muhammad Rohmadi. 2010. *Makalah Seminar Nasional*. "Pembentukan Karakter Guru dan Dosen sebagai Upaya Mewujudkan Pendidikan Karakter di Indonesia". Bandung, 15 Nopember 2010.
- Musa Asy'ari. 1999. *Filsafat Islam Sunnah Nabi dalam Berpikir*. Yogyakarta: Lesfi.

- Nurcholish Madjid. 1995. *Islam Doktrin dan Peradaban*. Jakarta: Paramadina.
- Poedjawijatna. 1990. *Pembimbing ke Arah Alam Filsafat*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Reza A. A Wattimena. 2012. *Filsafat Anti-Korupsi*. Yogyakarta: Kanisius.
- Reza A.A Wattimena. 2012. *Manusia-manusia Korup*. <http://www.thailandlaw.org>. Diakses 1 Pebruari 2014.
- Robert Klitgaard. 2001. *Membasmi Korupsi*. Diterjemahkan oleh Hermoyo. Jakarta: Yayasan Obor.
- Rosihon Anwar. 2010. *Akhlah Tasawuf*. Bandung: Pustaka Setia.
- Sudarwan Danim. 2002. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: Pustaka setia.
- Sutinah. 2010. "Teori Simulations Jean Baudrillard" dalam Bagong Suyanto dan M. Khusna Amal (Ed). *Anatomi dan Perkembangan Teori Sosial*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Suyuti Pulungan. 2006. "Korupsi di Negeri Penduduk Mayoritas Muslim: Suatu Kajian tentang Sistem Politik". Dalam Suyitno (Ed). *Korupsi, Hukum, dan Moralitas Agama*. Yogyakarta: Gama Media.
- WJS. Poerwadarminta. 1991. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

RIWAYAT HIDUP

A. Identitas diri:

1. Nama : Tri Astutik Haryati
2. NIP : 197411182000032001
3. Tempat / Tanggal Lahir : Lamongan, 18-11-1974
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Golongan / Pangkat : IV/a
6. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
7. Perguruan Tinggi : IAIN Pekalongan
8. Alamat Rumah : Wiradesa RT. 05 RW. 02
Pekalongan
9. Telp./Hp : 08156903231
10. Email :
tri.astutik.haryati@iainpekalongan.ac.id
tri_img@yahoo.com

B. Pendidikan Formal:

1. S.1 Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Ampel Surabaya, jurusan Aqidah Filsafat (1992-1996)
2. S.2 Program Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, jurusan Islam dan Modernitas (1997-1999)
3. S.3 UIN Walisongo Semarang, jurusan Studi Islam (2014-2018)

C. Riwayat Pekerjaan:

1. Staf pengajar di UNISDA Lamongan tahun 1999-2000
2. Tenaga Edukatif di Fakultas Dakwah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2000-2004
3. Tenaga Edukatif di Fakultas Ushuluddin, Adab dan dakwah IAIN Pekalongan tahun 2004-sekarang

D. Karya ilmiah:

1. Buku/Jurnal/Makalah

Tahun	Judul	Penerbit / Jurnal
2017	Kosmologi Jawa sebagai Landasan Filosofis Etika Lingkungan	Jurnal Religia IAIN Pekalongan Vol. 20, No.2, Oktober 2017
2017	<i>The Influence of Islamic Transformative Education and Mature Religious Sentimen on Conceptual Perception of Jihad</i>	Proceeding Seminar Internasional IAIN Pekalongan
2016	<i>Islamic and Javanese Cosmology as a Philosophical Construction of Environmental Ethics</i>	Proceeding Seminar Internasional STAIN Pekalongan
2015	<i>Islam Rahmatan lil 'Alamin (Perspective Sociology of Knowledge)</i>	Proseding Seminar Internasional STAIN Pekalongan
2015	Sikap Konservasi Lingkungan ditinjau dari Keimanan dan Persepsi tentang Kegiatan Keagamaan	Jurnal penelitian STAIN Pekalongan
2015	Pendidikan Islam Transformatif dan Kematangan Beragama sebagai Prediktor Pemahaman Makna Jihad	Buku diterbitkan oleh STAIN Pekalongan Press
2014	Korupsi Perspektif Etika Aristoteles	Buku diterbitkan oleh STAIN Pekalongan Press
2012	Manusia Perspektif Soren Kierkegaard dan Muhammad Iqbal	Buku diterbitkan oleh STAIN Pekalongan Press
2012	Titik Temu Pemikiran Soren Kierkegaard dan	Jurnal Penelitian STAIN Pekalongan

Tahun	Judul	Penerbit / Jurnal
	Muhammad Iqbal tentang Manusia	
2012	Filsafat Islam: Antara <i>Hikmah</i> dan <i>Falsafah</i> (Suatu Pendekatan Semantik)	Proseding Seminar Internasional STAIN Pekalongan
2011	Pendidikan Karakter dan Tantangan Modernitas (Suatu Tinjauan Filosofis)	Proseding Seminar Internasional STAIN Pekalongan
2011	Ensiklopedia Anak Shaleh	Buku diterbitkan oleh PT. Naylal Moona Jakarta
2011	Teologi Multikultural (Resolusi Konflik Religiusitas di Indonesia)	Jurnal Religia STAIN Pekalongan Vol. 14 No. 2 Oktober 2011
2010	Tasawuf dan Tantangan Modernitas	Jurnal Ulumuna IAIN Mataram Vol. XIV No.2 Desember 2010
2009	Islam dan Pendidikan Multikultural	Jurnal Tadris STAIN Pamekasan Vol.4 No.2 2009
2008	Dimensi Feminin Tuhan (Paradigma Baru bagi Kesetaraan Gnejer)	Jurnal Religia STAIN Pekalonagn Vol. 5 No.2, Nopember 2008
2008	Monotheisme dalam Kontroversi (Perspektif Ilmu Pengetahuan dan Wahyu)	Makalah Seminar Nasional STAIN Pekalongan 2008
2007	Teologi Multikultural (Suatu Pendekatan Filsafat Perennial)	Jurnal Religia STAIN Pekalonagn Vol. 10 No.2, Oktober 2007
2007	Kembali Menjadi Manusia (Teologi Pembebasan dalam	Jurnal Religia STAIN Pekalonagn Vol. 4

Tahun	Judul	Penerbit / Jurnal
	Diskursus Filsafat Islam)	No.1, Mei 2007
2007	Filsafat Emanasi (Teori Penciptaan Alam menurut al-Farabi)	Jurnal Religia STAIN Pekalongan Vol. 10 No.1, April 2007
2004	Corak dan Aliran Tafsir Bintusy-Syathi'	Jurnal Religia STAIN Pekalongan
2004	Sekularisme tanpa Sekularisasi	Jurnal Religia STAIN Pekalongan
2004	Analisis Budaya politik Jawa dalam Serat Wulang Reh	Makalah Disampaikan dalam acara Diskusi Dosen
2002	Peran wanita	Jurnal Karsa STAIN Pamekasan

2. Pengalaman Penelitian

Tahun	Judul Penelitian	Jabatan	Sumber Dana
2016	Orang Islam Jawa dan Lingkungannya	Ketua	STAIN Pekalongan
2015	Pemahaman Makna Jihad Ditinjau dari Pendidikan Islam Transformatif dan Kematangan Beragama	Anggota	Diktis Kemenag Jakarta
2015	Konstruksi Makna Ziarah di Makam Mbah Udah Desa Waru Lor Wiradesa Pekalongan	Ketua	STAIN Pekalongan
2015	Sikap Konservasi Lingkungan ditinjau dari Keimanan dan Persepsi tentang Kegiatan Keagamaan	Ketua	STAIN Pekalongan

Tahun	Judul Penelitian	Jabatan	Sumber Dana
2014	Korupsi Perspektif Filsafat Etika Aristoteles	Ketua	STAIN Pekalongan
2013	Agama dan Masyarakat Industri Batik Pekalongan dalam Bingkai Filsafat Karl Marx	Ketua	STAIN Pekalongan
2012	Pendidikan Karakter di STAIN Pekalongan	Ketua	STAIN Pekalongan
2011	Titik Temu Pemikiran Soren Kierkegaard dan Muhammad Iqbal tentang Manusia	Ketua	STAIN Pekalongan
2010	Modernitas dalam Perspektif Seyyed Hossein Nasr	Ketua	STAIN Pekalongan
2009	Pendidikan Islam Multikultural di STAIN Pekalongan	Ketua	STAIN Pekalongan
2008	Teologi Perempuan (Representasi Sifat-sifat Tuhan dalam Diri Perempuan)	Ketua	STAIN Pekalongan
2007	Kembali menjadi Manusia (Teologi Pembebasan dalam Diskursus Filsafat Islam)	Ketua	STAIN Pekalongan
2006	Teologi Universal Islam & Kontribusinya bagi Multikulturalisme Bangsa	Ketua	STAIN Pekalongan
2004	Reaktualisasi Perlindungan Hukum Hak-hak Perempuan Kawin dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia	Anggota	STAIN Pekalongan

RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : Miftahul Ula, M.Ag.
2. Tempat/tgl. Lahir : Pekalongan, 18 September 1974
3. Alamat : Karangjampo 01/2 Tirto
Kab. Pekalongan
4. No. HP : 081548044320
5. E-mail : [ula_miftahul@yahoo.co.id/](mailto:ula_miftahul@yahoo.co.id)
miftahul.ula@iainpekalongan.ac.id
6. ID Scopus : 57194111903

B. Riwayat Pendidikan

1. MI Salafiyah Karangjampo lulus tahun 1987
2. SMP Salafiyah kota Pekalongan, lulus Tahun 1990
3. MAN Babakan Ciwaringin Cirebon lulus Tahun 1993
4. S1 Bahasa dan Sastra Arab IAIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta lulus Tahun 1999
5. S2 Agama dan Filsafat, Konsentrasi Filsafat Islam
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta lulus Tahun 2002

C. Karya Ilmiah

1. Buku dan Jurnal yang dipublikasikan

Tahun	Judul	Penerbit/Jurnal
2012	Perempuan di balik teroris: Kajian religiusitas, penyesuaian diri dan pola relasi suami isteri tersangka teroris di Kota Pekalongan,	Proceeding AICIS XII, November 2012
	Korupsi: Perspektif Filsafat Etika Aristoteles (editor).	STAIN Pekalongan Press

Tahun	Judul	Penerbit/Jurnal
2013	Formalisasi dan Transformasi Pendidikan Pesantren.	<i>JURNAL PENELITIAN</i> , [S.1.], v. 5, n. 2, may 2013. ISSN 2541-6944.
2013	SIGNIFIKANSI PENGAJARAN BAHASA INGGRIS DALAM PROSES PENGEMBANGAN ISLAMIC STUDIES.	<i>JURNAL PENELITIAN</i> , [S.1.], v. 6, n. 1, may 2013. ISSN 2541-6944
2013	IMPLIKASI PEMBELAJARAN BAHASA ARAB TERHADAP KEMAMPUAN MAHASISWA STAIN PEKALONGAN DALAM MEMBACA LITERATUR BAHASA ARAB.	<u>JURNAL PENELITIAN</u> , [S.1.], v. 6, n. 2, may 2013. ISSN 2541-6944.
2014	Pendidikan Karakter di STAIN Pekalongan	<i>JURNAL PENELITIAN</i> , [S.1.], v. 10, n. 1, mar. 2014. ISSN 2541-6944.
2015	Ilmu Kalam dalam Sorotan Filsafat Ilmu.	<i>RELIGIA</i> , [S.1.], p. 162-186, sep. 2015. ISSN 2527-5992.
2016	Pendidikan Islam Transformatif dan Kematangan Beragama sebagai Prediktor Pemahaman Konsep Jihad	STAIN Press, Januari 2016.
2017	SIMBOLISME BAHASA SUFI (Kajian Hermeneutika terhadap Puisi Hamzah Fansuri).	<i>RELIGIA</i> , [S.1.], p. 26-41, feb. 2017. ISSN 2527-5992.
2017	ISLAM DAN PLURALISME AGAMA.	<i>RELIGIA</i> , [S.1.], oct. 2017. ISSN 2527-5992.

Tahun	Judul	Penerbit/Jurnal
2017	TRADISI MUNGGAH MOLO DALAM PERSPEKTIF ANTROPOLAGI LINGUISTIK.	<i>JURNAL PENELITIAN</i> , Volume. 7, No. 2, Oct. 2012. ISSN 2541-6944.
2017	AMALIYYAH TA'LIM HIFDH AL-MUFRADAT BI WASITHAH AL-UGHNIYAH LI TARJAMAH KUTUB AT-TURATS.	<i>ALSINATUNA</i> , [S.l.], v. 2, n. 1, p. 69-88, apr. 2017. ISSN 2503-2690.
2017	The Influence Of Islamic Transformative Education And Mature Religious Sentiment On Conceptual Perception Of Jihad	Journal of Business and Tourism, 301-324, Abdul Wali Khan University Mardan
2017	A Majority Group's Perspective-taking Towards a Minority Group: Its Antecedents and Impact on Support for Minority Helping	Psychology and Developing Societies 29(1) 44–73 © 2017 Department of Psychology, University of Allahabad SAGE Publications sagepub.in/home.na v DOI: 10.1177/0971333616689191
2019	Konseling Sufistik Untuk Mengatasi Kecemasan Menghadapi Kematian (Studi Kasus pada Lansia Terlantar pada Lansia RPSBM di Kota Pekalongan).	ESOTERIK , [S.l.], v. 5, n. 1, p. 126-144, june 2019. ISSN 2502-8847.

Tahun	Judul	Penerbit/Jurnal
2019	Rekonsiliasi dan Toleransi Muslim-Non Muslim dalam Bingkai Moderasi Islam	IAIN Pekalongan Press, September 2019
2020	Penyuluhan Anti Narkoba Berbasis Spiritual Islam.	<i>Abdimas: Jurnal Pengabdian Masyarakat Universitas Merdeka Malang</i> , 5(2), 105-114. https://doi.org/10.26905/abdimas.v5i2.4059
2020	On being moderate and peaceful: Why Islamic political moderateness promotes outgroup tolerance and reconciliation	Archive for the Psychology of Religion, 2020 https://doi.org/10.1177%2F0084672420931204

2. Pengalaman Penelitian

Tahun	Judul Penelitian	Lembaga
2006	Merebut Hak Atas Air Bersih: Nestapa Masyarat Karangjampo Dibalik Kantung Tebal Pengusaha Batik (Program Pemberdayaan Masyarakat: <i>Participatory Action Research</i>), 2005-2006	Diktis, Ditjen Pendis Depag
2006	Gagasan & Gerakan Nasioanalisme : Studi atas	P3M STAIN Pekalongan

Tahun	Judul Penelitian	Lembaga
	Wacana Kebangsaan Berbasis Keagamaan Parpol Islam di Pekalongan	
2007	Meminta Kembali Hak Air Bersih di Karangjampo: Advokasi Kebijakan Publik	Diktis, Ditjen Pendis Depag
2007	Persepsi Mahasiswa STAIN terhadap Pengajaran B.Inggris dalam pengembangan <i>Islamic Studies</i>	P3M STAIN Pekalongan
2008	Formalisasi Pesantren (Dampaknya Terhadap Transformasi Mutu Pendidikan Pesantren di Kota Pekalongan)	P3M STAIN Pekalongan
2009	Implikasi Mata Kuliah Bahasa Arab terhadap Peningkatan Kemampuan Membaca Literatur Berbahasa Arab bagi Mahasiswa STAIN Pekalongan	P3M STAIN Pekalongan
2010	Tradisi Munggah Molo di Pekalongan : Kajian Antropologi Linguistik	P3M STAIN Pekalongan
2011	Perempuan dibalik Teroris : Penyesuaian Diri dan Pola Relasi Suami Isteri Tersangka teroris	P3M STAIN Pekalongan
2012	Pembangunan Karakter Bangsa Melalui PTAI (Studi Kasus Di STAIN Pekalongan)	P3M STAIN Pekalongan
2013	Agama dalam masyarakat industri	P3M STAIN

Tahun	Judul Penelitian	Lembaga
	batik Pekalongan dalam bingkai Filsafat Karl Marx	Pekalongan
2014	Nahwu Cita Rasa Tasawuf (Analisis Simbolik Kitab <i>Al-Futuhat al-Quddusiyyah</i> Karya Ibn ‘Ajibah)	P3M STAIN Pekalongan
2015	MEMBENDUNG ROB DENGAN TAWAKAL (Implementasi Nilai-Nilai Tasawuf Masyarakat Desa Mulyorejo Tirto Pekalongan)	P3M STAIN Pekalongan
2015	PEMAHAMAN KONSEP JIHAD DITINJAU DARI PENDIDIKAN ISLAM TRANSFORMATIF DAN KEMATANGAN BERAGAMA	DIKTIS Kemenag RI
2016	KETERJEMAHAN UNGKAPAN <i>KINAYAH</i> DALAM AL-QUR’AN : STUDI KITAB TAFSIR <i>AL-IBRIZ</i> KARYA KH. BISYRI MUSTHAFI	P3M STAIN Pekalongan
2017	INTERTEKSTUALITAS KARYA TASAWUF KLASIK (KAJIAN <i>AL-WASHAYA</i> KARYA <i>AL-MUHASIBI</i> DAN <i>AL-MUNQIDZ MIN AL-DHALAL</i> KARYA <i>AL-GHAZALI</i>)	P3M STAIN Pekalongan
2019	DAKWAH STRUKTURAL DERADIKALISASI ISLAM (Studi Strategi Dakwah di IAIN Pekalongan dan KUPU Bandar Seri Begawan)	Diktis Kemenag RI